

**PENGARUH KETERLIBATAN PEREMPUAN
DALAM PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN
KEPEMIMPINAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI
INDONESIA TAHUN 2015-2021**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

ALRESA ERILLA SYAHBARI

NIM. 12020121120048

FEB UNDIP

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Alresa Erilla Syahbari

Nomor Induk Mahasiswa : 12020121120048

Fakultas/Departemen : Ekonomika dan Bisnis / Ekonomi

Judul Skripsi : **PENGARUH KETERLIBATAN PEREMPUAN
DALAM PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN
KEPEMIMPINAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI
INDONESIA TAHUN 2015-2021**

Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.

Semarang, 19 Agustus 2025

Dosen Pembimbing,



Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.

NIP. 197107251997022001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Alresa Erilla Syahbari

Nomor Induk Mahasiswa 12020121120048

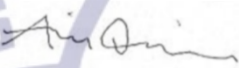
Fakultas/Departemen : Ekonomika dan Bisnis / Ekonomi

Judul Skripsi : **PENGARUH KETERLIBATAN PEREMPUAN
DALAM PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN
KEPEMIMPINAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI
INDONESIA TAHUN 2015-2021**

Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.

Telah dinyatakan lulus pada tanggal 1 September 2025

Tim Penguji :

1. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si. ()
2. Nenik Woyanti, S.E., M.Si. ()
3. Arif Pujiyono, S.E., M.Si. ()

FEB UNDIP

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya Alresa Erilla Syahbari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **PENGARUH KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI INDONESIA TAHUN 2015-2021** merupakan hasil tulisan saya sendiri. Dengan demikian saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat tulisan orang lain secara keseluruhan yang saya ambil dengan cara menyalin maupun meniru pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Selain itu, tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya ambil atau salin dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Jika saya terbukti melakukan tindakan yang menentang dengan hal tersebut baik disengaja maupun tidak, maka saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Jika di kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin dan meniru tulisan orang lain seakan-akan sebagai tulisan saya, maka gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas akan dibatalkan.

Semarang, 19 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Alresa Erilla Syahbari

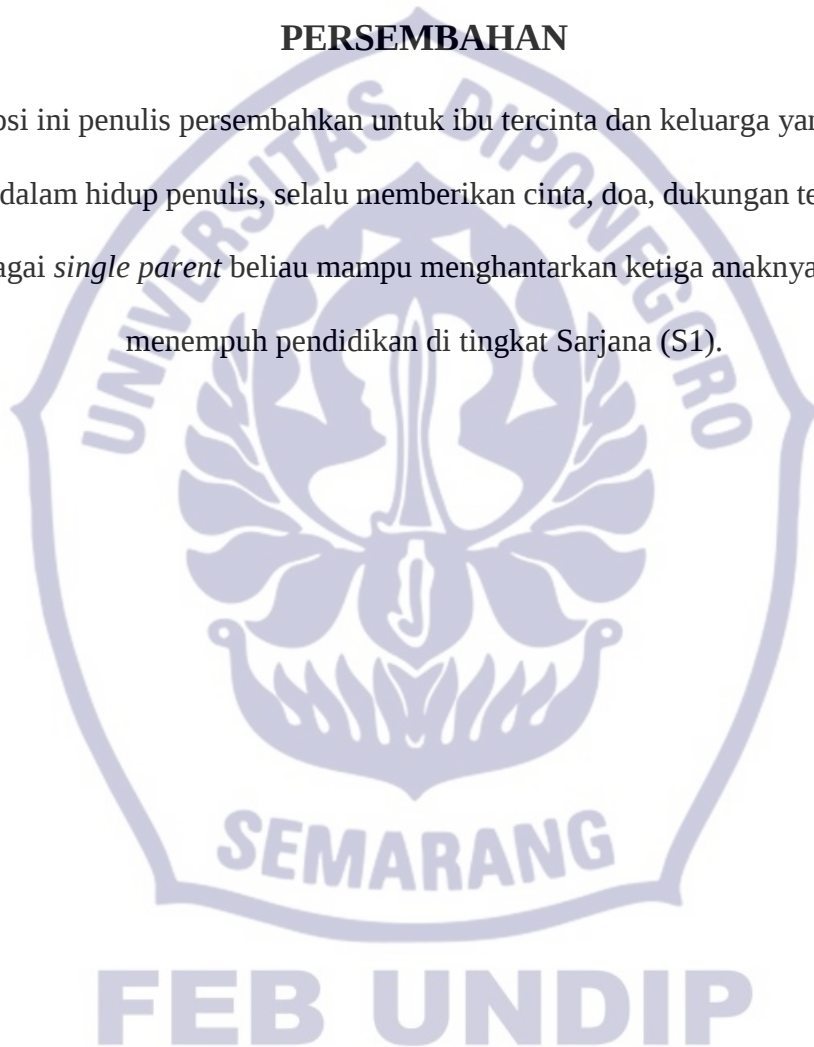
NIM. 12020121120048

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jalur langit tidak akan pernah gagal, karena harapan yang digantungkan kepada-
Nya selalu menemukan jalan pulang

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk ibu tercinta dan keluarga yang telah berjasa dalam hidup penulis, selalu memberikan cinta, doa, dukungan terbaik, dan sebagai *single parent* beliau mampu menghantarkan ketiga anaknya untuk menempuh pendidikan di tingkat Sarjana (S1).



ABSTRACT

Inclusive economic growth is a development process that focuses not only on increasing national income but also on reducing inequality and poverty by creating equitable economic opportunities for all groups in society. Despite this, women in Indonesia still face inequality, particularly in access to economic resources and decent employment opportunities. This study aims to analyze the influence of women's involvement in education, health, and leadership on inclusive economic growth in Indonesia.

This study uses secondary data in the form of panel data from 34 provinces during the period 2015-2021, with a total of 238 observations. The independent variables explained include women's average years of schooling, women's life expectancy, women's labor force participation rate, women's representation in parliament, the proportion of women in managerial positions, and foreign direct investment. The estimation model used is the Random Effects Model (REM).

The results show that inclusive economic growth in Indonesia is influenced by women's average years of schooling, women's life expectancy, and foreign direct investment. Meanwhile, women's labor force participation rate, women's representation in parliament, and the proportion of women in managerial positions do not significantly influence inclusive economic growth in Indonesia. These findings indicate that women's limited access to the productive sector and structural discrimination in the labor market are obstacles to achieving inclusive economic growth. Therefore, policies focused on improving the quality of women's education and health, as well as labor market reform, are needed to promote sustainable, inclusive economic growth.

Keywords: Inclusive economic growth, gender equality, women's empowerment, women's economic participation, gender inequality



ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan proses pembangunan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga pada pengurangan ketimpangan dan kemiskinan melalui penciptaan peluang ekonomi yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat. Meskipun demikian, perempuan di Indonesia masih menghadapi ketimpangan, terutama pada akses terhadap sumber daya ekonomi dan peluang kerja yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterlibatan perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan kepemimpinan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel dari 34 provinsi selama periode 2015-2021, dengan total 238 observasi. Variabel independen yang dianalisis meliputi rata-rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan pada posisi manajerial, investasi asing langsung. Adapun model estimasi yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh rata-rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup perempuan, serta investasi asing langsung. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan dan kesehatan perempuan, serta dukungan modal asing, menjadi faktor utama pendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Sementara itu, variabel tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, keterwakilan perempuan di parlemen, dan proporsi perempuan pada posisi manajerial tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Kata kunci : Pertumbuhan ekonomi inklusif, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, partisipasi ekonomi perempuan, ketimpangan gender



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul“ **PENGARUH KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI INDONESIA TAHUN 2015-2021**”, skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi baik berupa bantuan maupun dukungan kepada penulis yaitu :

1. Prof. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Faisal, S.E., M.Si, Ph.D. selaku dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Prof. Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
4. Dr. Jaka Aminata, S.E., M.A. selaku Ketua Program Studi Ekonomi.
5. Ibu Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang selalu sabar, memberikan waktu, arahan, saran, dan dukungan bagi penulis dari awal proses penyusunan skripsi hingga akhir.

6. Dr. rer. pol. Alfa Farah, S.E., M.Sc. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan kemudahan bagi penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
7. Ibunda tercinta yang selalu memberikan cinta, dukungan, doa, dan harapan terbaik kepada penulis.
8. Kakek dan nenek yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir skripsi.
9. Alfia Laisa Zakki Affrisa selaku kakak dan Alquito Alwan Choiri selaku adek, yang telah memberikan semangat, motivasi, dan selalu memberikan tawa bagi penulis.
10. Muhammad Raihan Adif Sabirin, selaku sahabat penulis yang selalu menemani, memberikan semangat, dan menjadi tempat keluh kesah dalam menjalani kehidupan.
11. Teman-teman perantau yaitu Grace Ribka, Audrilla Tania, Analia Prtiwardhany, Patricia Tiurlan, Irzal Azqo, dan Bella Mutiara sebagai teman setia, keluarga selama menjalani masa perkuliahan yang memberikan canda dan tawa serta berjuang bersama.
12. Teman-teman satu bimbingan dan teman-teman Ilmu Ekonomi angkatan 2021.

Semarang, 19 Agustus 2025



Alresa Erilla Syahbari

NIM. 12020121120048

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1.3.1 Tujuan	18
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	19
1.4 Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Landasan Teori	23
2.1.1 Teori Pertumbuhan Endogen	23
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	25
2.1.3 Teori Modal Manusia.....	27
2.1.4 Konsep Gender.....	29
2.1.5 Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan (RLSP)	31
2.1.6 Angka Harapan Hidup Perempuan (AHHP).....	32
2.1.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP).....	32
2.1.8 Keterwakilan Perempuan di Parlemen (KPP)	34

2.1.9 Proporsi Perempuan pada Posisi Manajerial (PPM)	35
2.1.10 Investasi Asing Langsung (LOG_FDI)	36
2.2 Hubungan Variabel Independen dengan Variabel Dependen	38
2.2.1 Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan dengan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	38
2.2.2 Hubungan Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan dengan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	39
2.2.3 Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan dengan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	40
2.2.4 Hubungan Keterwakilan Perempuan di Parlemen (KPP) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	40
2.2.5 Hubungan Proporsi Perempuan pada Posisi Manajerial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	41
2.2.6 Hubungan Investasi Asing Langsung (LOG_FDI) dengan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	42
2.3 Penelitian Terdahulu	43
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis	55
2.5 Hipotesis	58
BAB III	60
METODE PENELITIAN	60
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	60
3.1.1 Variabel Penelitian	60
3.2 Jenis dan Sumber Data	62
3.3 Metode Pengumpulan Data	63
3.4 Metode Analisis Data	63
3.4.1 Estimasi Model	64
3.4.2 Metode Analisis Data Panel	64
3.4.3 Pemilihan Model Estimasi pada Data Panel	66
3.4.4 Uji Asumsi Klasik	68
3.4.5 Uji Statistik	70
BAB IV	68
HASIL DAN PEMBAHASAN	68

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	68
4.1.1 Perkembangan IPEI di Indonesia	68
4.1.2 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Indonesia	76
4.1.3 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan di Indonesia	78
4.1.4 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Indonesia	80
4.1.5 Perkembangan Keterwakilan Perempuan di parlemen di Indonesia	82
4.1.6 Perkembangan Proporsi Perempuan pada Posisi Manajerial (PPM) di Indonesia	84
4.1.7 Perkembangan Investasi Asing Langsung (FDI) di Indonesia.....	86
4.2 Analisis Data.....	88
4.2.1 Analisis Statistik dan Deskriptif.....	88
4.2.2 Hasil Uji Model Regresi Data Panel	90
4.2.3 Hasil Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	92
4.2.4 Hasil Regresi <i>Random Effect Model</i> (REM).....	94
4.2.5 Hasil Uji Signifikansi.....	95
4.3 Interpretasi Hasil.....	98
4.3.1 Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	98
4.3.2 Pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	99
4.3.3 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	101
4.3.4 Pengaruh Keterwakilan Perempuan di Parlemen terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	102
4.3.5 Pengaruh Proporsi Perempuan pada Posisi Manajerial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	105
4.3.6 Pengaruh Investasi Asing Langsung (LOG_FDI) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.....	106
BAB V.....	108
PENUTUP	108

5.1 Kesimpulan	108
5.2 Keterbatasan.....	110
5.3 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN	118



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Negara-Negara di ASEAN Tahun 2017-2021	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	48
Tabel 3.1 Sumber Data	63
Tabel 4.1 Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) Indonesia Tahun 2015-2021	75
Tabel 4.2 Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Indonesia Tahun 2015-2021	77
Tabel 4.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan di Indonesia Tahun 2015-2021 (dalam tahun).....	79
Tabel 4.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Indonesia Tahun 2015-2021 (dalam persen).....	80
Tabel 4.5 Keterwakilan Perempuan di Parlemen di Indonesia Tahun 2015-2021 (dalam persen)	82
Tabel 4.6 Proporsi Perempuan pada Posisi Manajerial di Indonesia Tahun 2015-2021 (dalam persen).....	84
Tabel 4.7 Investasi Asing Langsung (FDI) di Indonesia Tahun 2015-2021	86
Tabel 4.8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Penelitian	88
Tabel 4.9 Hasil Uji Chow.....	90
Tabel 4.10 Hasil Uji Hausman	91
Tabel 4.11 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)	91
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas.....	86
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas	92
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	93
Tabel 4.15 Hasil Uji Autokorelasi.....	93
Tabel 4.16 Hasil Estimasi Data Panel dengan REM (Robust)	94



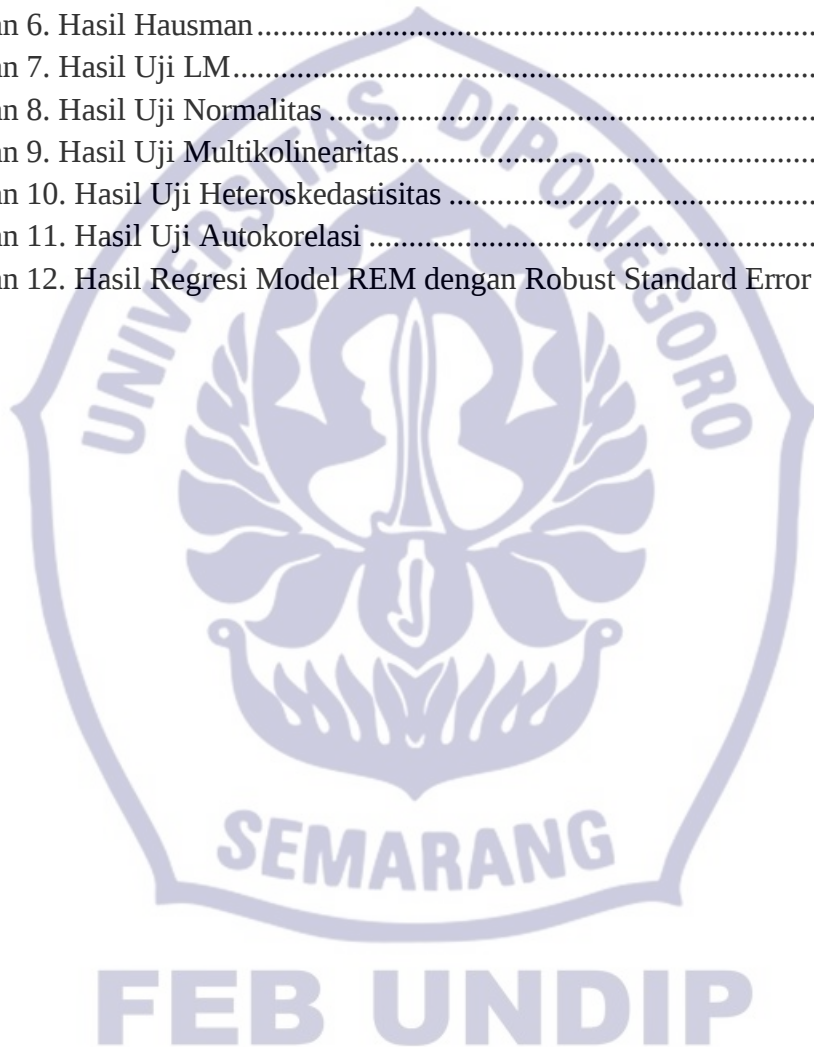
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia Tahun 2017-2021	2
Gambar 1.2 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) perempuan Tahun 2017-2021	6
Gambar 1.3 Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan Tahun 2017-2021	9
Gambar 1.4 Keterwakilan Perempuan di Parlemen Tahun 2017-2021	12
Gambar 1.5 Proporsi Perempuan pada Posisi Manajerial Tahun 2017-2021	13
Gambar 1.6 Investasi Asing Langsung (FDI) Indonesia Tahun 2017-2021 (dalam miliar rupiah)	14
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian	118
Lampiran 2. Hasil Statistik Deskriptif	126
Lampiran 3. Hasil Regresi Model REM	127
Lampiran 4. Hasil Regresi Model CEM	128
Lampiran 5. Hasil Regresi Model FEM	129
Lampiran 6. Hasil Hausman	130
Lampiran 7. Hasil Uji LM	131
Lampiran 8. Hasil Uji Normalitas	132
Lampiran 9. Hasil Uji Multikolinearitas	133
Lampiran 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas	134
Lampiran 11. Hasil Uji Autokorelasi	135
Lampiran 12. Hasil Regresi Model REM dengan Robust Standard Error	136



BAB I

PENDAHULUAN

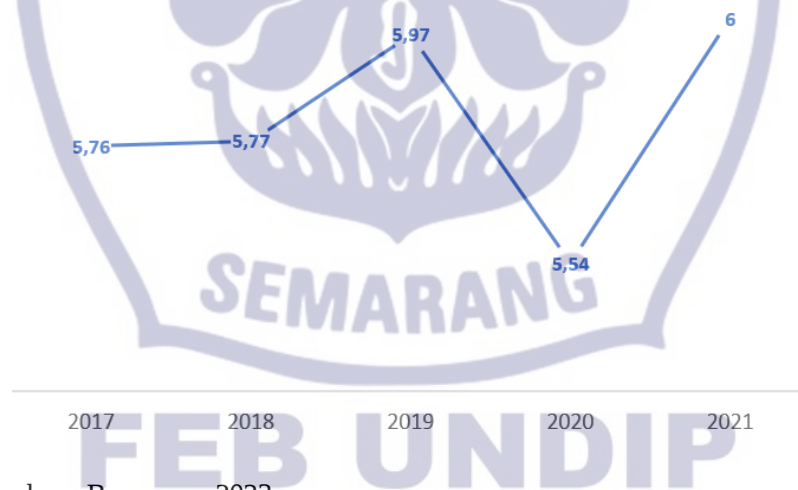
1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan suatu konsep pertumbuhan yang menjadi dasar pembangunan suatu negara, yang tidak hanya berfokus pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi konsep ini dipandang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan memperbaiki kondisi ketimpangan (Ianchovichina & Lundstrom, 2009). Menurut Ali & Son (2007) pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan suatu pertumbuhan ekonomi yang menciptakan pemerataan akses dan peluang ekonomi pada seluruh lapisan masyarakat secara adil, peningkatan kesejahteraan, dan mengurangi ketimpangan antar kelompok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi inklusif terjadi jika seluruh anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan berkontribusi dengan tidak memperhatikan latar belakang anggota masyarakat (Rini & Tahi, 2021)

Pertumbuhan inklusif sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan ke-8 yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan, serta menciptakan pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat. Adapun capaian dari pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu percepatan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi serta terbentuknya inklusi sosial, pemberdayaan, dan keamanan (Ali & Son, 2007).

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi inklusif digunakan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang merupakan indeks komposit, mencakup dimensi pertumbuhan, pemerataan, serta inklusi sosial. Adapun penggunaan IPEI sebagai indeks komposit gabungan dari seluruh provinsi menjadi penting karena Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang sangat beragam, baik dari sisi demografi, tingkat pembangunan, maupun struktur ekonomi. Dengan menggabungkan data dari seluruh provinsi, IPEI dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai sejauh mana pertumbuhan ekonomi di Indonesia benar-benar inklusif.

Gambar 1.1 Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia Tahun 2017-2021 (nilai indeks)



Sumber : Bappenas, 2023

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2021), tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia pada tahun 2017-2021 menunjukkan kondisi stabil di atas 5, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan angka 5,54 akibat pandemi Covid-19. Menurut Rini & Tahi

(2021), pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mencapai tingkat inklusif, hal ini tercermin dari rendahnya jumlah provinsi yang telah mencapai tingkat inklusif tinggi. Menurut penelitian tersebut, terdapat empat provinsi yang telah mencapai kategori pertumbuhan inklusif pada tahun 2018 yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Riau. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia masih tergolong rendah.

Salah satu upaya guna mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif adalah dengan mewujudkan kesetaraan gender (Garcia et al., 2020). Mewujudkan kesetaraan gender merupakan bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka memberdayakan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak memperhitungkan dan mengatasi ketimpangan gender dapat menjadikan efektivitas pembangunan tidak maksimal. Ketimpangan gender merupakan kondisi di mana terdapat kesenjangan akses dan capaian antara laki-laki dan perempuan pada seluruh aspek kehidupan. Permasalahan ini masih menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh berbagai negara Asia Tenggara termasuk di Indonesia, hal ini tercermin melalui tingginya Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Adapun masalah ketimpangan gender sebagai penghambat dalam mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif serta dapat membatasi perempuan untuk berkontribusi pada perekonomian dan dapat menghambat pemerataan akses kesempatan yang ada (Georgeson & Maslin, 2018).

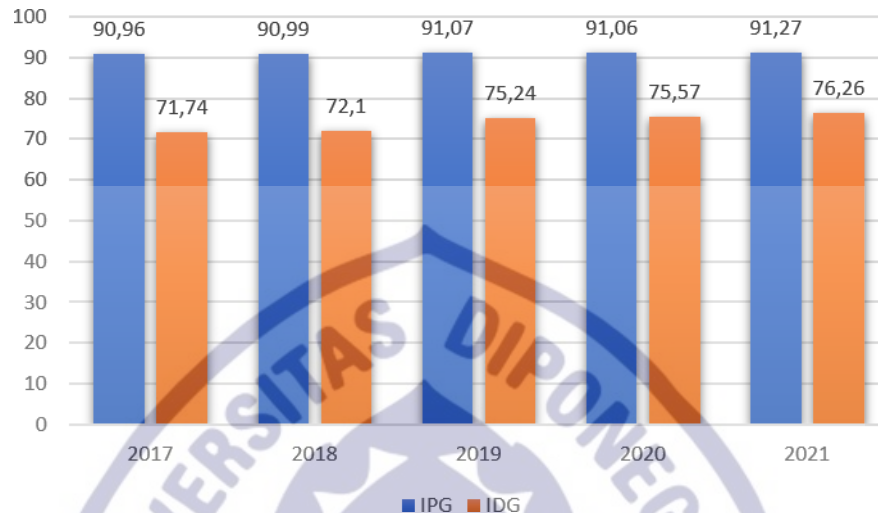
Tabel 1.1 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Negara-Negara di ASEAN Tahun 2017-2021 (indeks)

Negara	<i>GII (Gender Inequality Index)</i>				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indonesia	0,455	0,451	0,436	0,429	0,425
Thailand	0,400	0,385	0,310	0,307	0,301
Singapura	0,049	0,049	0,047	0,034	0,030
Malaysia	0,287	0,193	0,193	0,182	0,173
Filipina	0,427	0,400	0,371	0,362	0,356
Vietnam	0,325	0,296	0,318	0,312	0,302
Kamboja	0,473	0,677	0,496	0,492	0,487
Brunei					
Darussalam	0,286	0,286	0,286	0,276	0,272
Laos	0,461	0,468	0,478	0,464	0,476
Myanmar	0,512	0,682	0,500	0,472	0,478

Sumber : UNDP, 2023

Menurut Laporan UNDP (2023), Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia pada tahun 2021 sebesar 0,425, di mana Indonesia berada pada posisi ke-7 di antara negara-negara ASEAN. Posisi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan enam negara lainnya meliputi Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Tetapi Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Laos, Myanmar, dan Kamboja. Oleh karena itu, menunjukkan bahwa pencapaian kesetaraan gender di Indonesia masih belum optimal, jika dibandingkan dengan negara lainnya.

Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia



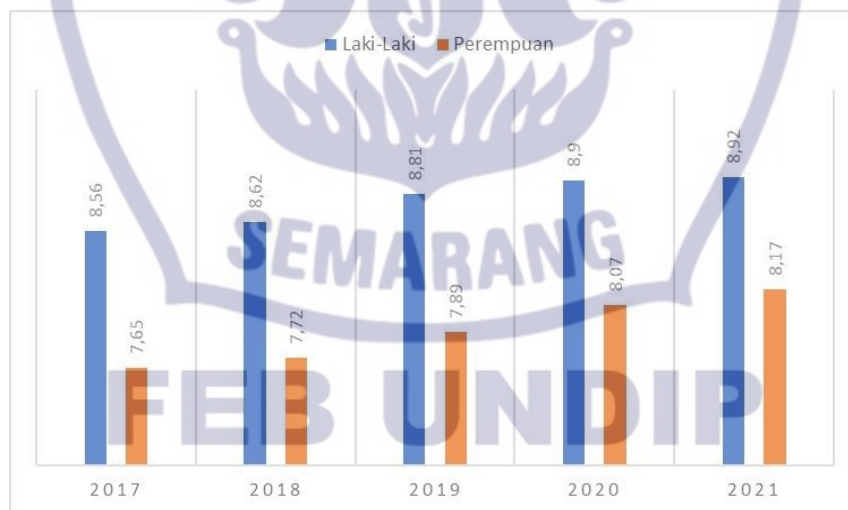
Sumber : BPS, 2024

Selain itu, capaian IPG Indonesia pada tahun 2021 sebesar 91,27, yang berarti pemerataan pembangunan antara perempuan dan laki-laki sudah cukup baik secara nasional. Namun demikian, pencapaian pembangunan perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Adapun dalam mewujudkan kesetaraan gender, peran aktif perempuan pada berbagai bidang juga perlu ditingkatkan, utamanya dalam bidang ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan pada kehidupan ekonomi, pengambilan keputusan, dan politik. Capaian IDG Indonesia pada tahun 2021 sebesar 76,26. Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam pemberdayaan gender, capaian tersebut masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin pada perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan ketidaksetaraan. Menurut Kabeer (2012) ketidaksetaraan terjadi karena hambatan yang dihadapi oleh perempuan baik pada akses terhadap pendidikan, kesehatan,

partisipasi di pasar tenaga kerja, maupun pada keterlibatan dalam pengambilan keputusan politik.

Pada bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah (RLS) yang didefinisikan sebagai rata-rata tahun individu dalam menyelesaikan pendidikan formal (Dwi Adika & Rahmawati, 2021). Pendidikan sebagai salah satu aspek penting yang menggambarkan modal dasar dan kualitas dari tenaga kerja. Adapun kualitas individu yang baik tercermin dari tingginya tingkat pendidikan yang ditempuh. Ketika individu menempuh pendidikan yang semakin tinggi dan semakin lama, maka individu tersebut memiliki pengetahuan ilmu yang tinggi dan menjadi lebih produktif yang dapat meningkatkan nilai tambah dalam dirinya, sehingga dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Gambar 1.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) perempuan Tahun 2017-2021 (tahun)



Sumber : BPS, 2023

Pada Gambar 1.3 menunjukkan rata-rata lama sekolah (RLS) laki-laki dan perempuan di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021, terjadi adanya perbedaan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) antara laki-laki dan perempuan. Meskipun

tren data tersebut menunjukkan bahwa keduanya terus mengalami peningkatan pada tiap tahun, tetapi rata-rata lama sekolah (RLS) laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2021 perempuan di Indonesia memiliki rata-rata lama sekolah 8,17 tahun sedangkan laki-laki pada angka 8,92 tahun. Salah satu permasalahan mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia adalah masih adanya kesenjangan rata-rata lama sekolah (RLS) antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan cenderung memiliki angka RLS yang lebih rendah. Fenomena ini tidak terlepas dari berbagai faktor sosial, ekonomi, maupun kultural. Adapun norma gender yang menempatkan perempuan pada peran domestik menyebabkan prioritas pendidikan seringkali lebih diberikan kepada laki-laki. Dalam beberapa kasus, keluarga dihadapkan pada keterbatasan biaya sehingga memilih menyekolahkan anak laki-laki dengan alasan dianggap lebih berpotensi memberikan kontribusi ekonomi jangka panjang, sementara anak perempuan lebih rentan dialihkan untuk membantu pekerjaan rumah tangga.

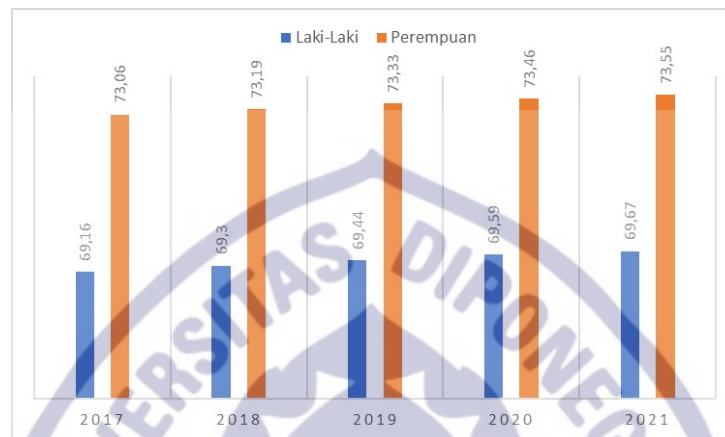
Selain itu, tingginya angka perkawinan dini dan kehamilan remaja di beberapa daerah di Indonesia turut memperbesar potensi putus sekolah pada perempuan. Beban ganda yang ditanggung perempuan, yaitu keterlibatan dalam pekerjaan rumah tangga maupun aktivitas ekonomi informal, juga membatasi kesempatan mereka untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Faktor aksesibilitas pendidikan juga memainkan peran penting, khususnya di daerah terpencil di mana fasilitas pendidikan menengah ke atas jarang tersedia. Dalam kondisi tersebut, anak perempuan lebih rentan mengalami hambatan mobilitas karena faktor keamanan dan norma sosial, sehingga tingkat keberlanjutan

sekolah menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Generasi perempuan usia dewasa dan lanjut usia yang tumbuh pada periode dengan akses pendidikan terbatas masih mendominasi dalam perhitungan rata-rata, sehingga secara agregat RLS perempuan tertinggal dari laki-laki meskipun pada generasi muda kesenjangan mulai menyempit. Dengan demikian, kesenjangan rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil akumulasi dari hambatan struktural, kultural, maupun ekonomi yang dialami perempuan, sehingga menjadi tantangan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia yang inklusif di Indonesia.

Selain itu, pada angka harapan hidup (AHH), menurut Badan Pusat Statistik (2024) Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan tahun yang akan dijalani individu sejak lahir. AHH dijadikan sebagai indikator kesehatan dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat di setiap wilayah (BPS, 2021). Dengan semakin membaiknya layanan, akses, dan fasilitas yang tersedia di suatu wilayah, maka lebih menjamin lamanya umur hidup individu. Berdasarkan Gambar 1.4 menunjukkan bahwa AHH laki-laki maupun perempuan di Indonesia pada tiap tahun mengalami peningkatan. Tetapi terdapat perbedaan signifikan antara nilai AHH laki-laki dengan perempuan. Diketahui bahwa nilai AHH perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Gambar 1.4 Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan Tahun 2017-2021 (tahun)



Sumber : BPS, 2023

Angka harapan hidup (AHH) perempuan di Indonesia tahun 2017 sebesar 73,06 tahun dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, dengan itu kesetaraan pada aspek kesehatan dapat kontribusi pada pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Berdasarkan Gambar 1.4 menunjukkan bahwa AHH perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan AHH laki-laki. Secara umum, angka harapan hidup (AHH) perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Adapun fenomena ini dapat dijelaskan melalui kombinasi faktor biologis, perilaku, dan sosial ekonomi. Dari sisi biologis, perempuan memiliki keunggulan genetik dan hormonal yang memberikan perlindungan lebih baik terhadap penyakit degeneratif, khususnya penyakit kardiovaskular. Hormon estrogen, misalnya, berperan dalam menjaga elastisitas pembuluh darah dan mengurangi risiko serangan jantung pada usia produktif, sedangkan hormon testosteron pada laki-laki justru cenderung meningkatkan risiko

hipertensi serta penyakit jantung di usia lebih muda.

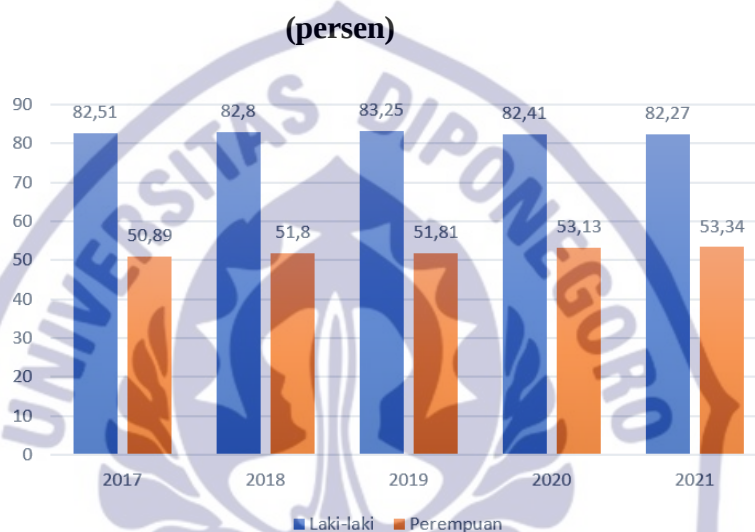
Selain itu, perbedaan gaya hidup juga mempengaruhi kesenjangan angka harapan hidup. Laki-laki secara statistik lebih banyak melakukan perilaku berisiko seperti merokok, mengonsumsi alkohol, dan bekerja pada sektor dengan risiko kecelakaan kerja yang tinggi, seperti konstruksi, transportasi, dan pertambangan. Adapun di Indonesia, prevalensi merokok laki-laki dewasa mencapai lebih dari 60 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan yang kurang dari 5 persen. Hal ini berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka kematian dini akibat penyakit tidak menular pada laki-laki.

Dari sisi sosial budaya, perempuan relatif lebih terlibat dalam jaringan sosial dan memiliki pola hidup yang lebih berhati-hati, termasuk dalam menjaga kesehatan dan mengakses layanan medis. Sementara itu, laki-laki cenderung menunda pemeriksaan kesehatan dan enggan mencari layanan medis, sehingga penyakit sering terdeteksi pada tahap yang lebih parah. Dengan demikian, perbedaan angka harapan hidup antara perempuan dan laki-laki di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh faktor perilaku, sosial, dan struktural. Kesenjangan ini menegaskan bahwa faktor kesehatan preventif, perilaku hidup sehat, dan akses layanan kesehatan memiliki peran penting dalam memperpanjang usia harapan hidup, serta menjelaskan bahwa perempuan konsisten memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Angka harapan hidup (AHH) yang baik apabila akan mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Lawanson & Umar (2019) bahwa variabel angka harapan hidup (AHH) perempuan memiliki hubungan positif dan signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan inklusif di Nigeria.

Tabel 1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2017-2021



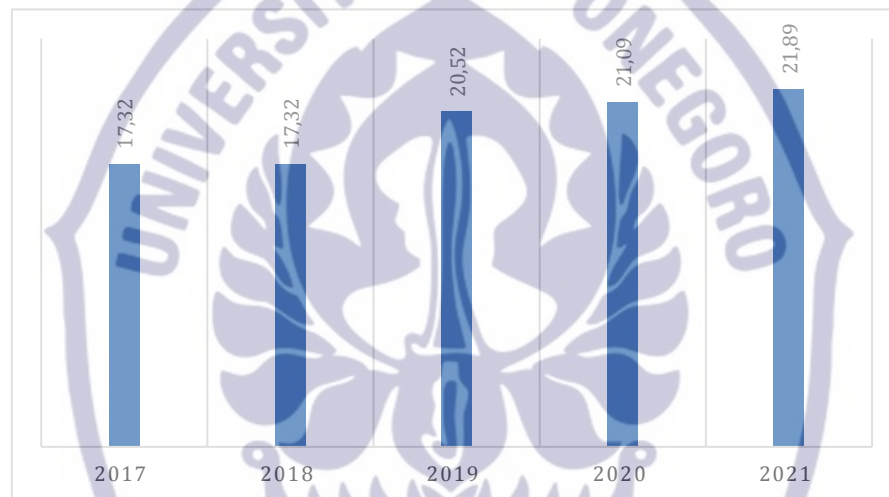
Sumber : BPS, 2021

Tidak hanya itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Indonesia secara garis besar didominasi oleh laki-laki. Pada tahun 2021 terjadi adanya peningkatan TPAK perempuan dari tahun sebelumnya yaitu dari 53,13% menjadi 53,34%. Meskipun terjadi adanya peningkatan, namun tetap TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki di tahun 2021 dengan mencapai 82,27%. Kondisi rendahnya TPAK perempuan menunjukkan akses yang terbatas pada pasar tenaga kerja, sehingga menghambat tercapainya pertumbuhan inklusif.

Selanjutnya pada kaitanya dengan keterwakilan perempuan di parlemen, yang mana dengan partisipasi tersebut tidak hanya dapat berkontribusi pada

keadilan gender pada aspek politik, tetapi juga dapat mempengaruhi adanya kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Kesetaraan gender pada bidang politik masih terbilang rendah, dapat diketahui melalui posisi perempuan di bidang politik masih tersisihkan. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya patriarki yang masih kuat di kalangan masyarakat (Nursyifa et al., 2023).

**Gambar 1.5 Keterwakilan Perempuan di Parlemen Tahun 2017-2021
(persen)**

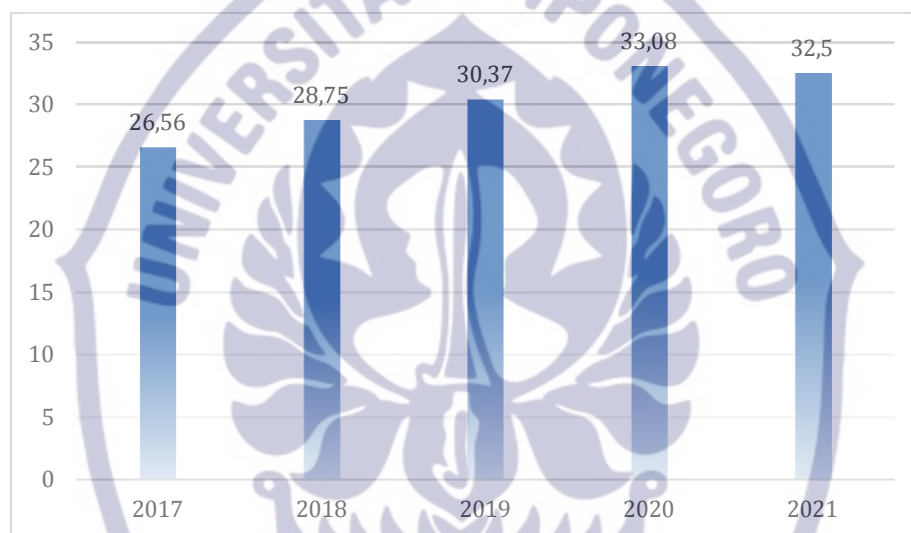


Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan Gambar 1.5 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen pada tiap tahunnya. Pada tahun 2017-2021 keterwakilan perempuan di parlemen terus mengalami peningkatan, pada tahun 2021 mencapai 21,89%. Namun hal ini masih belum memenuhi target nasional yang ada. Sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, bahwa partai politik wajib menyertakan paling sedikit 30% bakal calon legislatif perempuan dalam daftar calon yang diajukan di setiap daerah. Tetapi kenyataannya keterlibatan perempuan di parlemen masih rendah.

Selanjutnya, proporsi perempuan pada posisi manajerial mencakup persentase perempuan yang menduduki jabatan manajerial, di mana sebagai salah satu aspek penting pemberdayaan gender yang dapat mempengaruhi pertumbuhan inklusif. Proporsi perempuan pada posisi manajerial mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

Gambar 1.6 Proporsi Perempuan pada Posisi Manajerial Tahun 2017-2021 (persen)



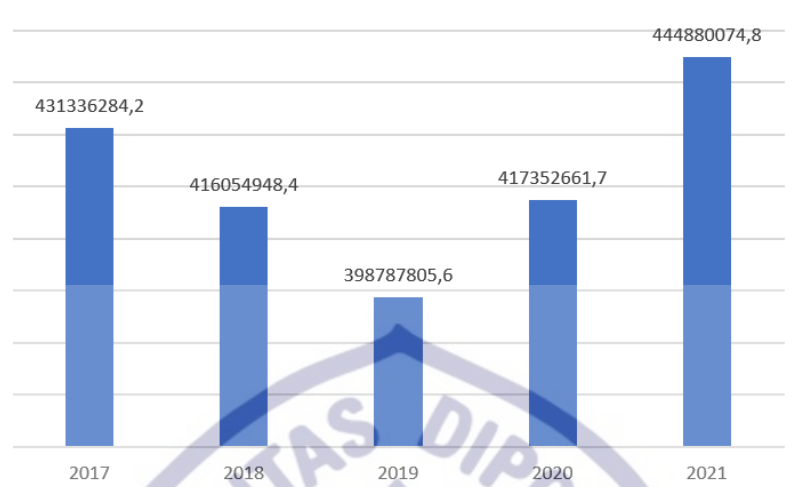
Sumber : BPS, 2021

Pada Gambar 1.6 menunjukkan proporsi perempuan pada posisi manajerial mencakup persentase perempuan yang menduduki jabatan manajerial formal di sektor pemerintahan maupun swasta. Posisi manajerial sebagai salah satu aspek penting dari pemberdayaan gender yang mencerminkan sejauh mana perempuan memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepemimpinan strategis. Proporsi perempuan pada posisi manajerial mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 32,5%, hal ini disebabkan oleh adanya krisis global pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-

19).

Fenomena tersebut memperkuat fakta bahwa ketimpangan gender masih menjadi isu krusial pada pembangunan di Indonesia, meskipun telah diterapkan berbagai kebijakan untuk mendorong keterlibatan maupun partisipasi perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender pada pembangunan, namun tingkat partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan masih tergolong rendah. Menurut Agusalm et al., (2023) pencapaian pertumbuhan inklusif yang berkeadilan gender tidak cukup hanya dilakukan melalui pengurangan ketimpangan gender, tetapi juga memerlukan peran modal eksternal yang mampu memperluas kapasitas ekonomi nasional secara menyeluruh. Adapun salah satu bentuk modal eksternal tersebut adalah investasi asing langsung yang tidak hanya membawa aliran modal fisik, tetapi juga dapat mentransfer teknologi, dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan keterampilan tenaga kerja termasuk perempuan. Oleh karena itu, investasi asing langsung berpotensi untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan serta mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif.

**Gambar 1.7 Investasi Asing Langsung (FDI) Indonesia Tahun 2017-2021
(dalam miliar rupiah)**



Sumber : BPS, 2021

Gambar 1.7 menunjukkan kondisi investasi asing langsung di Indonesia periode 2017-2021 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 hingga 2019 investasi asing langsung mengalami tren penurunan yaitu masing-masing sebesar 3,54% dan 4,15% yang disebabkan oleh tantangan regulasi, ketidakpastian ekonomi, dan tekanan dari kondisi global. Tetapi tahun 2020, investasi asing langsung menunjukkan pemulihan yang mengalami peningkatan sebesar 4,65%, dan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 6,59%, sehingga mencapai Rp444.880.074,8 miliar. Adapun kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan investor asing terhadap perekonomian Indonesia meskipun masih dalam masa pemulihan akibat pandemi Covid-19.

Secara keseluruhan, perkembangan investasi asing langsung pada periode tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia tetap menjadi tujuan potensial bagi investor global. Di mana kehadiran investasi asing langsung tidak hanya sebagai sumber modal, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh kesetaraan

gender dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagian besar fokus pada dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat, tanpa mempertimbangkan dimensi inklusivitas pembangunan secara lebih menyeluruh. Belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis peran keterlibatan perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama pada konteks Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menggunakan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai variabel dependen serta peran keterlibatan perempuan sebagai variabel independen yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, partisipasi tenaga kerja, keterwakilan di parlemen, dan posisi strategis dalam manajerial. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada literatur akademik, tetapi dapat memberikan implikasi kebijakan yang relevan untuk mendorong pembangunan berbasis kesetaraan gender.

Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini dilakukan di 34 provinsi Indonesia pada periode 2015-2021. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan karena pertumbuhan inklusif dan kesetaraan gender belum mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menempatkan penguatan peran perempuan dalam pembangunan sebagai bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, guna mendorong pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya pada tujuan ke-5 (kesetaraan gender) dan ke-8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), dengan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu prioritas utama dalam mendorong pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi inklusif Indonesia yang diukur melalui Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) pada tahun 2017-2019 menunjukkan peningkatan, tetapi tahun 2020 menurun akibat pandemi Covid-19, dan pada tahun 2021 sebagai masa pemulihan ekonomi, sehingga pertumbuhan inklusif Indonesia menunjukkan tren positif. Pertumbuhan inklusif mengalami peningkatan, namun indeks pembangunan gender masih rendah di mana pada tahun 2020-2021 hanya meningkat sebesar 0,22. Pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia sebesar 91,27 (UNDP, 2021). Hal ini terjadi karena manfaat pertumbuhan ekonomi tidak merata, yang tercermin melalui capaian perempuan pada berbagai bidang masih terbatas. Oleh karena itu, menimbulkan ketimpangan gender pada berbagai bidang meliputi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan politik. Menurut McKinley (2010) menyatakan bahwa dengan ketimpangan gender tidak hanya dapat membatasi akses perempuan pada peluang ekonomi, tetapi juga dapat berpotensi mengurangi produktivitas ekonomi nasional mencapai 1-2% per tahunnya.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan gender berdampak bagi rendahnya partisipasi dan kontribusi perempuan pada pembangunan ekonomi, yang akhirnya dapat semakin memperburuk kesenjangan pendapatan dan menurunkan produktivitas ekonomi. Padahal suatu pertumbuhan yang inklusif mensyaratkan adanya pemerataan akses pada peluang ekonomi bagi seluruh masyarakat termasuk perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterlibatan perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan kepemimpinan terhadap

pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia pada periode 2015-2021. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa masalah penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah perempuan (RLSP) terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh angka harapan hidup perempuan (AHHP) terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan (TPAKP) terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh keterwakilan perempuan di parlemen (KPP) terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh proporsi perempuan pada posisi manajerial terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah perempuan terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh angka harapan hidup perempuan terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia

3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi perempuan di parlemen terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh proporsi perempuan yang bekerja di posisi manajerial terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.
6. Untuk menganalisis pengaruh investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta wawasan bagi seluruh pihak. Adapun kegunaan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan analisis yang mendalam terkait keterlibatan perempuan pada berbagai aspek berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.
2. Memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran penting dan kontribusi perempuan pada berbagai aspek sehingga pertumbuhan ekonomi inklusif dapat tercapai.
3. Sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang mendukung inklusif gender. Seperti halnya kebijakan ketenagakerjaan, akses pendidikan bagi perempuan, dan akses kesehatan yang memadai.
4. Sebagai dasar dalam mendukung pencapaian pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tujuan ke-5 yaitu kesetaraan gender dan tujuan ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi serta pekerjaan yang layak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dapat dijabarkan dalam lima bab utama yang disusun secara sistematis sehingga dapat memperoleh gambaran hubungan antara bab satu dengan bab lainnya.

a) BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu pendahuluan menjelaskan mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia serta permasalahan ketimpangan gender dilengkapi dengan data pendukung. Kemudian dari latar belakang terbentuk rumusan masalah yang diajukan serta tujuan dan kegunaan penelitian.

b) Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua tinjauan pustaka menjelaskan mengenai landasan teori terkait teori pertumbuhan endogen, teori pertumbuhan ekonomi inklusif, dan teori modal manusia, dilengkapi dengan penjelasan mengenai hubungan tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, penjelasan mengenai penelitian terdahulu, kemudian terbentuk kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

c) Bab III METODE PENELITIAN

Pada bab tiga metode penelitian terdiri dari jenis, definisi operasional, dan satuan variabel yang digunakan, di mana pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi inklusif. Sedangkan variabel independen meliputi rata-rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, keterlibatan perempuan di parlemen, proporsi perempuan pada

posisi manajerial, dan investasi asing langsung. Selain itu, juga menjelaskan mengenai jenis dan sumber data yang dikumpulkan, model estimasi data panel, dan uji yang akan dilakukan baik itu uji pemilihan model, uji asumsi klasik, dan uji statistik yang digunakan.

d) Bab IV HASIL PENELITIAN

Pada bab empat mencakup hasil dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian yang meliputi data pendukung terkait kondisi pertumbuhan inklusif di Indonesia, kondisi rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan pada posisi manajerial, dan investasi asing langsung di Indonesia. Selain itu, terdapat analisis data yang terdiri dari analisis regresi data panel, pemilihan model regresi, hasil uji asumsi klasik, dan hasil estimasi regresi. Terakhir, pembahasan mengenai pengaruh dari rata-rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan pada posisi manajerial, dan investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

e) Bab V KESIMPULAN

Pada bab lima ini terdiri dari simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh indikator pemberdayaan perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, keterbatasan dalam penelitian, dan saran

dari penulis baik implikasi kebijakan maupun saran yang mendukung untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen dikemukakan oleh Paul Romer (1986) dan Robert Lucas Jr. (1988) sebagai respon terhadap keterbatasan model pertumbuhan neoklasik yaitu model Solow-Swan, yang menganggap bahwa kemajuan teknologi sebagai faktor eksogen. Menurut (Mankiw, 2003) pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat dicapai melalui mekanisme *endogenous* atau sistem yang mengatur proses produksi itu sendiri, tidak pada kekuatan lain diluar sistem. Adapun pada model endogen, kemajuan teknologi sebagai faktor endogen yang berpengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam membangun teori pertumbuhan endogen dapat dirumuskan fungsi produksi sederhana, yaitu sebagai berikut :

$$Y = AK \quad (2.1)$$

Keterangan :

- Y = Output atau Produk Domestik Bruto (PDB)
K = Stok Modal (modal fisik maupun modal manusia)
A = Kemajuan teknologi

Persamaan 2.1 menggambarkan salah satu bentuk paling sederhana dari model pertumbuhan endogen. Di mana tidak menunjukkan adanya hasil yang

semakin menurun (*diminishing marginal return*), tetapi persamaan 2.1 menjelaskan bahwa setiap tambahan kapital, maka akan terus menciptakan tambahan unit output. Oleh karena itu, asumsi dari model endogen yaitu skala hasil pengembalian atas modal konstan (*constant return to scale*) (Mankiw, 2003).

Berdasarkan teori pertumbuhan endogen maka Mankiw (2003) merumuskan suatu persamaan fungsi produksi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut :

$$\Delta Y/Y = \Delta K/K = sA - \delta \quad (2.2)$$

Keterangan :

- A = tingkat kemajuan teknologi
- δ = depresiasi modal fisik
- s = pendapatan yang ditabung dan diinvestasikan

Persamaan 2.2 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output pada ekonomi ditentukan dari investasi (sA) dikurangi dengan depresiasi (δ), di mana selama investasi lebih besar dibandingkan dengan depresiasi ($sA > \delta$) maka ekonomi akan terus tumbuh. Adapun dalam model endogen investasi tidak hanya mencakup modal fisik, tetapi juga modal manusia dan pengetahuan, sehingga menghasilkan eksternalitas positif yaitu inovasi teknologi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Menurut Mankiw (2003) bahwa investasi pada modal manusia dan *R&D* dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta menciptakan teknologi baru, yang dapat menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan. Hal ini mencakup pendidikan yang lebih baik memungkinkan pekerja mengadopsi teknologi canggih,

sedangkan *R&D* dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi seluruh ekonomi. Di sisi lain, Todaro & Smith, (2010) juga menegaskan bahwa investasi pada modal manusia sebagai kunci untuk menciptakan teknologi baru, utamanya di negara berkembang.

Terdapat beberapa model pertumbuhan yang menekankan peran penting modal manusia disertai dengan teknologi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Adapun menurut model Lucas yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang adalah investasi modal manusia pada pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan menurut model Romer yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah peran modal manusia melalui *Research and Development* (R&D) yang dapat menciptakan inovasi baru sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Konsep pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai salah satu teori baru dalam ekonomi pembangunan. Istilah ini mulai dipopulerkan di Asia terutama oleh Asian Development Bank (ADB) sebagai respon terhadap fenomena ekspansi ekonomi yang tinggi, namun disertai dengan peningkatan ketimpangan. Menurut Klasen & Lamanna (2009) pembangunan ekonomi idealnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi dengan ketimpangan yang ada justru dapat menurunkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan inklusif dikembangkan sebagai konsep yang lebih luas dibandingkan dengan pendekatan *Pro Poor Growth*, karena tidak hanya berfokus pada pengetasan kemiskinan, tetapi juga mencakup

pengurangan ketimpangan, penciptaan kesempatan kerja produktif, serta peningkatan akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. (Ali & Son, 2007).

Menurut Cerra et al. (2022) pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan yang tidak hanya diukur melalui PDB, tetapi juga dari distribusi manfaat ekonomi yang dapat menjangkau kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan, mengurangi kesenjangan, dan dapat meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Adapun pertumbuhan ekonomi inklusif memiliki dua pendekatan dasar dalam mencapai inklusivitas yaitu pendekatan proses dan pendekatan hasil (Klasen, 2010). Pada pendekatan proses, pertumbuhan inklusif dapat tercapai melalui pemerataan akses dan kesempatan masyarakat dalam berpartisipasi pada aktivitas ekonomi. Sedangkan pada pendekatan hasil, pertumbuhan inklusif dapat tercapai melalui kesetaraan bagi seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan memperoleh manfaat dari hasil pertumbuhan.

Selain itu, terdapat tiga elemen yang berfungsi sebagai faktor dalam mempengaruhi tercapainya pertumbuhan inklusif yaitu pertama, penguatan kapabilitas modal manusia atau sosial. Kedua, penyediaan kesempatan kerja. Ketiga, penyediaan jaring pengaman sosial dan intervensi yang ditargetkan (I. Ali & Son, 2007). Adapun ketiga faktor tersebut sebagai dasar untuk mencapai kesetaraan pada masyarakat, yang mana merupakan syarat pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan perbaikan kondisi kapabilitas manusia, kesempatan kerja, dan jaring pengaman sosial dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat guna berpartisipasi pada proses ekonomi, baik pada aspek proses maupun aspek hasil. Menurut Ali & Son (2007) prasyarat serta komponen penting dalam mencapai

pertumbuhan ekonomi inklusif terdiri dari faktor perbaikan kapabilitas modal manusia serta pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian, capaian hasil pertumbuhan yang bersifat inklusif yaitu tidak hanya mencakup penguatan tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan pada masyarakat. Adapun terdapat empat hasil dari pertumbuhan ekonomi inklusif yang terdiri dari pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan, inklusif sosial, pemberdayaan yang merata, dan keamanan (I. Ali & Son, 2007). Pertumbuhan ekonomi tetap sebagai syarat penting guna mencapai pertumbuhan inklusif. Tetapi percepatan perolehan pertumbuhan tersebut harus didasarkan pada semakin luas wilayah, sektor, dan kelompok angkatan kerja yang ikut serta berkontribusi pada pertumbuhan. Sedangkan terkait inklusi sosial meliputi adanya insentif yang meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi. Selanjutnya pada peningkatan pemberdayaan, melalui peningkatan aset serta kemampuan individu untuk berpartisipasi pada proses pertumbuhan. Terakhir, keamanan terkait dengan meningkatnya pengelolaan risiko sosial atas intervensi pembangunan.

2.1.3 Teori Modal Manusia

Teori modal manusia dikembangkan oleh Schultz (1961) dan Becker (1962), teori ini menekankan pentingnya modal manusia pada perekonomian. Adapun teori modal manusia sebagai konsep penting pada ekonomi pembangunan yang menekankan investasi pada pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia dapat meningkatkan pendapatan dan produktivitas sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Todaro & Smith, 2010). Berdasarkan konsep ini,

manusia dianggap sebagai modal dengan kualitas dan produktivitasnya dapat ditingkatkan guna menghasilkan pengembalian yang lebih besar dalam bentuk penghasilan di masa yang akan datang. Investasi pada modal manusia dapat dilakukan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan migrasi dengan tujuan agar memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar utama pada modal manusia, di mana memiliki peran ganda sebagai tujuan pembangunan dan sebagai input pertumbuhan ekonomi. Melalui pendidikan maka negara berkembang dapat menyerap teknologi modern serta menciptakan pertumbuhan berkelanjutan, sedangkan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya saling terikat, dengan kesehatan yang lebih baik maka dapat meningkatkan kehadiran di sekolah, selain itu pada pendidikan dapat meningkatkan efektivitas investasi kesehatan (Todaro & Smith, 2010).

Investasi pada modal manusia memiliki pengembalian ekonomi (*return to investment*) yang diukur melalui peningkatan upah, produktivitas, maupun pertumbuhan ekonomi. Investasi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan formal, kesehatan, dan *on-the-job training* (Schultz, 1961). Adapun pendidikan formal sebagai bentuk investasi modal manusia dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Investasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produktif individu, di mana dapat diukur melalui peningkatan upah maupun output ekonomi. Selain itu, investasi sumber daya manusia berperan penting guna mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adapun output suatu negara dipengaruhi oleh faktor modal fisik (*capital*) dan faktor modal manusia (*labor*)

(Todaro & Smith, 2010).

2.1.4 Konsep Gender

Konsep gender pertama kali dikembangkan oleh Anne Oakley dalam bukunya *Sex, Gender and Society* (1972), untuk memahami lebih dalam terkait perbedaan gender dengan jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial. Gender merupakan suatu konsep atau peran dari laki-laki maupun perempuan yang mana tidak terikat oleh adanya perbedaan biologis tetapi pada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik (Connell, 2009). Kesenjangan gender (*Gender Equality*) merupakan kondisi laki-laki dan perempuan memiliki hak, peluang, dan akses yang setara pada berbagai aspek kehidupan meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Kesenjangan gender tidak hanya mencakup pada status yang sama, tetapi juga menghapus adanya diskriminasi maupun ketimpangan struktural yang dapat menghambat akses pada peluang dan sumber daya.

Sedangkan, ketimpangan gender (*Gender Inequality*) merupakan perbedaan kesempatan yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan pada kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan aset. Dengan adanya ketimpangan gender dapat menyebabkan adanya perbedaan pencapaian yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender ini berawal dari adanya budaya patriarki yang ada di masyarakat dengan lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan (Wisnujati, 2020). Sehingga perempuan akan sulit untuk lebih berkembang dan menyebabkan tertinggal dari laki-laki. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya ketimpangan gender yaitu pertama, adanya budaya patriarki yang masih kental di masyarakat. Kedua, pada aspek ekonomi adanya kapitalisme

global yang terjadi dan mengeksploitasi perempuan. Ketiga, aspek politik yang belum sepenuhnya memihak pada perempuan (Hermanto, 2017).

Dalam mengatasi masalah ketimpangan gender dapat merujuk pada instruksi presiden No 9 Tahun 2000 terkait Pengarusutamaan Gender (PuG) dalam pembangunan nasional, yang mana peraturan ini dibuat karena peran dan kontribusi dari perempuan Indonesia yang besar dan memberikan kesejahteraan baik pada keluarga maupun pembangunan masyarakat (Yuslin, 2021). Pengarusutamaan Gender (PuG) sebagai suatu strategi untuk mencapai keadilan pada kesetaraan gender dengan berbagai kebijakan yang mengutamakan kebutuhan dari masing-masing gender, aspirasi, dan mengevaluasi kehidupan pembangunan (Kemenkeu, 2022). Dengan itu PuG memastikan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan akses dan peluang yang sama dalam pembangunan.

Keberhasilan dari strategi PuG dapat diukur dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Yuslin, 2021). Adapun terdapat perbedaan capaian aspek, adapun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan pada kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Adapun peran aktif perempuan dapat tercermin melalui keterlibatan perempuan yang didefinisikan sebagai partisipasi aktif dan bermakna perempuan pada berbagai aspek kehidupan meliputi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Hal ini mencakup keterlibatan perempuan pada pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan peluang

kerja. Selain itu, keterlibatan perempuan juga mencerminkan kemampuan mereka untuk memiliki suara, pengaruh, dan kontribusi yang setara dalam membentuk suatu kebijakan, pembangunan, dan dinamika sosial, dengan tujuan mencapai kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Sedangkan IPG melihat capaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak.

2.1.5 Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan (RLSP)

Todaro & Smith (2020) menyatakan perbedaan antara modal manusia dan sumber daya manusia, modal manusia mencakup pada keterampilan, kesehatan, kecakapan, cita-cita, dsb. Sedangkan sumber daya manusia mencakup kualitas dan kuantitas dari angkatan kerja pada suatu wilayah ataupun negara. Pendidikan sebagai salah satu bagian dari investasi utama modal manusia dan sebagai bagian dari kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Investasi pada bidang pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung investasi pendidikan itu berperan penting bagi negara-negara berpenghasilan rendah, melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja dan mendukung inovasi (Schultz, 1961).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh perempuan guna menempuh pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah perempuan dijadikan sebagai indikator dalam mengukur tingkat pendidikan perempuan serta kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan

yang lebih lama bagi perempuan tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan, tetapi dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

2.1.6 Angka Harapan Hidup Perempuan (AHHP)

Kesehatan merupakan salah satu komponen utama pada modal manusia yang memiliki peran penting pada pembangunan ekonomi (Todaro & Smith, 2010). Kesehatan dalam hal ini merujuk pada kondisi fisik dan mental individu dalam bekerja secara produktif dan dapat berkontribusi pada perekonomian. Di mana kesehatan tidak hanya sebagai tujuan pembangunan, tetapi juga sebagai input yang berperan penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Adapun pembangunan pada bidang kesehatan bertujuan agar setiap individu dapat menciptakan kesehatan yang lebih tinggi meliputi peningkatan kemampuan, kemauan, dan kesadaran dalam hidup sehat.

Angka harapan hidup sebagai indikator untuk menilai hasil kinerja kesehatan dari pemerintah. Adapun harapan hidup mencakup jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada individu atas kematian di masa yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) angka harapan hidup sebagai indikator pada bidang kesehatan dengan didasarkan pada dimensi gizi dan kalori, lingkungan, dan berbagai hal pendukung lainnya.

2.1.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan merupakan persentase perempuan usia produktif yang aktif pada angkatan kerja (Simanjuntak, 1985). Selain itu, BPS (2021) mendefinisikan TPAK perempuan sebagai persentase

jumlah penduduk perempuan usia kerja yang termasuk pada angkatan kerja, meliputi bekerja maupun yang sedang mencari kerja. Adapun angkatan kerja sebagai bagian dari salah satu modal yang dimiliki setiap negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Kualitas angkatan kerja didukung dengan pendidikan yang dapat mendukung produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi tingkat TPAK perempuan, maka semakin besar pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat pada proses produksi barang dan jasa (BPS, 2018).

Menurut Simanjuntak (1985) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat TPAK perempuan, yaitu sebagai berikut :

a. Tingkat pendidikan

Pendidikan perempuan sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat TPAK perempuan. Perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi pada angkatan kerja. Hal tersebut terjadi karena perempuan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

b. Akses ke Pasar Kerja dan Diskriminasi

Salah satu hambatan bagi TPAK perempuan adalah akses ke pasar tenaga kerja yang terbatas dan adanya diskriminasi gender di tempat kerja, di mana perempuan sering menghadapi diskriminasi pada jenis pekerjaan dan upah, sehingga hal tersebut menyebabkan perempuan mengurangi insentif untuk bekerja.

c. Kondisi Ekonomi Keluarga

Kondisi ekonomi keluarga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi

keputusan perempuan untuk bekerja. Keluarga dengan penghasilan rendah, memungkinkan perempuan lebih terdorong untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Sedangkan keluarga dengan penghasilan tinggi, perempuan lebih memilih untuk tidak bekerja karena tekanan ekonomi lebih rendah.

d. Norma Budaya dan Sosial

Norma budaya dan sosial memainkan peran penting dalam menentukan tingkat TPAK perempuan. Partisipasi perempuan yang rendah pada angkatan kerja terjadi karena norma budaya yang masih kental dalam masyarakat dengan menganggap bahwa perempuan harus fokus pada peran domestik.

2.1.8 Keterwakilan Perempuan di Parlemen (KPP)

Keterwakilan perempuan di parlemen merupakan keikutsertaan perempuan pada kehidupan politik melalui lembaga legislatif. Keterwakilan perempuan di parlemen dan partisipasi politik perempuan merupakan hal penting dalam memastikan hadirnya kebijakan-kebijakan yang mendukung, memberdayakan, dan memfasilitasi kebutuhan perempuan pada berbagai bidang. Selain itu, sebagai elemen penting dalam mewujudkan representasi yang berimbang serta demokrasi yang adil. Menurut Cabeza-García et al. (2018) partisipasi perempuan di parlemen menunjukkan persentase kursi parlemen pada majelis yang diduduki oleh perempuan. Adapun kebijakan afirmatif melalui UU No. 7 Tahun 2017 yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif. Adanya kuota tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi perempuan dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan perempuan (Nursyifa et al., 2023).

Dengan proporsi keterwakilan perempuan yang lebih tinggi di parlemen dapat mengadopsi kebijakan baru pada pembangunan ekonomi sosial serta pemberdayaan perempuan (Cabeza-García et al., 2018). Kebijakan tersebut meliputi adanya penetapan kuota gender, pengalihan distribusi kekayaan, dan penghapusan diskriminasi pada perempuan. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan pada parlemen sebagai salah satu faktor penting untuk mencapai kesetaraan gender di lingkup politik (Nursyifa et al., 2023).

2.1.9 Proporsi Perempuan pada Posisi Manajerial (PPM)

Proporsi perempuan pada posisi manajerial sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesetaraan gender. Dengan menggambarkan sejauh mana perempuan memiliki kesempatan untuk memimpin dan mempengaruhi arah organisasi. Keterwakilan ini tidak hanya mencerminkan pencapaian individu, tetapi dapat menunjukkan kondisi sosial dan kelembagaan yang mampu mendukung maupun menghambat kesetaraan pada dunia kerja. Proporsi perempuan pada posisi manajerial menunjukkan bahwa perempuan berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan kepemimpinan yang sama pada tingkat pengambilan keputusan dalam pekerjaan (Brek Karama, 2023). Adapun posisi perempuan pada manajerial ini merujuk pada jabatan-jabatan kepemimpinan di tempat kerja baik di sektor publik maupun sektor swasta.

Dengan tingginya proporsi perempuan pada posisi manajerial sebagai indikator yang menunjukkan bahwa suatu negara telah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang setara dan inklusif serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk dapat berkontribusi maksimal dalam pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, peningkatan proporsi perempuan pada kepemimpinan diharapkan mampu menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil, menurunkan kesenjangan gender di dunia kerja, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif.

2.1.10 Investasi Asing Langsung (FDI)

Investasi asing langsung merupakan salah satu bentuk aliran modal internasional yang masuk ke suatu negara, di mana investor asing memiliki kendali terhadap pengelolaan perusahaan di negara penerima. Pada konteks pembangunan ekonomi, investasi asing langsung memainkan peran penting dalam memperluas kapasitas produksi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang (Adams, 2009). Berbeda dengan model pertumbuhan neoklasik Solow-Swan yang berfokus pada akumulasi modal dan tenaga kerja, teori pertumbuhan endogen menyoroti pentingnya investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D), transfer teknologi, serta pembelajaran sebagai pendorong utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2003). Investasi asing langsung tidak hanya memberikan kontribusi melalui peningkatan modal fisik, tetapi juga melalui transfer teknologi, manajemen, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurut Todaro & Smith (2010) investasi asing langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jika negara penerima memiliki tingkat kapabilitas sumber daya manusia yang memadai untuk menyerap teknologi yang dibawa oleh investor asing. Adapun investasi asing langsung sebagai salah satu instrumen utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu melalui peningkatan produktivitas dan keterbukaan ekonomi.

Jika investasi asing langsung difokuskan ke sektor-sektor strategis, maka

hal ini tidak hanya memperkuat struktur ekonomi domestik tetapi juga dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas. Sehingga peran investasi asing langsung tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi dapat mendukung pengurangan kesenjangan sosial maupun ekonomi.

Investasi asing langsung (FDI) sebagai variabel independen dalam penelitian ini didasarkan pada peran strategis investasi asing langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aliran modal, transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta akses terhadap pasar global. Berbeda dengan investasi domestik (PMTB) yang cenderung stabil dan sudah menjadi bagian penting dari perekonomian nasional, investasi asing langsung bersifat lebih fluktuatif dan dinamis sehingga mampu menunjukkan variasi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada periode penelitian 2015–2021.

Selain itu, investasi asing langsung berpotensi meningkatkan kesempatan kerja yang lebih luas, termasuk bagi perempuan, serta mendorong perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan yang relevan dengan indikator pertumbuhan inklusif. Dengan demikian, penggunaan investasi asing langsung tidak hanya memperlihatkan bagaimana keterbukaan ekonomi Indonesia berkontribusi terhadap pertumbuhan inklusif, tetapi juga memberikan kebaruan dibanding penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggunakan variabel investasi domestik sebagai indikator utama.

2.2 Hubungan Variabel Independen dengan Variabel Dependen

2.2.1 Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan dengan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan merupakan indikator dalam mengukur tingkat pendidikan perempuan, yang memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan inklusif. Adapun RLS perempuan yang tinggi menunjukkan akses yang lebih baik pada pendidikan di mana memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan daya saing perempuan. Hal tersebut didasarkan pada teori modal manusia yang menekankan bahwa pendidikan sebagai investasi pada modal manusia yang dapat meningkatkan produktivitas perempuan serta kontribusinya pada perekonomian yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perempuan dengan pendidikan lebih tinggi, semakin mendukung adanya pemerataan peluang.

Hubungan positif tersebut dibuktikan penelitian dari Cabeza-García et al. (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan perempuan yang tinggi sebagai wujud peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Melalui peningkatan pendidikan perempuan yang diukur melalui RLS perempuan dapat menghasilkan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, sepanjang perempuan dapat mewakili adanya peningkatan tenaga kerja yang berkualitas. Hal tersebut didukung juga melalui penelitian dari Hong et al. (2019) yang menekankan bahwa dengan memberikan kesempatan pendidikan bagi perempuan sebagai langkah yang efektif untuk mempromosikan pertumbuhan inklusif baik di negara berkembang maupun negara maju. Penelitian dari Hamid (2023) menunjukkan

bahwa peningkatan pendidikan perempuan, maka dapat meningkatkan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif secara proporsional.

2.2.2 Hubungan Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan dengan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Angka harapan hidup (AHH) perempuan sebagai indikator dalam mengukur tingkat kesehatan dan kesejahteraan perempuan, yang memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal tersebut didasarkan pada teori modal manusia, di mana kesehatan sebagai salah satu elemen penting dari pertumbuhan ekonomi. Dengan melakukan investasi kesehatan bagi perempuan maka dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberikan efek berganda pada perekonomian yaitu peningkatan pendapatan keluarga dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Hal tersebut terjadi karena perempuan yang sehat cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi, sehingga dapat mendukung stabilitas ekonomi keluarga dan masyarakat (Todaro & Smith, 2010).

Hubungan positif tersebut didukung penelitian dari Lawanson & Umar, (2019) menyatakan bahwa angka harapan hidup (AHH) perempuan memiliki hubungan kausal dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan kondisi kesehatan perempuan yang baik tercermin melalui tingginya AHH perempuan, maka dapat memberikan dampak pada peningkatan produktivitas, partisipasi, dan pemberdayaan perempuan yang mana sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi inklusif.

2.2.3 Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan dengan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan sebagai indikator dalam mengukur proporsi perempuan usia produktif yang aktif bekerja maupun sedang mencari kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Adapun TPAK perempuan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa akses yang luas terhadap sumber daya ekonomi, pekerjaan, dan pendapatan akan semakin memperkuat pemberdayaan perempuan, sehingga dapat mendukung pemerataan peluang ekonomi.

Hal ini dibuktikan melalui penelitian dari Cabeza-García et al. (2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi partisipasi angkatan kerja perempuan berpengaruh terhadap pertumbuhan inklusif. Dengan semakin tinggi akses perempuan pada tenaga kerja tidak hanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat merangsang adanya kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia. Selanjutnya, didukung penelitian dari Klasen & Lamanna (2009) yang menyatakan bahwa bidang ketenagakerjaan perempuan lebih berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.4 Hubungan Keterwakilan Perempuan di Parlemen (KPP) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Keterwakilan perempuan di parlemen memainkan peran krusial dalam membentuk pembangunan yang berkelanjutan. Adapun keterwakilan perempuan

di parlemen mencerminkan tingkat representasi perempuan pada pengambilan keputusan legislatif. Partisipasi perempuan di parlemen berpengaruh positif terhadap pertumbuhan inklusif. Semakin tinggi representasi perempuan di parlemen maka dapat mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap gender seperti anggaran untuk pendidikan dan kesehatan perempuan, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Hal tersebut sebagai kunci utama peningkatan pertumbuhan inklusif. Adanya partisipasi perempuan pada lembaga parlemen dapat memperkuat kelembagaan yang semakin responsif terhadap gender, seperti kebijakan inklusif gender dan anti diskriminasi.

Hubungan tersebut didukung melalui penelitian dari Cabeza-García et al. (2018) menyatakan bahwa hubungan positif antara partisipasi perempuan pada parlemen dan pertumbuhan inklusif ditunjukkan melalui proporsi perempuan yang lebih besar pada kekuasaan legislatif, maka akan menunjang perumusan kebijakan baru dalam pembangunan ekonomi sosial termasuk memberdayakan perempuan. Adapun kebijakannya mencakup penetapan kuota gender, pengalihan distribusi kekayaan, dan penghapusan diskriminasi pada perempuan.

2.2.5 Hubungan Proporsi Perempuan pada Posisi Manajerial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Peningkatan partisipasi perempuan pada pembangunan ekonomi merupakan kunci dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan berkeadilan. Kehadiran perempuan pada level kepemimpinan tidak hanya mencerminkan kemajuan menuju kesetaraan gender, tetapi juga memiliki dampak positif dengan

pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan perempuan dapat mendorong distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata dan memperkuat akses serta peluang pada pembangunan ekonomi. Dengan partisipasi perempuan pada posisi manajerial akan membawa perspektif, keterampilan, dan kepemimpinan yang beragam, sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta mendorong kebijakan yang lebih inklusif. Adanya keberagaman perempuan pada level manajerial dapat berkontribusi pada pengurangan kesenjangan gender, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga yang mana sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi inklusif.

Penelitian oleh Cabeza-García et al. (2018) menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Kehadiran perempuan pada posisi manajerial tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, yang mana hal tersebut sebagai salah satu inti dari pembangunan inklusif.

2.2.6 Hubungan Investasi Asing Langsung (FDI) dengan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Investasi asing langsung sebagai salah satu bentuk investasi yang masuk ke dalam suatu negara guna membangun dan mengembangkan perusahaan. Adapun pada umumnya investasi asing langsung tidak hanya mencerminkan modal, namun juga teknologi, akses ke pasar global, dan manajemen modern. Pada konteks pembangunan ekonomi, investasi asing langsung dianggap sebagai salah satu pendorong pertumbuhan, karena dapat meningkatkan produktivitas dan

menciptakan lapangan kerja baru. Sedangkan, pada konteks pertumbuhan ekonomi inklusif, dampak dari investasi asing langsung tidak hanya diukur dari peningkatan PDB, tetapi juga dari sejauh mana investasi asing langsung dapat memperluas akses serta manfaat ekonomi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan seperti perempuan.

Berdasarkan teori pertumbuhan endogen, pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat didorong oleh faktor internal suatu negara, meliputi akumulasi modal, pengembangan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia. Investasi asing langsung berperan penting guna memberikan akses terhadap teknologi baru dan memperkuat kapasitas produksi dalam negeri. Oleh karena itu, investasi asing langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui beberapa peran yaitu menciptakan lapangan kerja pada sektor padat karya seperti manufaktur atau jasa dan mendorong keterlibatan UMKM lokal.

Menurut Lawanson & Umar (2019) investasi asing langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Investasi asing langsung tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara agregat, namun juga berpotensi besar guna menciptakan pertumbuhan yang merata, apabila diarahkan pada sektor-sektor strategis dan mendukung inklusivitas. Temuan tersebut diperkuat oleh Hamid (2023) bahwa investasi asing langsung berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang mana tidak hanya untuk meningkatkan output, tetapi menciptakan pemerataan yang adil.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian pustaka yang digunakan sebagai

acuan dan pembandingan dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memberikan gambaran mengenai pengaruh indikator pemberdayaan gender terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu sebagai berikut :

Cabeza-García et al. (2018) mengkaji terkait pengaruh faktor gender terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi makro ekonomi, dengan berfokus pada dimensi pendidikan perempuan, partisipasi perempuan pada angkatan kerja, tingkat fertilitas, dan partisipasi perempuan pada politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang akses yang luas pada pendidikan dan tenaga kerja perempuan akan memberikan dampak positif. Terjadi adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan pada aspek pendidikan maupun tenaga kerja.

Hasil temuan tersebut didukung oleh Hong et al. (2019) dengan mengkaji efek kausal dari peningkatan pendidikan perempuan terhadap beberapa indikator pertumbuhan inklusif dan juga membandingkan terhadap indikator pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan peningkatan akses perempuan pada pendidikan memiliki efek kausal bagi peningkatan indikator pertumbuhan inklusif, seperti halnya kesehatan, pembangunan manusia, pengurangan angka kemiskinan, dan peningkatan kualitas lingkungan.

Selain itu, Lawanson & Umar (2019) mengkaji terkait dampak dari kesenjangan gender pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan inklusif di Nigeria. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ketimpangan gender pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan inklusif baik di jangka pendek maupun jangka panjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya ketimpangan gender

yang terjadi di Nigeria menghambat tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif. Sehingga dengan itu, penelitian ini menekankan bahwasanya di Nigeria pertumbuhan inklusif tidak akan tercapai tanpa adanya kesetaraan gender.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Klasen & Lamanna (2009) menunjukkan bahwa pengaruh kesenjangan gender pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin rendah, di mana efeknya lebih besar dirasakan di wilayah dengan tingkat kesenjangan gender yang tinggi seperti Asia Selatan. Kesenjangan yang terjadi pada pendidikan dapat mengurangi modal manusia dan eksternalitas positif. Sedangkan pada ketenagakerjaan kesenjangan dapat menyebabkan adanya peningkatan fertilitas, membatasi bakat yang dimiliki, dan menghambat daya saing di tingkat internasional.

Hamid (2023) mengkaji terkait dengan peran penting pendidikan perempuan sebagai salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Asia Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan perempuan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan inklusif melalui peningkatan partisipasi angkatan kerja, pengurangan angka kelahiran, dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Di mana pendidikan perempuan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial.

Shahzad et al. (2021) menganalisis peran pemberdayaan perempuan pada dimensi ekonomi, sosial, dan politik serta mengidentifikasi dampak yang timbul terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada berbagai negara dengan kategori pendapatan baik itu negara berkembang maupun negara maju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perbedaan hasil antara negara berkembang dan negara

maju, adapun pada negara berkembang Asia seperti Bangladesh dan Pakistan pemberdayaan politik dan sosial memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Sedangkan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang yang memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pemberdayaan ekonomi. Sehingga penelitian ini menekankan pentingnya investasi kesehatan dan pendidikan bagi perempuan dan meningkatkan representasi politik perempuan untuk mencapai inklusivitas yang pada akhirnya dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi.

Dahlum et al. (2022) mengkaji terkait hubungan pemberdayaan politik perempuan dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemberdayaan politik perempuan secara signifikan meningkatkan pertumbuhan PDB yang lebih tinggi. Pemberdayaan politik perempuan tidak hanya untuk keadilan gender, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan inovasi dan efisiensi kebijakan. Oleh karena itu, membuktikan bahwa inklusi gender pada politik sebagai alat pembangunan ekonomi.

Brek (2023) menganalisis terkait peran kepemimpinan perempuan terhadap pembangunan sosial ekonomi pemerintah daerah di wilayah Kenya. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan sosial ekonomi. Dengan kepemimpinan perempuan maka dapat meningkatkan inovasi, meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan tata kelola yang lebih baik.

Ashraf et al. (2024) mengkaji hubungan antara indikator SDGS terhadap

pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan sampel 52 negara pada periode 2000-2023 dengan dua model yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi pada pengeluaran kesehatan dan pendidikan serta pengurangan kemiskinan pekerja sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan. Sedangkan anak stunting dan persentase perempuan di parlemen tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Az-zahro (2024) mengkaji terkait peran perempuan pada pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan metode penelitian *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil temuan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena adanya faktor penghambat bagi perempuan untuk berkembang di dunia kerja, selain itu juga adanya beban kerja ganda. Sementara itu, yang berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah angka harapan hidup perempuan, dengan semakin rendahnya ketimpangan gender pada bidang kesehatan menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat.

FEB UNDIP

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1.	Gender Factor and Inclusive Growth : The Silent Revolution (Cabeza-García et al., 2018)	Variabel dependen : PDB Variabel independen : 1. Pendidikan 2. Tenaga kerja perempuan 3. Fertilitas 4. Demokrasi Variabel kontrol : 1. Total angkatan kerja usia 15 tahun ke atas 2. Krisis ekonomi 3. Negara berpenghasilan rendah 4. Pengeluaran penelitian dan pengembangan	Analisis data panel dinamis dengan pendekatan <i>Generalized Method of Moments</i> (GMM) dengan menggunakan data 127 negara tahun 2000-2014	1. Faktor gender berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif 2. Pendidikan perempuan berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 3. Partisipasi perempuan pada tenaga kerja berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 4. Tingkat fertilitas berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 5. Partisipasi perempuan pada politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
2.	Female Education Externality and Growth (Hong et al., 2019)	Variabel dependen : PDB per kapita Variabel independen : 1. Rata-rata lama sekolah	OLS (<i>Ordinary Least Square</i>) dan IV (<i>Instrumental Variables</i>)	1. Pendidikan perempuan menghasilkan eksternalitas positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif 2. Meningkatkan pendidikan perempuan dan mengurangi ketimpangan pendidikan gender berpengaruh signifikan terhadap

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
		perempuan 2. Rata-rata lama sekolah laki-laki 3. Rasio tahun sekolah perempuan terhadap laki-laki Variabel kontrol : 1. Agama 2. Modal per kapita 3. Modal tetap per kapita		pertumbuhan ekonomi inklusif
3.	Gender Inequality and its Implication for Inclusive Growth in Nigeria from 1980 to 2018 (Lawanson & Umar, 2019)	Variabel dependen : Pertumbuhan inklusif Variabel independen : 1. Kesenjangan pada pendaftaran sekolah menengah 2. Kesenjangan pada	ARDL (<i>Autoregressive Distributed Lag</i>)	1. Pada jangka pendek dan jangka panjang ketimpangan gender bidang pendidikan dan ketenagakerjaan menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif 2. Angka harapan hidup secara signifikan mendukung tercapainya pertumbuhan inklusif 3. Mengurangi ketimpangan dapat meningkatkan pendapatan perkapita, distribusi pendapatan, dan inklusivitas

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
		pendaftaran sekolah menengah atas		
		3. Kesenjangan pada lapangan kerja		
		4. Angka harapan hidup laki-laki		
		5. Angka harapan hidup perempuan		
		6. Investasi asing langsung		
		7. Pembentukan modal		
		8. Keterbukaan perdagangan		
4.	Impact of Women's Education on Inclusive Growth : Insights from South Asia (Hamid, 2023)	Variabel dependen : Indeks Pertumbuhan inklusif Variabel independen : 1. Indeks pendidikan perempuan 2. Pertumbuhan populasi 3. FDI	Metode analisis panel data dengan model <i>Fixed Effect Model (FEM)</i> dan <i>Random Effect Model (REM)</i>	1. Indeks pendidikan perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif 2. Tingkat pertumbuhan populasi berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif 3. FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
		4. Inflasi 5. Ketentuan perdagangan		
5.	The Impact of Gender Inequality in Education and Employment on the Middle East and North Africa (Klasen & Lamanna, 2009)	Variabel dependen : Pertumbuhan ekonomi Variabel independen : 1. Investasi 2. Pertumbuhan populasi 3. Pertumbuhan pendidikan laki-laki 4. Rasio pendidikan perempuan terhadap laki-laki 5. Rasio pertumbuhan pendidikan 6. Pertumbuhan angkatan kerja 7. Keterbukaan ekonomi 8. Keterlibatan perempuan pada angkatan kerja	Metode analisis panel data OLS (<i>Ordinary Least Square</i>) dengan model <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	1. Peningkatan rasio pendidikan perempuan dan laki-laki berpengaruh positif meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatkan partisipasi perempuan pada ketenagakerjaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
6.	The Socio Economics and Political Role of Women's Empowerment Towards Inclusive Growth : Comparative and Regional Analysis (A. Ali et al., 2021)	Variabel dependen : Indeks pertumbuhan inklusif Variabel independen : 1. Pemberdayaan ekonomi perempuan 2. Pemberdayaan sosial perempuan 3. Pemberdayaan politik sosial	Metode regresi panel data dari 25 negara pada periode 1996-2016	1. Pada negara berkembang pemberdayaan sosial perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif 2. Pemberdayaan ekonomi perempuan berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif 3. Pemberdayaan politik perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif
7.	Women's Political Empowerment and Economic Growth (Dahlum et al., 2022)	Variabel dependen : PDB Variabel independen : Pemberdayaan politik perempuan Variabel kontrol : 1. Tingkat demokrasi 2. Investasi modal fisik dan manusia 3. Populasi	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	1. Pemberdayaan politik perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Pemberdayaan politik perempuan tidak hanya pengaruh pada kesetaraan, tetapi sebagai strategi guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif
8.	Female Leadership and Social-Economic	Variabel dependen : Pembangunan ekonomi	Regresi linear	1. Kepemimpinan perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
	Development in Country Governments in Arid and Semi-Arid Lands Kenya (Brek Karama, 2023)	sosial Variabel independen : Kepemimpinan perempuan		sosial ekonomi 2. Kepemimpinan perempuan meningkatkan inovasi, tata kelola yang baik, dan partisipasi angkatan kerja
9.	People Category of UN SDGs 2030 and Sustainable Economic Growth in Asia and The Pacific Regional (Ashraf et al., 2024)	Variabel dependen : 1. PDB per kapita 2. PDB hijau per kapita Variabel independen : 1. Tingkat kemiskinan pekerja 2. Anak stunting per kapita 3. Pengeluaran kesehatan per kapita 4. Pengeluaran pendidikan per kapita 5. Persentase perempuan di parlemen Variabel kontrol : FDI per kapita	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM) dan <i>Random Effect Model</i> (REM) pada periode 2000-2023 dengan dari 52 negara di wilayah Asia dan Pasifik	1. Tingkat kemiskinan pekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Anak stunting per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 3. Pengeluaran kesehatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 4. Pengeluaran pendidikan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 5. Persentase perempuan di parlemen tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 6. FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
10	Analisis Pengaruh Peranan Perempuan dalam Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Az-zahro, 2024)	Variabel dependen : Pertumbuhan ekonomi Variabel independen : 1. TPAK perempuan 2. RLS perempuan 3. AHH perempuan 4. Indeks pemberdayaan gender 5. Indeks ketimpangan gender	<i>Random Effect Model (REM)</i>	1. TPAK perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Rata-rata lama sekolah perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 3. Angka harapan hidup perempuan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 4. Indeks pemberdayaan gender dan indeks ketimpangan gender tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi



2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga pada distribusi manfaat ekonomi yang merata, menciptakan pemerataan akses dan peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil, peningkatan kesejahteraan, dan mengurangi ketimpangan antar kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal seperti perempuan (Ali & Son, 2007). Konsep ini menekankan distribusi manfaat ekonomi yang merata, sehingga pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Kesetaraan gender sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Ketika perempuan memperoleh akses yang setara pada pendidikan, kesehatan, pasar tenaga kerja, dan pengambilan keputusan politik, maka kontribusinya pada perekonomian akan meningkat. Oleh karena itu, kesetaraan gender tidak hanya sebagai isu keadilan sosial, tetapi sebagai strategi pembangunan ekonomi yang lebih efektif. Di Indonesia, strategi ini relevan guna mengatasi rendahnya partisipasi perempuan pada sektor ekonomi dan politik, serta mendorong peningkatan produktivitas nasional.

Kerangka pemikiran ini mengacu pada teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Paul Romer (1986) dan Robert Lucas Jr. (1988) yang menekankan pertumbuhan ekonomi didorong oleh faktor internal meliputi modal manusia dan inovasi (Mankiw, 2003). Selain itu, teori tersebut diperkuat oleh teori modal manusia yang dikembangkan oleh Becker (1964) yang menekankan

pentingnya investasi sumber daya manusia pada pendidikan, kesehatan, dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas dan dapat berkontribusi pada perekonomian.

Adapun pada konteks kesetaraan gender, investasi pada perempuan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan tidak hanya memperkuat kapasitas individu perempuan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif pada angkatan kerja, kepemimpinan, dan pengambilan kebijakan. Sehingga dapat menghasilkan eksternalitas positif seperti inovasi, distribusi pendapatan, dan peningkatan efisiensi ekonomi (Klasen & Lamanna, 2009). Sementara itu, dengan masuknya investasi asing langsung diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan transfer teknologi yang mendukung produktivitas serta memperluas kesempatan kerja bagi perempuan.

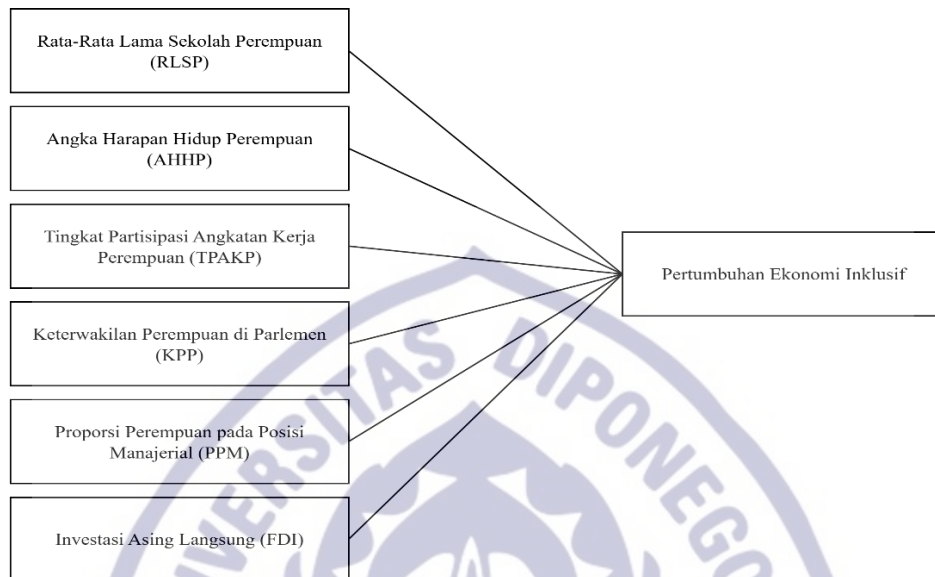
Berdasarkan kerangka penelitian ini variabel-variabel independen yang digunakan antara lain angka harapan hidup (AHH) perempuan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif (Lawanson & Umar, 2019). Perempuan yang memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik dan memiliki usia harapan hidup yang tinggi, maka dapat meningkatkan produktivitas dalam aktivitas ekonomi. Dalam jangka panjang hal ini dapat berdampak positif tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan partisipasi yang merata. Kedua, rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Cabeza-García et al. (2018) menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran sentral dalam meningkatkan partisipasi ekonomi,

kesetaraan gender, dan pemberdayaan sosial, yang mana hal tersebut sebagai elemen penting dalam menciptakan pertumbuhan inklusif.

Ketiga, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Klasen & Lamanna (2009) menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja menunjukkan partisipasi ekonomi yang lebih besar dan dapat meningkatkan distribusi manfaat ekonomi. Keempat, keterwakilan perempuan di parlemen (KPP) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penguatan pengambilan keputusan yang responsif terhadap gender (Cabeza-García et al., 2018). Serta dengan representasi perempuan di parlemen dapat mendorong redistribusi sumber daya yang lebih adil. Kelima, proporsi perempuan pada posisi manajerial (PPM) sebagai proksi yang digunakan dalam mengukur keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Adapun proporsi perempuan pada posisi manajerial berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, di mana dengan tingginya kepemimpinan perempuan dapat meningkatkan efisiensi organisasi, inovasi, dan keputusan yang lebih inklusif.

Oleh karena itu, peningkatan pembangunan gender melalui enam indikator tersebut tidak hanya memperkuat peran perempuan pada perekonomian, tetapi juga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan mengintegrasikan kesetaraan gender pada strategi pembangunan, sebagai faktor utama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi sosial dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Rata-rata lama sekolah perempuan diduga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia
2. Angka harapan hidup perempuan diduga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia
3. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan diduga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia
4. Partisipasi perempuan di parlemen diduga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia
5. Proporsi perempuan pada posisi manajerial diduga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia

6. Investasi asing langsung diduga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan konsep yang dapat memiliki nilai yang bervariasi maupun berbeda (Gujarati & Porter, 2009). Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini akan dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini, terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas).

A. Variabel Dependen (terikat)

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel independen (bebas). Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi inklusif. Variabel tersebut menggambarkan pertumbuhan yang menciptakan peluang ekonomi, pemerataan akses, dan memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk dapat berkontribusi pada perekonomian (Ali & Son, 2007). Variabel pertumbuhan ekonomi inklusif diukur dengan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif (IPEI) dengan satuan indeks.

B. Variabel Independen

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang setiap mengalami perubahan kondisi ataupun nilainya dapat mempengaruhi kondisi variabel

dependennya (Sekaran, 2014) Variabel independen pada penelitian ini adalah :

1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan

Rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan merupakan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan penduduk perempuan pada berbagai jenjang, dalam bentuk satuan tahun.

2. Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan

Angka harapan hidup perempuan merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dijalani oleh seorang bayi perempuan yang lahir pada tahun tertentu, dalam bentuk satuan tahun.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan persentase seluruh tenaga kerja perempuan pada usia produktif yang dapat diserap oleh berbagai sektor ekonomi pada periode tertentu. Adapun TPAK perempuan diukur dengan persentase jumlah angkatan kerja perempuan dibagi dengan total jumlah penduduk perempuan usia kerja, dalam satuan persen.

4. Keterwakilan Perempuan di Parlemen (KPP)

Keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Persentase ini sebagai salah satu indikator yang ditetapkan untuk mengukur tingkat keterwakilan perempuan pada penetapan keputusan politik dan representasi gender pada pemerintahan, dengan satuan persen.

5. Proporsi Perempuan pada Posisi Manajerial (PPM)

Proporsi perempuan pada posisi manajerial merupakan persentase yang

menunjukkan jumlah perempuan yang menempati posisi manajerial dibandingkan dengan total individu pada suatu pemerintahan atau swasta dengan satuan persen.

6. Investasi Asing Langsung (FDI)

Investasi asing langsung (FDI) merupakan investasi langsung yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain dalam kaitanya dengan fasilitas produksi, infrastruktur maupun bisnis guna mendapatkan keuntungan jangka panjang. Pada penelitian ini variabel investasi asing langsung diukur dalam satuan miliar rupiah, kemudian dilakukan transformasi data dengan mengubah variabel investasi asing langsung ke dalam bentuk logaritma natural ($\ln$) sebelum analisis regresi dengan tujuan untuk menormalkan satuan data antar variabel dalam regresi.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan telah tersedia pada publikasi lembaga resmi yang ada (Kothari, 2004). Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari gabungan antara data kerat lintang (*cross section*) dari 34 provinsi di Indonesia dan deret waktu (*time series*) periode 2015-2021. Data panel yang digunakan bersumber dari publikasi lembaga resmi nasional maupun internasional, yaitu dari, UNDP (*United Nations Development Programme*), Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), dan BPS (Badan Pusat statistik).

Tabel 3.1 Sumber Data

Variabel	Satuan	Sumber Data
IPEI (Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif)	Indeks	Bappenas
RLSP (Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan)	Tahun	BPS
AHHP (Angka Harapan Hidup Perempuan)	Tahun	BPS
TPAKP (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan)	Persen	BPS
KPP (Keterwakilan Perempuan di Parlemen)	Persen	BPS
PMM (Proporsi Perempuan pada Posisi Manajerial)	Persen	BPS
FDI (Investasi Asing Langsung)	miliar rupiah	BPS

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yang dilakukan dengan mengumpulkan data statistik dari berbagai sumber seperti literatur, jurnal, artikel, buku, maupun kumpulan data yang telah dipublikasi oleh lembaga resmi yang ada. Data sekunder dari tiap variabel yang telah dikumpulkan bersumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

3.4 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada 34 provinsi di Indonesia dengan mencakup periode waktu tujuh tahun yaitu tahun 2015-2021. Menurut Gujarati & Porter (2009) bahwa dengan menggunakan data panel dapat meminimalisir masalah multikolinearitas di antara variabel serta mengontrol adanya heterogenitas yang tinggi pada model.

3.4.1 Estimasi Model

Persamaan yang dibentuk pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$IPEI_{it} = \beta_0 + \beta_1 RLSP_{it} + \beta_2 AHHP_{it} + \beta_3 TPAKP_{it} + \beta_4 KPP_{it} + \beta_5 PPM_{it} + \beta_6 FDI_{it} + e_{it} \quad (3.1)$$

Keterangan :

IPEI	= Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
RLSP	= Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan
RLSP	= Angka Harapan Hidup Perempuan
TPAKP	= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
KPP	= Keterwakilan Perempuan di Parlemen
PPM	= Proporsi Perempuan pada Posisi Manajerial
FDI	= Investasi asing langsung
$\beta_0 - \beta_5$	= Koefisien Regresi
e	= error term
i	= provinsi (<i>cross section</i>)
t	= tahun (<i>time series</i>)

3.4.2 Metode Analisis Data Panel

Analisis data panel terdiri dari tiga pendekatan utama yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) Gujarati & Porter (2009).

A. *Common Effect Model* (CEM)

Menurut Gujarati & Porter (2009) *Common Effect Model* (CEM)

merupakan model paling sederhana untuk mengestimasi data panel, terdapat kesamaan perilaku antar unit *cross-section* dengan tidak memperhatikan sifat ataupun dimensi waktu dari data tersebut. Adapun pendekatan ini disebut juga *pooled regression* dengan tidak mempertimbangkan dimensi antara individu maupun waktu. Selain itu, model ini menggunakan estimasi *Ordinary Least Square* (OLS).

B. *Fixed Effect Model* (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang mengasumsikan bahwa setiap unit *cross section* memiliki karakteristik yang berbeda-beda serta tidak berubah seiring waktu. Oleh karena itu, regresi data panel dengan menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM) menghasilkan estimasi yang lebih konsisten dan tepat untuk menangkap heterogenitas antar provinsi (Gujarati & Porter, 2009).

C. *Random Effect Model* (REM)

Random Effect Model merupakan model yang mengasumsikan bahwa efek individual bersifat acak serta tidak berkorelasi dengan variabel independen (Wooldridge, 2016). Model ini menjadi efisien apabila asumsi homoskedastisitas dan tidak adanya autokorelasi terpenuhi. Jika terdapat heteroskedastisitas, maka standard error dari estimasi dapat menjadi tidak valid. Oleh karena itu, dengan menggunakan model REM maka efek individual yang tidak teramati harus dipastikan tidak berkorelasi dengan variabel independen dan asumsi eksogenitas terpenuhi. Jika asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka model yang ditetapkan menjadi tidak konsisten dan bias, sehingga hasil estimasi hanya menunjukkan hubungan korelasi tidak sebagai hubungan kausalitas.

3.4.3 Pemilihan Model Estimasi pada Data Panel

A. Uji Chow

Uji Chow merupakan uji yang dilakukan untuk membandingkan model *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Berikut adalah hipotesis yang berlaku pada uji Chow :

H0 : *Common Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Pengambilan keputusan pada Uji Chow yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H0 diterima dan H1 ditolak, maka *Common Effect Model* sebagai model terbaik.
2. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H0 ditolak dan H1 diterima, dengan demikian *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai model terbaik.

B. Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk membandingkan antara *fixed effect model* dengan *random effect model*. Adapun hipotesis yang berlaku pada Uji Hausman yaitu sebagai berikut :

H0 : *Random effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Pada Uji Hausman pemilihan model dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya (*p-value*).

1. Jika *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ ($p\text{-value} < 0,05$), maka H0 ditolak dan H1 diterima, oleh karena itu model estimasi terbaik adalah *fixed effect model* (FEM).

2. Jika p -value lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (p -value $> 0,05$) maka dengan itu H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga model terbaik adalah *random effect model* (REM).

C. Lagrange Multiplier Test (Uji LM)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui model terbaik antara *common effect model* atau *random effect model* pada penelitian. Hipotesis pada uji LM test yaitu sebagai berikut :

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_1 : *Random Effect Model* (REM)

Pengambilan keputusan pada uji LM yaitu melalui nilai p -value chi square, sebagai berikut :

1. Jika p -value lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (p -value $< 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga model yang tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).
2. Jika p -value lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (p -value $> 0,05$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Oleh karena itu, model terbaik yang digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM).

A. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mendeteksi distribusi variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal atau tidak. Adapun uji normalitas dapat dilakukan melalui uji *Jarque Bera* (JB). Hipotesis dalam uji normalitas adalah :

H_0 : Residual terdistribusi normal

H_1 : Residual tidak terdistribusi normal

Pengambilan keputusan pada uji normalitas dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas *Jarque-Bera* dengan tingkat signifikansi α sebesar 0,05. Pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas *Jarque-Bera* $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, dengan itu dinyatakan data terdistribusi normal.
- b. Jika nilai probabilitas *Jarque-Bera* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan itu dinyatakan data tidak terdistribusi normal.

3.4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresi efisien (Gujarati & Porter, 2009). Dengan uji asumsi klasik, maka dapat diketahui bahwa model regresi yang diterapkan memiliki hasil estimasi bersifat terbaik, linier, dan tidak bias (*Best Linear Unbiased Estimator* /BLUE). Adapun dasar uji asumsi klasik dalam mencapai kaidah BLUE dengan menggunakan asumsi Gauss-Markov, yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

A. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk membuktikan ada atau tidaknya korelasi antara variabel independen pada persamaan model regresi (Gujarati & Porter, 2009). Jika variabel independen terdeteksi multikolinearitas sempurna, maka hasil estimasi menjadi bias. Adapun dalam mendeteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi antar variabel, jika nilai

koefisien korelasinya lebih besar dari 0,8 maka terjadi adanya multikolinearitas. Selain itu, untuk membuktikan adanya multikolinearitas sempurna dapat dideteksi melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka terdeteksi adanya multikolinearitas sempurna. Sedangkan jika nilai VIF dibawah 10 menunjukkan bahwa tidak terdeteksi adanya permasalahan multikolinearitas.

B. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk mendeteksi ketidaksamaan variansi residual pada model regresi. Adapun uji heteroskedastisitas sebagai salah satu uji untuk memenuhi asumsi homoskedastisitas pada asumsi Gauss-Markov, yang mana eror harus memiliki variansi yang tetap. Dengan demikian, uji heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui *Breusch Pagan Test*. Hipotesis pada uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

H0: tidak terdapat heteroskedastisitas

H1: terdapat masalah heteroskedastisitas

Pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas dapat dilihat melalui nilai probabilitasnya pada taraf nyata α sebesar 0,05. Pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga terdapat masalah heteroskedastisitas.

C. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antara faktor kesalahan pengganggu (error) pada periode waktu yang ditetapkan. Dengan adanya masalah autokorelasi dapat membuat estimasi variansi menjadi tidak efisien, sehingga uji signifikansi menjadi tidak valid. Metode yang ditetapkan untuk uji autokorelasi adalah *Breusch-Godfrey*. Hipotesis pada uji autokorelasi adalah:

H0: tidak terdapat autokorelasi

H1: terdapat masalah autokorelasi

Pengambilan keputusan pada uji autokorelasi dengan metode *Breusch-Godfrey*. Hipotesis yang ditentukan melalui nilai probabilitas (*p-value*) pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, dengan itu pengambilan keputusan pada uji autokorelasi adalah :

- a. Jika $p\text{-value} > 0,05$ maka H0 diterima dan H1 ditolak, dengan itu tidak terdapat masalah autokorelasi.
- b. Jika $p\text{-value} < 0,05$, maka H0 ditolak dan H1 diterima, dengan itu menunjukkan bahwa terdapat masalah autokorelasi.

3.4.5 Uji Statistik

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen pada model regresi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Gujarati & Porter, 2009). Adapun hipotesis yang digunakan pada uji-F yaitu sebagai berikut:

- a. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0$, artinya variabel RLSP, AHHP,

TPAKP, KPP, PPM, dan FDI secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI).

- b. $H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq \beta_6 \neq 0$, artinya setidaknya terdapat satu variabel independen (RLSP, AHHP, TPAKP, KPP, PMM, dan FDI) berpengaruh signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI).

Pengambilan keputusan pada uji-F dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, atau berdasarkan nilai probabilitas (*p-value*) pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jika nilai F hitung $< F$ tabel atau *p-value* $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, dengan demikian, secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai F hitung $> F$ tabel atau *p-value* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan itu secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

b) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Adapun uji-t dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dengan membandingkan nilai t-hitung terhadap t-tabel atau dengan membandingkan nilai *p-value* dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Terdapat beberapa hipotesis pada uji-t yaitu sebagai berikut:

- a. Variabel Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan (RLSP)

$H_0 : \beta_1 \leq 0$: Variabel RLSP tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi inklusif

H1 : $\beta_1 > 0$: Variabel RLSP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

b. Variabel Angka Harapan Hidup Perempuan (AHHP)

H0 : $\beta_2 \leq 0$: Variabel AHHP tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

H1 : $\beta_2 > 0$: Variabel AHHP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

c. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP)

H0 : $\beta_3 \leq 0$: Variabel TPAKP tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

H1 : $\beta_3 > 0$: Variabel TPAKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

d. Variabel Keterwakilan Perempuan di Parlemen (KPP)

H0 : $\beta_4 \leq 0$: Variabel KPP tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

H1 : $\beta_4 > 0$: Variabel KPP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

e. Variabel Proporsi perempuan pada Posisi Manajerial (PPM)

H0 : $\beta_5 \leq 0$: Variabel PPM tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

H1 : $\beta_5 > 0$: Variabel PPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

f. Variabel Investasi Asing Langsung (FDI)

$H_0 : \beta_6 \leq 0$: Variabel FDI tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

$H_1 : \beta_6 > 0$: Variabel FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

Berikut merupakan pengambilan keputusan pada uji-t :

- 1) Jika nilai t-hitung < t-tabel atau nilai *p-value* > 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai t-hitung > t-tabel atau nilai *p-value* < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c) **Koefisien Determinasi (R^2)**

Koefisien determinasi (R^2) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menilai *goodness of fit* pada sebuah model regresi (Gujarati & Porter, 2009). Adapun koefisien determinasi digunakan untuk melihat sejauh mana variabel independen dalam model dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 berada pada rentang 0 hingga 1, jika nilai R^2 semakin mendekati 1 maka model regresi tersebut semakin baik dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sedangkan jika nilai R^2 semakin mendekati 0 maka model regresi tersebut semakin lemah dan tidak cukup kuat untuk mengindikasikan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Perkembangan IPEI di Indonesia

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Indeks pembangunan ekonomi inklusif memiliki tiga kriteria penilaian yaitu kriteria pertama dengan skor 1-3 artinya kurang memuaskan. Kriteria kedua dengan skor 4-7 artinya memuaskan, dan kriteria ketiga dengan skor 8-10 artinya sangat memuaskan (Bappenas, 2023). Pada tahun 2017-2019 IPEI Indonesia mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang memperlemah kondisi perekonomian dan menurunkan kesejahteraan masyarakat, di mana kondisi tersebut tercermin melalui ketiga pilar penyusunnya. Pada tahun 2021 IPEI Indonesia terus mengalami peningkatan mencapai nilai 6,17. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif Indonesia pada kriteria memuaskan.

Tabel 4.1 Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) Indonesia Tahun 2015-2021 (indeks)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	4,87	5,38	5,56	5,53	5,74	5,46	5,73
Sumatera Utara	5,82	5,99	6,12	6,07	6,34	5,95	6,34
Sumatera Barat	5,72	6,00	5,98	5,93	6,15	5,67	6,17
Riau	5,21	5,50	5,66	5,70	5,86	5,67	6,19
Jambi	5,21	5,40	6,00	5,64	5,76	5,43	5,87
Sumatera Selatan	5,38	5,67	5,83	5,70	5,87	5,55	5,97
Bengkulu	5,3	5,51	5,54	5,51	5,75	5,52	5,95
Lampung	5,26	5,44	5,64	5,58	5,84	5,48	5,95
Kepulauan Bangka Belitung	5,96	6,24	6,2	6,18	6,23	5,83	6,49
Kepulauan Riau	6,35	6,36	6,34	6,43	6,58	6,18	6,66
DKI Jakarta	7,00	7,26	7,36	7,65	7,88	7,19	7,93
Jawa Barat	5,69	5,89	5,96	6,02	6,18	5,63	6,02
Jawa Tengah	5,95	6,14	6,34	6,25	6,51	6,01	6,43
DI Yogyakarta	6,22	6,39	6,5	6,49	6,69	6,13	6,63
Jawa Timur	5,73	5,99	6,11	6,12	6,37	5,93	6,31
Banten	5,34	5,57	5,59	5,60	5,95	5,48	6,09
Bali	6,54	6,75	6,54	6,64	6,82	5,6	6,23
Nusa Tenggara Barat	5,73	5,57	5,32	5,04	6,00	5,71	6,06
Nusa Tenggara Timur	4,26	4,57	4,80	4,82	4,97	4,65	5,24
Kalimantan Barat	4,96	5,22	5,18	5,31	5,55	5,27	5,79
Kalimantan Tengah	5,51	5,63	5,82	5,74	5,97	5,59	6,12
Kalimantan Selatan	5,67	5,97	6,01	5,92	6,14	5,75	6,24
Kalimantan Timur	5,72	5,85	6,04	5,95	6,22	5,77	6,24
Kalimantan Utara	5,45	5,67	5,88	6,04	6,17	5,55	6,22
Sulawesi Utara	5,58	5,74	5,83	5,78	6,16	5,65	6,15
Sulawesi Tengah	5,36	5,41	5,44	5,38	5,72	5,86	6,41
Sulawesi Selatan	5,42	5,57	5,73	5,76	6,04	5,56	6,11
Sulawesi Tenggara	5,23	5,55	5,64	5,53	5,81	5,50	6,02
Gorontalo	4,8	5,19	5,15	5,25	5,57	5,25	5,61
Sulawesi Barat	4,82	5,14	5,17	5,12	5,43	4,99	5,67

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Maluku	4,76	5,02	5,13	5,12	5,44	5,09	5,63
Maluku Utara	4,93	5,25	5,28	5,29	5,42	5,42	6,3
Papua Barat	4,52	4,84	4,91	5,18	5,32	5,01	5,19
Papua	3,03	3,33	3,44	3,66	3,22	3,58	4,14
Indonesia	5,42	5,66	5,76	5,77	5,97	5,54	6,00

Sumber : Bappenas, 2021

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa provinsi dengan rata-rata IPEI tertinggi pada tahun 2015-2021 adalah Provinsi DKI Jakarta. Adapun pada tahun 2021 nilai IPEI DKI Jakarta sebesar 7,93 pada golongan memuaskan, yang mana nilai tersebut melebihi tingkat IPEI nasional. Kondisi berbeda terjadi pada provinsi di kawasan timur Indonesia, di mana tingkat IPEI berada di bawah tingkat IPEI nasional. Hal tersebut terjadi di Provinsi Papua pada tahun 2015-2021 dengan nilai rata-rata indeks IPEI terendah. Selama periode 7 tahun nilai indeks IPEI Papua belum dapat setara dengan tingkat IPEI secara nasional. Pada tahun 2015, nilai IPEI papua pada golongan kurang memuaskan yaitu sebesar 3,03. Sedangkan pada tahun 2021 nilai IPEI Papua sebesar 4,14, hal ini menunjukkan bahwa IPEI Papua tergolong memuaskan.

4.1.2 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Indonesia

Angka harapan hidup merupakan rata-rata lama hidup suatu penduduk. Adapun angka harapan hidup perempuan digunakan untuk menggambarkan akses perempuan pada bidang kesehatan. Angka harapan hidup perempuan yang tinggi menunjukkan adanya penurunan angka kematian, dan memperbesar angkatan kerja produktif. Pada tahun 2021 angka harapan hidup perempuan secara nasional sebesar 73,55 tahun.

Tabel 4.2 Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Indonesia Tahun 2015-2021 (dalam tahun)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	71,49	71,52	71,55	71,67	71,85	71,91	71,94
Sumatera Utara	70,26	70,29	70,29	70,52	70,92	71,08	71,21
Sumatera Barat	70,65	70,65	70,70	70,93	71,29	71,45	71,57
Riau	72,9	72,9	72,92	73,12	73,43	73,55	73,62
Jambi	72,54	72,62	72,67	72,80	72,97	73,07	73,19
Sumatera Selatan	71,13	71,16	71,17	71,40	71,63	71,86	71,95
Bengkulu	70,48	70,49	70,51	70,76	71,13	71,27	71,40
Lampung	71,88	71,9	71,91	72,14	72,48	72,61	72,69
Kepulauan Bangka Belitung	71,85	71,88	71,89	72,11	72,46	72,59	72,50
Kepulauan Riau	71,38	71,39	71,40	71,56	71,73	71,90	72,07
DKI Jakarta	74,36	74,41	74,41	74,56	74,68	74,80	74,91
Jawa Barat	74,36	74,39	74,42	74,62	74,81	75,00	75,19
Jawa Tengah	75,95	75,99	76,02	76,10	76,16	76,30	76,42
DI Yogyakarta	76,54	76,54	76,57	76,65	76,76	76,83	76,89
Jawa Timur	72,67	72,68	72,70	72,87	73,15	73,27	73,35
Banten	71,41	71,44	71,47	71,62	71,81	71,93	71,99
Bali	73,31	73,32	73,35	73,57	73,89	74,03	74,17
Nusa Tenggara Barat	67,33	67,39	67,42	67,75	68,16	68,39	68,66
Nusa Tenggara Timur	67,91	67,92	67,96	68,28	68,81	68,96	69,11
Kalimantan Barat	71,87	71,89	71,90	72,16	72,55	72,67	72,74
Kalimantan Tengah	71,49	71,49	71,50	71,55	71,60	71,66	71,72
Kalimantan Selatan	69,78	69,84	69,95	70,19	70,45	70,62	70,79
Kalimantan Timur	75,59	75,59	75,61	75,87	76,13	76,21	76,51
Kalimantan Utara	74,28	74,3	74,34	74,37	74,40	74,44	74,48
Sulawesi Utara	72,98	72,99	73,01	73,23	73,55	73,67	73,72
Sulawesi Tengah	69,26	69,28	69,29	69,75	70,26	70,72	70,85
Sulawesi Selatan	71,8	72,47	71,86	72,10	72,42	72,56	72,65
Sulawesi Tenggara	72,46	72,47	72,47	72,71	73,12	73,37	73,37
Gorontalo	69,14	69,16	69,20	69,53	69,94	70,09	70,21
Sulawesi Barat	66,18	66,2	66,23	66,47	66,78	67,02	67,19
Maluku	67,28	67,34	67,39	67,58	67,79	67,93	68,05
Maluku Utara	69,48	69,5	69,53	69,79	70,17	70,32	70,44

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Papua Barat	67,15	67,16	67,19	67,43	67,78	67,9	68,05
Papua	66,97	66,99	67,00	67,22	67,51	67,65	67,79
Indonesia	72,78	72,8	73,06	73,19	73,33	73,46	73,55

Sumber : BPS, 2017-2021

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa angka harapan hidup perempuan tertinggi pada tahun 2021 terletak pada provinsi di kawasan Barat Indonesia meliputi DIY Yogyakarta sebesar 76,89 tahun. Selanjutnya pada Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Sedangkan provinsi dengan angka harapan hidup perempuan terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat yaitu 66,18 tahun.

4.1.3 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan di Indonesia

Rata-rata lama sekolah perempuan merupakan total tahun yang telah ditempuh penduduk perempuan dalam menyelesaikan pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah perempuan digunakan untuk menunjukkan kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan. Adapun di Indonesia menjamin bagi seluruh warga negara untuk dapat mengakses pendidikan yang layak selama 12 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional.

Secara nasional perempuan Indonesia memiliki rata-rata lama sekolah yang relatif kecil, pada tahun 2021 sebesar 8,17 tahun. Nilai tersebut belum mencerminkan wajib belajar 12 tahun ataupun 9 tahun sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata

perempuan Indonesia menyelesaikan pendidikan hanya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tabel 4.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan di Indonesia Tahun 2015-2021 (dalam tahun)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	8,4	8,54	8,62	8,71	8,85	9,13	9,22
Sumatera Utara	8,66	8,78	8,96	9,08	9,17	9,28	9,33
Sumatera Barat	8,32	8,49	8,60	8,66	8,77	8,89	8,96
Riau	8,17	8,36	8,49	8,71	8,75	8,87	9,01
Jambi	7,44	7,63	7,70	7,77	8,01	8,17	8,23
Sumatera Selatan	7,37	7,48	7,67	7,68	7,82	7,90	8,01
Bengkulu	7,89	8,01	8,16	8,28	8,34	8,50	8,59
Lampung	7,19	7,33	7,49	7,50	7,52	7,73	7,76
Kepulauan Bangka Belitung	7,14	7,31	7,48	7,51	7,54	7,67	7,82
Kepulauan Riau	9,36	9,46	9,57	9,60	9,77	9,98	10,06
DKI Jakarta	10,2	10,42	10,61	10,63	10,65	10,76	10,83
Jawa Barat	7,35	7,52	7,69	7,71	7,90	8,11	8,23
Jawa Tengah	6,5	6,65	6,78	6,87	7,03	7,24	7,34
DI Yogyakarta	8,4	8,6	8,73	8,80	8,87	9,16	9,31
Jawa Timur	6,57	6,69	6,78	6,85	7,04	7,30	7,45
Banten	7,66	7,82	7,98	8,04	8,24	8,45	8,46
Bali	7,33	7,53	7,75	7,82	8,03	8,21	8,36
Nusa Tenggara Barat	6,02	6,13	6,27	6,36	6,58	6,64	6,66
Nusa Tenggara Timur	6,61	6,75	6,87	7,00	7,23	7,28	7,29
Kalimantan Barat	6,43	6,44	6,49	6,62	6,79	6,84	6,93
Kalimantan Tengah	7,59	7,73	7,91	8,00	8,16	8,25	8,29
Kalimantan Selatan	7,23	7,4	7,52	7,53	7,70	7,88	7,91
Kalimantan Timur	8,68	8,82	8,93	9,06	9,25	9,27	9,42
Kalimantan Utara	8,25	8,43	8,44	8,69	8,76	8,82	8,93
Sulawesi Utara	8,86	9,00	9,19	9,24	9,39	9,47	9,64
Sulawesi Tengah	7,66	7,84	8,00	8,27	8,50	8,58	8,62
Sulawesi Selatan	7,34	7,46	7,63	7,76	7,95	8,15	8,20
Sulawesi Tenggara	7,7	7,86	7,95	8,26	8,47	8,64	8,72
Gorontalo	7,34	7,41	7,56	7,76	8,00	8,09	8,22

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sulawesi Barat	6,71	6,91	7,08	7,28	7,50	7,60	7,66
Maluku	8,91	9,08	9,17	9,41	9,66	9,80	9,95
Maluku Utara	7,8	8,06	8,17	8,28	8,55	8,61	8,67
Papua Barat	6,71	6,8	6,90	7,01	7,19	7,37	7,53
Papua	5,05	5,32	5,44	5,70	5,79	5,88	6,00
Indonesia	7,35	7,50	7,65	7,72	7,89	8,07	8,17

Sumber : BPS, 2017-2021

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa provinsi dengan rata-rata lama sekolah tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu 10,83 tahun. Sedangkan provinsi dengan rata-rata lama sekolah terendah yaitu provinsi Papua Barat dengan nilai rata-rata sebesar 5,02 tahun. Adanya perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan yang diberikan untuk perempuan belum sepenuhnya merata di tiap provinsi.

4.1.4 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Indonesia

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan persentase jumlah angkatan kerja perempuan dan jumlah penduduk perempuan usia kerja. Dengan TPAK perempuan dapat diketahui pasokan tenaga kerja perempuan yang berpotensi aktif secara ekonomi untuk dapat memproduksi barang dan jasa. Adapun TPAK perempuan di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun 2015-2021.

Tabel 4.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Indonesia Tahun 2015-2021 (dalam persen)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	46,19	47,27	47,92	48,24	45,68	48,94	48,36
Sumatera Utara	52,58	52,88	52,58	59,97	56,8	56,15	56,5
Sumatera Barat	49,97	53,48	52,93	54,81	54,26	56,24	55,04
Riau	42,08	46,8	43,43	45,68	45,26	46,4	47,14

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jambi	46,77	48,6	50,28	51,69	46,74	50,04	49,89
Sumatera Selatan	52,76	57,67	53,63	53,23	51,68	54,25	54,54
Bengkulu	55,78	59,91	53,91	56,26	55,2	57,71	55,45
Lampung	44,57	52,17	48,43	51,22	50,95	54,13	52,36
Kepulauan Bangka Belitung	47,1	52,98	47,93	50,03	48,03	48,47	46,86
Kepulauan Riau	42,58	46,45	49,96	46,62	45,35	48,93	51,92
DKI Jakarta	50,22	50,58	45,56	47,86	47,62	47,47	47,34
Jawa Barat	38,74	40,3	43,89	42,25	46,33	46,79	47,88
Jawa Tengah	53,89	53,94	56,26	56,43	55,35	57,54	57,58
DI Yogyakarta	57,3	62,1	62,69	64,03	63,95	64,33	64,59
Jawa Timur	52,43	52,06	54,37	55,31	55,07	56,56	56,11
Banten	41,67	45,29	42,8	44,3	45,21	46,62	46,84
Bali	67,24	70,56	67,7	70,14	65,67	67,86	67,61
Nusa Tenggara Barat	52,98	61,99	56,18	54,27	56,36	58,66	59,18
Nusa Tenggara Timur	58,43	59,15	58,65	60,9	59,74	63,91	65,34
Kalimantan Barat	54,93	53,93	53,38	53,07	52,92	53,86	53,43
Kalimantan Tengah	53,55	53,61	49,19	51,82	51,53	50,57	51,12
Kalimantan Selatan	53,87	57,54	54,99	54,98	54,05	55,5	54,72
Kalimantan Timur	38,58	47,69	42,33	45,18	47,17	47,96	48,2
Kalimantan Utara	40,75	38,57	49,02	49,44	45,16	47,62	48,44
Sulawesi Utara	40,26	47,87	41,7	45,16	45,14	45,68	44,72
Sulawesi Tengah	48,89	57,16	49,49	53,91	50,33	52,5	52,17
Sulawesi Selatan	44,31	47,47	43,76	47,65	47,01	48,16	49,42
Sulawesi Tenggara	53,93	61,42	54,93	55,65	54,98	56,02	56,27
Gorontalo	45,8	53,12	46,71	51,66	50,03	49,95	50,41
Sulawesi Barat	54,8	55,34	49,86	53,96	52,86	55,02	54,38
Maluku	50,77	51,97	45,16	50,05	50,5	53,52	53,71
Maluku Utara	48,56	48,88	46,36	49,92	47,79	46,57	47,57
Papua Barat	54,31	52,4	54,66	52,15	53,03	57,27	58,78
Papua	70,33	66,25	67,45	70,53	66,72	63,47	69,1
Indonesia	49,97	53,48	50,89	51,8	51,81	53,13	53,34

Sumber : BPS, 2017-2021

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2021, menunjukkan bahwa Provinsi Bali memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tertinggi yaitu sebesar 70,56 persen di tahun 2016. Sedangkan, provinsi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja paling rendah adalah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 38,57 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan yang membatasi perempuan untuk memasuki pasar tenaga kerja baik di tingkat provinsi maupun nasional.

4.1.5 Perkembangan Keterwakilan Perempuan di parlemen di Indonesia

Keterwakilan perempuan di parlemen mencerminkan tingkat representasi gender pada pengambilan keputusan politik, di mana sebagai indikator penting kesetaraan gender. Adapun di Indonesia salah satu upaya guna meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dengan mendukung kebijakan 30% dalam pemilu. Tetapi realisasinya kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercapai, adapun tingkat KPP di Indonesia pada tahun 2015-2021 memiliki tren yang meningkat mencapai 26,37%.

Tabel 4.5 Keterwakilan Perempuan di Parlemen di Indonesia Tahun 2015-2021 (dalam persen)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	14,81	16,00	14,81	14,81	11,11	11,11	11,11
Sumatera Utara	14,00	15,00	15,00	17,17	13,00	13,00	13,13
Sumatera Barat	9,23	10,77	10,77	10,77	4,62	4,62	10,77
Riau	27,69	27,69	28,13	28,13	18,46	18,46	21,54
Jambi	12,73	12,73	14,55	16,98	14,55	14,55	14,55
Sumatera Selatan	17,33	17,33	20,27	21,33	21,33	21,26	21,33
Bengkulu	15,56	17,78	17,78	15,56	15,56	16,28	15,91
Lampung	13,1	13,1	14,12	14,12	20,00	20,00	18,82
Kepulauan Bangka Belitung	8,89	4,44	6,67	4,44	4,44	4,44	8,89

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kepulauan Riau	13,33	16,28	17,78	17,78	11,11	11,11	8,89
DKI Jakarta	17,92	18,87	18,87	19,81	21,7	21,7	21,7
Jawa Barat	22,00	24,00	22,00	22,00	20,00	20,83	20,83
Jawa Tengah	15,00	15,00	24,00	22,00	19,17	18,8	18,33
DI Yogyakarta	12,73	10,91	12,73	12,73	16,36	18,18	20,00
Jawa Timur	15,00	15,00	15,00	15,00	18,33	18,33	17,5
Banten	18,82	18,82	20	23,53	17,65	17,65	17,65
Bali	9,09	9,09	9,09	9,09	16,36	16,36	16,36
Nusa Tenggara Barat	9,23	9,38	9,23	9,23	1,54	1,56	1,59
Nusa Tenggara Timur	10,77	10,77	9,23	10,77	18,46	20,00	20,00
Kalimantan Barat	10,77	10,77	10,77	10,77	13,85	13,85	16,92
Kalimantan Selatan	16,36	12,7	12,73	16,36	20,00	20,00	20,00
Kalimantan Timur	10,91	10,91	10,91	10,91	18,18	18,18	20,37
Kalimantan Utara	20,00	14,29	11,43	20,00	11,43	14,29	11,43
Sulawesi Utara	36,36	37,78	38,64	33,33	28,89	29,27	29,55
Sulawesi Tengah	15,56	20,00	20,00	24,44	24,44	26,67	27,27
Sulawesi Selatan	18,82	21,18	21,18	19,05	27,71	28,4	25,88
Sulawesi Tenggara	20,00	17,78	17,78	18,18	17,78	19,05	20,00
Gorontalo	28,89	28,89	29,55	28,89	26,67	26,67	26,67
Sulawesi Barat	15,56	17,78	20,00	17,78	11,11	11,11	11,11
Maluku	26,67	26,67	28,89	26,67	23,26	23,26	23,26
Maluku Utara	13,89	16,28	17,78	20,45	26,67	26,67	28,89
Papua Barat	4,44	4,44	3,57	5,36	14,29	14,29	14,29
Papua	12,73	12,73	10,61	16,36	12,73	14,55	14,55
Indonesia	17,32	17,32	17,32	17,32	20,52	21,09	21,89

Sumber : BPS, 2017-2021

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan kondisi keterwakilan perempuan di parlemen menurut provinsi, pada tahun 2017 Sulawesi Utara merupakan provinsi yang memiliki KPP tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain, yaitu sebesar 38,64%. Sedangkan provinsi dengan KPP paling rendah adalah Nusa Tenggara Barat tahun 2019 sebesar 1,54%. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa meskipun

telah ditetapkan kebijakan secara nasional, tetapi disparitas antar wilayah masih terjadi.

4.1.6 Perkembangan Proporsi Perempuan pada Posisi Manajerial (PPM) di Indonesia

Proporsi perempuan pada posisi manajerial mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan pada kepemimpinan, sebagai indikator penting dalam mengukur kesetaraan gender di dunia kerja. Adapun di Indonesia peningkatan proporsi perempuan di posisi manajerial telah menjadi fokus kebijakan nasional guna mendukung diversitas gender. PPM di Indonesia pada tahun 2015-2020 mengalami tren meningkat, namun tahun 2021 mengalami penurunan sebagai akibat dari Covid-19.

Tabel 4.6 Proporsi Perempuan pada Posisi Manajerial di Indonesia Tahun 2015-2021 (dalam persen)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	15,47	18,18	20,8	20,56	26,13	32,61	30,6
Sumatera Utara	20,82	29,23	34,04	29,76	28,96	26,92	27,29
Sumatera Barat	31,74	31,62	31,29	32,3	33,67	38,48	33,22
Riau	18,19	23,59	24,87	26,68	26,67	32,46	31,06
Jambi	24,8	19,16	18,5	24,68	28,72	35,29	29,66
Sumatera Selatan	21,40	27,03	23,04	27,76	28,49	30,5	31,15
Bengkulu	25,94	22,33	19,98	22,87	28,14	24,67	25,66
Lampung	22,31	25,81	33,98	26,31	30,55	26,64	25,17
Kepulauan Bangka Belitung	21,25	16,65	24,48	22,8	23,61	23,19	29,39
Kepulauan Riau	31,7	11,38	24,4	39,38	33,75	23,63	25,66
DKI Jakarta	23,51	24,24	30,31	30,16	35,96	34,19	33,15
Jawa Barat	20,36	22,84	24,1	27,56	28,17	31,44	33,73
Jawa Tengah	25,34	23,99	25,16	31,67	33,1	33,43	30,91
DI Yogyakarta	19,02	27,01	31,89	39,43	33,41	40,54	25,84
Jawa Timur	20,77	26,61	32,25	28,13	35,92	39,99	37,86
Banten	16,13	25,33	24,76	28,48	26,88	33,89	34,26

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bali	22,17	33,02	25,49	21,08	23,58	36,38	32,96
Nusa Tenggara Barat	19,53	21,68	18,04	26,23	23,31	32,45	29,99
Nusa Tenggara Timur	21,14	19,13	26,56	26,22	31,24	23,31	31,3
Kalimantan Barat	22,38	25,66	18,65	27,2	23,25	24,37	23,68
Kalimantan Tengah	18,26	10,25	16,53	22,08	29,03	29,69	26,78
Kalimantan Selatan	22,49	20,69	24,73	20,07	26,58	29,27	28,48
Kalimantan Timur	16,68	23,39	23,35	24,6	21,94	30,52	30,38
Kalimantan Utara	13,51	18,41	13,45	19,16	21,08	26,27	29,31
Sulawesi Utara	27,09	36,76	43,35	41,22	36,62	47,93	42,14
Sulawesi Tengah	27,2	18,54	27,28	34,02	32,49	37,01	39,3
Sulawesi Selatan	26,98	10,86	27,44	28,6	27,36	26,42	32,14
Sulawesi Tenggara	37,6	17,68	18,04	32,21	30,76	21,54	27,18
Gorontalo	43,28	36,52	37,29	39,47	45,82	50,43	39,80
Sulawesi Barat	21,35	32,32	34,63	32,07	29,95	31,49	30,01
Maluku	28,03	30,24	31,54	35,67	35,8	26,47	37, 72
Maluku Utara	25,41	28,1	28,46	29,77	20,62	29,75	32,45
Papua Barat	22,28	13,52	21,05	25,43	27,02	33,4	33,42
Papua	23,71	10,25	19,11	27,52	23,7	22,38	28,23
Indonesia	22,32	23,60	26,56	28,75	30,37	33,08	32,50

Sumber : BPS, 2017-2021

Berdasarkan Tabel 4.6 provinsi dengan PPM paling tinggi adalah Gorontalo tahun 2020 sebesar 50,43%. Sedangkan provinsi dengan PPM terendah adalah Kalimantan Tengah dan Papua sebesar 10,25%. Rendahnya partisipasi perempuan di Kalimantan Tengah maupun Papua dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti akses yang terbatas pada bidang pendidikan maupun pelatihan kepemimpinan perempuan di kedua provinsi tersebut dan tantangan infrastruktur di daerah terpencil. Selanjutnya, masih melekatnya norma budaya di kedua wilayah tersebut yang memfokuskan perempuan pada ranah domestik. Terakhir, kondisi ekonomi yang bergantung pada sektor informal maupun sumber daya alam, sehingga tidak

cukup untuk mendukung terciptanya peluang kerja formal pada tingkat manajerial bagi perempuan.

4.1.7 Perkembangan Investasi Asing Langsung (FDI) di Indonesia

Investasi asing langsung mengacu pada investasi langsung dari luar negeri ke dalam suatu negara. Adapun investasi asing langsung sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk menarik modal asing, jika modal yang berasal dari dalam negeri tidak mencukupi sebagai pendanaan. Selain itu, aliran ilmu pengetahuan dan teknologi yang sulit didapatkan di dalam negeri, dapat diperoleh bersamaan dengan arus modal inflow.

Tabel 4.7 Investasi Asing Langsung (FDI) di Indonesia Tahun 2015-2021
(dalam juta USD)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	21,2	134,5	23,2	71,2	137,5	51,1	203,3
Sumatera Utara	1246,1	1.014,70	1.514,90	1.227,60	379,5	974,8	580,4
Sumatera Barat	57,1	79,3	194,4	180,8	157,1	125,6	67
Riau	653,4	869,1	1.061,10	1.032,90	1.034,00	1.078,00	1.921,40
Jambi	107,7	61	76,8	101,9	54,6	27	50,9
Sumatera Selatan	645,8	2.793,50	1.182,90	1.078,60	736,5	1.543,90	1.259,70
Bengkulu	20,6	55,7	138,7	136,6	144,8	192,3	23,7
Lampung	257,7	85,7	120,6	132,3	155,2	498,4	173,8
Kepulauan Bangka Belitung	82,7	52,7	153,1	46,3	88,7	48,4	44,7
Kepulauan Riau	640,4	519,1	1.031,50	831,3	1.363,40	1.649,40	1.043,70
DKI Jakarta	3619,4	3.398,20	4.595,00	4.857,70	4.123,00	3.613,30	3.330,60
Jawa Barat	5.738,70	5.470,90	5.142,90	5.573,50	5.881,00	4.793,70	5.217,70
Jawa Tengah	850,4	1.030,80	2.372,50	2.372,70	2.723,20	1.363,60	1.465,90
DI Yogyakarta	89,1	19,6	36,5	81,3	14,6	9,7	21,8
Jawa Timur	2.593,40	1.941,00	1.566,70	1.333,40	866,3	1.575,50	1.849,20

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Banten	2.542,0 0	2.912,10	3.047,50	2.827,30	1.868,20	2.143,60	2.190,00
Bali	495,8	450,6	886,9	1.002,50	426	293,3	452
Nusa Tenggara Barat	699,4	439	132,1	251,6	270,7	302,1	244,2
Nusa Tenggara Timur	69,9	58,2	139	100,4	126,8	81,3	79
Kalimantan Barat	1.335,7 0	630,7	568,4	491,9	532,3	759,3	463,4
Kalimantan Tengah	933,6	408,2	641	678,5	283,5	177,6	162,5
Kalimantan Selatan	961,2	249,4	243,8	129,2	372,9	240,8	117,2
Kalimantan Timur	2.381,4 0	1.139,60	1.285,20	587,5	861	378	745,2
Kalimantan Utara	230,9	160,8	149	67,3	81,7	68,4	133,5
Sulawesi Utara	88	382,8	482,9	295,9	220,5	155,7	169,1
Sulawesi Tengah	1.085,2 0	1.600,30	1.545,60	672,4	1.805,00	1.779,00	2.718,10
Sulawesi Selatan	233,3	372,5	712,8	617,2	302,6	236,1	310
Sulawesi Tenggara	145	376,1	693	672,9	987,7	1.268,60	1.616,50
Gorontalo	6,9	12,7	41,3	40,8	171,3	67,6	78
Sulawesi Barat	2,00	20,6	11,4	24,7	10,1	6,5	5,9
Maluku	82,4	102,6	212	8,00	33,0	176,7	13,3
Maluku Utara	203,8	438,9	228,1	362,8	1.008,50	2.409,00	2.819,90
Papua Barat	258,6	514,5	84,7	286,9	46,2	10,6	32,5
Papua	897	1.168,40	1.924,10	1.132,30	941	567,7	1.489,10
Indonesia	29.275,9	28.964,1	32.239,8	29.307,9	28.208,8	28.666,3	31.093,1

Sumber : BPS, 2017-2021

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa provinsi dengan nilai investasi asing langsung terendah yaitu Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015 sebesar 2 juta USD. Sedangkan, pada tahun 2021 Jawa Barat sebagai provinsi dengan nilai investasi tertinggi yaitu sebesar 5.88,1 juta USD. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa

Barat memiliki infrastruktur yang jauh lebih maju dibandingkan dengan provinsi lain, meliputi kawasan industri besar sehingga menjadi peluang bagi investor asing untuk menanamkan modal di wilayah tersebut.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik dan Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan tahap yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik data yang digunakan pada penelitian, analisis ini dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari setiap variabel pada penelitian. Adapun analisis statistik deskriptif dilakukan pada keseluruhan variabel penelitian. Adapun hasil statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dinyatakan dalam tabel berikut :

Tabel 4.8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Penelitian

Keterangan	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev.
IPEI	5,704	7,93	3,03	0,673
RLSP	8,024	10,83	5,05	1,038
AHHP	71,639	76,89	66,18	2,577
TPAKP	52,323	70,56	38,57	6,493
KPP	17,405	38,64	1,54	6,983
PPM	27,517	50,43	10,25	6,816
LOG_FDI	15,462	18,376	10,390	1,630

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa provinsi di Indonesia yang memiliki nilai indeks pertumbuhan ekonomi inklusif terendah adalah Papua sebesar 3,03 pada tahun 2015. Sedangkan provinsi DKI Jakarta memiliki nilai indeks

pertumbuhan ekonomi inklusif tertinggi tahun 2021 sebesar 7,93. Dengan nilai mean sebesar 5,704 dan nilai standar deviasi sebesar 0,673.

Variabel rata-rata lama sekolah perempuan memiliki nilai minimum sebesar 5,05 tahun oleh Provinsi Papua pada tahun 2015. Sedangkan nilai maksimum sebesar 10,83 tahun oleh Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Adapun nilai mean sebesar 8,024 tahun dan nilai standar deviasi sebesar 1,038.

Pada variabel angka harapan hidup perempuan memiliki nilai minimum sebesar 66,18 tahun oleh Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015. Sedangkan nilai maksimum variabel ini adalah sebesar 76,89 tahun oleh Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2021 dengan nilai mean sebesar 71,639 tahun dan standar deviasi 2,577.

Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan memiliki nilai minimum sebesar 38,57 persen oleh Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016. Sedangkan nilai maksimum sebesar 70,56 persen oleh Provinsi Bali tahun 2016. Adapun nilai mean sebesar 52,323 persen dengan standar deviasi sebesar 6,493.

Selanjutnya, variabel keterwakilan perempuan di parlemen (KPP) memiliki nilai minimum sebesar 1,54 persen oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019. Selain itu, nilai maksimum sebesar 38,64 persen oleh Sulawesi Utara pada tahun 2017. Dengan nilai mean sebesar 17,405 persen dengan standar deviasi sebesar 6,983 persen.

Variabel proporsi perempuan pada posisi manajerial (PPM) memiliki nilai minimum sebesar 10,25 persen oleh Kalimantan Tengah pada tahun 2016. Sedangkan nilai maksimum sebesar 50,43 persen oleh Gorontalo tahun 2020. Adapun nilai mean sebesar 27,517 persen dengan standar deviasi sebesar 6,816.

Terakhir, variabel investasi asing langsung (FDI) memiliki nilai maksimum sebesar 18,376 persen oleh Jawa Barat tahun 2019. Sedangkan nilai minimum sebesar 10,390 persen oleh Sulawesi Barat tahun 2015. Dengan nilai mean sebesar 15,462 persen dan nilai standar deviasi sebesar 1,630.

4.2.2 Hasil Uji Model Regresi Data Panel

A. Hasil Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model terbaik pada penelitian antara *common effect model* dan *fixed effect model*. Hasil uji chow disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9 Hasil Uji Chow

<i>Effect Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section chi square</i>	16,99	0,000

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000, artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga model terbaik pada penelitian ini adalah *fixed effect model* (FEM).

B. Hasil Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji yang dilakukan untuk menguji antara model *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) guna mendapatkan model terbaik, yang kemudian dilakukan analisis regresi data panel. Berikut merupakan hasil Uji Hausman pada penelitian ini :

Tabel 4.10 Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Square Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-Section Random</i>	7,13	0,309

Sumber : Data diolah (2025)

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Cross-Section Random* sebesar 0,309, artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak. Oleh karena itu, model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

C. Hasil Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji *lagrange multiplier test* (LM) merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui model terbaik antara *common effect model* atau *random effect model* dalam penelitian. Berikut merupakan hasil uji *Lagrange Multiplier Test* (LM) :

Tabel 4.11 Hasil Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

<i>Effect Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section chi square</i>	340,08	0,000

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji LM pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000, artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, model terbaik pada penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

D. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan guna membuktikan variabel residual pada model regresi terdistribusi normal. Berikut merupakan hasil uji normalitas :

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas

<i>Jarque Bera Test Statistic</i>	<i>Prob.</i>
7,1122973	0,29

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,029, artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, pada penelitian ini residual data tidak terdistribusi normal. Menurut *central limit theorem*, penelitian dengan observasi besar cenderung memiliki pelanggaran asumsi normalitas, maka dengan adanya kondisi ketidaknormalan hasil statistik tetap valid (Kothari, 2004).

4.2.3 Hasil Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

A. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang dilakukan untuk mendeteksi korelasi yang tinggi antar variabel independen pada model regresi. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
AHHP	1,54
RLSP	1,33
TPAKP	1,33
PPP	1,31
PPM	1,27
LOG_FDI	1,18
Mean VIF	1,33

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4.13 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF pada tiap variabel independen tidak lebih dari 10. Hal ini mengindikasikan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

B. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi persebaran varians residual pada model regresi. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *Breusch Pagan Test* :

Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Breusch-Pagan Test Statistic</i>	<i>Prob.</i>
144,31606	0,000

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa *p-value* sebesar 0,000, artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, pada penelitian ini terdapat masalah heteroskedastisitas, sehingga perlu dilakukan robust pada hasil estimasi.

C. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji yang digunakan untuk mendeteksi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.15 Hasil Uji Autokorelasi

<i>Breusch-Godfrey Test Statistic</i>	<i>Prob.</i>
98,020743	0,000

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga pada penelitian ini terdapat masalah autokorelasi.

4.2.4 Hasil Regresi *Random Effect Model* (REM)

Berdasarkan hasil uji pemilihan model diperoleh *Random Effect Model* (REM) sebagai model regresi terbaik, berikut hasil estimasi dengan model REM :

Tabel 4.16 Hasil Regresi *Random Effect Model* (REM)

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Robust Std.error</i>	<i>t-statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-6,456	18,08	-3,79	0,000
RLSP	0,324***	0,057	5,46	0,000
AHHP	0,118***	0,028	4,55	0,000
TPAKP	0,006	0,006	0,98	0,328
KPP	-0,002	0,005	-0,42	0,675
PPM	0,002	0,003	0,92	0,358
LOG_FDI	0,049**	0,022	2,34	0,019
Observasi				238
R-squared				0,557
F-statistik				48,388
Jumlah tahun, provinsi				7; 34

Catatan : Standard error yang dilaporkan adalah white robust standard error

Keterangan : *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4.16 menunjukkan hasil estimasi regresi data panel dengan model REM robust, variabel independen yang signifikan pada tingkat 1% adalah variabel rata-rata lama sekolah perempuan dan angka harapan hidup perempuan. Sedangkan variabel investasi asing langsung signifikan pada tingkat 5%. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel

rata-rata lama sekolah perempuan (RLSP), angka harapan hidup perempuan (AHHP), dan investasi asing langsung (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Sementara itu, variabel yang tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif adalah variabel tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP), keterwakilan perempuan di parlemen (KPP), dan proporsi perempuan pada posisi manajerial (PPM). Persamaan regresi data panel pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} IPEI_{it} = & -6,456*** + 0,324***RLSP_{it} + 0,118***AHHP_{it} + 0,006TPAKP_{it} \\ & -0,002KPP_{it} + 0,002PPM_{it} + 0,049**FDI_{it} \end{aligned} \quad (4.1)$$

4.2.5 Hasil Uji Signifikansi

4.2.4.1 Uji Simultan (Uji-F)

Uji F merupakan uji yang dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Adapun pada penelitian ini nilai F hitung sebesar 48,388 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000. Selanjutnya, F tabel pada taraf signifikansi 5% dengan df1 (k) yaitu 6 dan df2 (n-k-1) yaitu 231, didapatkan nilai F tabel sebesar 2,145. Dengan itu F hitung (48,388) > F tabel (2,138), sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya rata-rata lama sekolah (RLS), angka harapan hidup (AHH) perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan, keterwakilan perempuan di parlemen (KPP), proporsi perempuan pada posisi manajerial (PPM), dan investasi asing langsung (FDI) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

4.2.4.1 Uji Parsial (Uji-t)

Uji t adalah uji signifikansi variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Adapun nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% sebesar 1,65. Berdasarkan Tabel 4.16 hasil estimasi menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen penelitian dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Variabel Rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan

variabel RLSP memiliki nilai t hitung sebesar 5,46 yang mana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel ($5,46 > 1,65$), artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga hipotesis RLSP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif diterima.

2. Variabel Angka harapan hidup (AHH) perempuan

Variabel AHHP memiliki nilai t hitung sebesar 4,55 dengan nilai t tabel sebesar 1,65, maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara AHHP terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan itu hipotesis pertama pada penelitian ini diterima.

3. Variabel Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan

Variabel TPAK perempuan memiliki nilai t hitung sebesar 0,98 dimana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan t tabel ($0,98 < 1,65$), artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa TPAKP berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif ditolak.

4. Variabel keterwakilan perempuan di parlemen (KPP)

Pada variabel KPP memiliki nilai t hitung sebesar $-0,42$, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada t tabel ($-0,42 < 1,65$), artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga hipotesis PPP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dinyatakan ditolak.

5. Variabel proporsi perempuan pada posisi manajerial (PPM)

Variabel PPM memiliki nilai t hitung sebesar $0,92$, nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan t tabel ($0,92 < 1,65$), artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa variabel PPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dinyatakan ditolak.

6. Variabel investasi asing langsung (FDI)

Nilai t hitung pada variabel FDI sebesar $2,34$, nilai tersebut lebih besar daripada t tabel ($2,34 > 1,65$), artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian hipotesis FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dinyatakan diterima.

4.2.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan Tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai R square sebesar $0,557$. Dengan demikian, variasi RLSP, AHHP, TPAKP, KPP, PPM, dan FDI secara keseluruhan dapat menjelaskan variasi pada IPEI yaitu sebesar $55,7\%$. Sedangkan, sisanya $44,3\%$ dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel RLS perempuan memperoleh nilai koefisien sebesar 0,324, artinya setiap peningkatan satu tahun rata-rata lama sekolah perempuan, maka akan meningkatkan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif sebesar 0,324 *ceteris paribus*. Dengan itu menunjukkan bahwa variabel RLS perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Menurut teori modal manusia oleh Becker (1964), pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada konteks gender, peningkatan rata-rata lama sekolah perempuan tidak hanya meningkatkan produktivitas angkatan kerja, tetapi dapat menghasilkan eksternalitas positif mencakup perbaikan kesehatan keluarga dan pendidikan anak. Dengan perempuan berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran kesehatan yang lebih baik, di mana terlihat dari penurunan angka kematian ibu. Selain itu, perempuan terdidik cenderung lebih mengalokasikan pendapatan rumah tangga untuk pendidikan anak, dengan semakin memperkuat akumulasi modal manusia pada generasi selanjutnya.

Hasil estimasi sejalan dengan penelitian dari Cabeza-García et al., (2018), Hong et al., (2019), dan Hamid (2023) menyatakan bahwa pendidikan perempuan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengurangan kemiskinan serta kesenjangan pendapatan. Melalui peningkatan rata-rata lama

sekolah perempuan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja, yang mana dapat memungkinkan akses ke pekerjaan yang lebih produktif. Selain itu, dengan pendidikan perempuan dapat mengurangi kesenjangan gender dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menurut Vera & Sitorus (2016) pendidikan perempuan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu pertama, pendidikan yang lebih tinggi bagi perempuan mampu meningkatkan keterampilan dan kompetensi, yang mana mendorong partisipasi yang lebih besar pada angkatan kerja. Sementara itu, dengan pendidikan yang memadai dapat mengurangi praktik pernikahan dini yang mana seringkali membatasi peluang ekonomi perempuan, dan dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui penurunan angka fertilitas. Kedua, pada negara berkembang pendidikan perempuan yang lebih tinggi memberikan timbal balik yang lebih luas meliputi peningkatan pendapatan rumah tangga, peningkatan partisipasi perempuan pada pembangunan ekonomi dan sosial. Adapun dampak tersebut dapat menciptakan siklus positif guna mempercepat pertumbuhan ekonomi serta memperluas pemerataan hasil pembangunan.

4.3.2 Pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Variabel angka harapan hidup (AHH) perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan nilai koefisien sebesar 0,118, artinya setiap peningkatan satu tahun angka harapan hidup perempuan, maka meningkatkan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif sebesar 0,118, *ceteris paribus*.

Hasil tersebut sejalan dengan pandangan teori modal manusia menurut Becker (1964) menyatakan bahwa kesehatan penduduk, termasuk perempuan sebagai komponen penting dari modal manusia. Adapun angka harapan hidup perempuan mencerminkan kualitas kesehatan dan tingkat kesejahteraan dasar perempuan. Dengan semakin tinggi usia harapan hidup, maka semakin panjang waktu perempuan untuk dapat berkontribusi secara produktif pada perekonomian. Hal ini juga mencerminkan membaiknya sistem pelayanan kesehatan serta akses pada fasilitas publik, sebagai faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Menurut Lawanson & Umar (2019) bahwa angka harapan hidup (AHH) perempuan memiliki hubungan kausal dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan kondisi kesehatan perempuan yang baik, maka memberikan dampak pada peningkatan produktivitas, partisipasi perempuan pada aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kesehatan perempuan tidak hanya sebagai aspek sosial, tetapi juga sebagai faktor ekonomi yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata serta inklusif. Adapun peran pemerintah sangat penting untuk terus memperluas akses layanan kesehatan bagi perempuan, utamanya di daerah tertinggal, karena investasi pada kesehatan perempuan terbukti memberikan dampak positif bagi perluasan kesempatan ekonomi secara menyeluruh di Indonesia.

4.3.3 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Variabel TPAK perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pertumbuhan ekonomi inklusif. Berdasarkan teori pertumbuhan endogen oleh Paul Romer (1986), tenaga kerja termasuk perempuan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun perempuan yang aktif pada angkatan kerja tidak hanya dapat meningkatkan output ekonomi, tetapi dapat mendorong inovasi dengan membawa perspektif yang lebih beragam. Tetapi dalam penelitian ini memberikan hasil yang berbeda, di mana hasil estimasi membuktikan pengaruh tidak signifikan antara variabel TPAK perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Az-zahro (2024) yang menyatakan bahwa kuantitas TPAKP tidak cukup untuk menunjukkan kualitas kerja, formalitas sektor, dan kemampuan produktif yang merupakan kunci utama agar partisipasi perempuan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Todaro & Smith (2010) menjelaskan bahwa pengaruh angkatan kerja terhadap perekonomian tergantung pada kemampuan perekonomian dalam menyerap angkatan kerja. Adapun angkatan kerja perempuan harus produktif dalam perekonomian guna dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Ali & Son, 2007). Merujuk pada konsep pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan membuka peluang ekonomi serta menciptakan kesetaraan akses bagi masyarakat untuk dapat berkontribusi pada peluang ekonomi merupakan salah satu strategi untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif. Oleh karena itu, hubungan tingkat

partisipasi angkatan kerja perempuan berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif terjadi karena angkatan kerja perempuan yang tersedia kurang terserap pada berbagai peluang ekonomi, serta masih terjadi diskriminasi kerja pada perempuan di pasar tenaga kerja. Sehingga hal tersebut menyebabkan angkatan kerja perempuan tersedia, tetapi tidak produktif pada proses perekonomian.

4.3.4 Pengaruh Keterwakilan Perempuan di Parlemen terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel keterwakilan perempuan di parlemen tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pertumbuhan ekonomi inklusif. Secara teoritis, keterwakilan perempuan di parlemen diasumsikan dapat mendorong kebijakan yang lebih inklusif serta responsif terhadap kelompok rentan seperti perempuan. Adapun penelitian dari Cabeza-García et al. (2018), Ali Shahzad et al. (2021), dan Dahlum et al. (2022), menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen sebagai indikator pemberdayaan politik yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini terjadi karena perempuan di badan legislatif dapat mempengaruhi perumusan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan pembangunan inklusif.

Sementara itu, pada penelitian ini memberikan hasil yang berbeda, di mana hasil estimasi menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian dari Ashraf et al. (2024) bahwa di negara Asia Pasifik lebih mengarahkan pada kebijakan ekonomi makro dan pembangunan infrastruktur,

sehingga kebijakan yang mendukung kesetaraan gender belum menjadi prioritas utama. Selain itu, perempuan masih mengalami hambatan dalam keterlibatan politik, dengan demikian kemampuan perempuan dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi masih terbatas.

Pada konteks Indonesia peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini terjadi karena dengan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen hanya sebagai pemenuhan kuota serta tidak menjamin dapat memberikan pengaruh secara substantif. Meskipun berdasarkan data yang telah dijabarkan pada latar belakang menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen meningkat tiap tahunnya, tetapi belum mampu memberikan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam merancang kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.

Temuan ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa meskipun jumlah perempuan di parlemen mengalami peningkatan dari periode ke periode, secara proporsional jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan laki-laki. Berdasarkan data Pemilu 2019, misalnya, keterwakilan perempuan di DPR RI hanya sekitar 20,5% dari total kursi, jauh di bawah laki-laki yang mendominasi lebih dari 75% kursi. Kondisi ini mencerminkan bahwa suara perempuan di lembaga legislatif masih terbatas sehingga daya tawar politiknya dalam proses perumusan kebijakan tidak cukup kuat untuk menggeser agenda pembangunan ke arah yang lebih inklusif dan responsif gender.

Keterbatasan jumlah ini berimplikasi pada rendahnya kemampuan perempuan parlemen untuk membentuk *critical mass*, yaitu jumlah minimum yang dibutuhkan agar kelompok tertentu dapat memberikan pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan politik. Tanpa tercapainya *critical mass*, isu-isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan kelompok rentan sering kali tenggelam oleh agenda dominan yang lebih mengutamakan kepentingan politik mayoritas. Dengan kata lain, meskipun secara formal ada representasi perempuan, secara substantif suara mereka belum cukup kuat untuk mengarahkan kebijakan pada aspek inklusif yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, dinamika politik di parlemen Indonesia juga menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan sering kali bersifat simbolis daripada substantif. Hal ini berarti keberadaan perempuan di parlemen belum sepenuhnya diterjemahkan dalam bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan yang pro-perempuan atau pro-inklusivitas. Beberapa anggota perempuan masih lebih terikat pada garis partai dan kepentingan politik kelompoknya dibandingkan pada agenda kesetaraan gender itu sendiri.

Oleh karena itu, meskipun ada peningkatan keterwakilan perempuan, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif belum dapat terdeteksi secara signifikan dalam penelitian ini. Dengan demikian, rendahnya proporsi dan suara politik perempuan di parlemen menjadi salah satu alasan utama mengapa variabel keterwakilan perempuan di parlemen tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

4.3.5 Pengaruh Proporsi Perempuan pada Posisi Manajerial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel proporsi perempuan pada posisi manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pertumbuhan ekonomi inklusif. Adapun partisipasi perempuan pada posisi manajerial sebagai bentuk nyata dari kesetaraan gender pada kepemimpinan ekonomi serta pengambilan keputusan strategis. Kehadiran perempuan pada posisi manajerial dianggap penting karena mencerminkan pencapaian kesetaraan gender pada tingkat kepemimpinan serta dapat membuka ruang bagi kebijakan yang lebih inklusif.

Dalam penelitian ini memberikan hasil yang berbeda, dimana variabel PPM tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Indonesia. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Post & Byron (2015), menyatakan bahwa Meskipun keberadaan perempuan di posisi manajerial sering dianggap sebagai indikator kemajuan gender dan inklusivitas, tetapi jumlah atau proporsi perempuan pada jabatan manajerial belum tentu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Perempuan yang menduduki jabatan manajerial seringkali bukan karena promosi berbasis kualitas, tetapi karena kuota atau representasi simbolis. Pada beberapa kasus peran tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kekuasaan strategis atau pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang berdampak pada output nasional.

Hal tersebut mencerminkan bahwa meskipun terdapat peningkatan proporsi perempuan pada posisi manajerial di beberapa tahun terakhir, tetapi jumlah tersebut

masih relatif rendah dan belum merata pada seluruh sektor. Karena mayoritas perempuan masih menghadapi kendala struktural meliputi beban ganda, bias gender, dan terbatasnya akses terhadap pelatihan kepemimpinan, sehingga membuat kontribusi perempuan terhadap ekonomi menjadi terbatas. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa meskipun partisipasi di posisi manajerial dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, tetapi pada praktiknya di Indonesia, dampaknya masih belum signifikan.

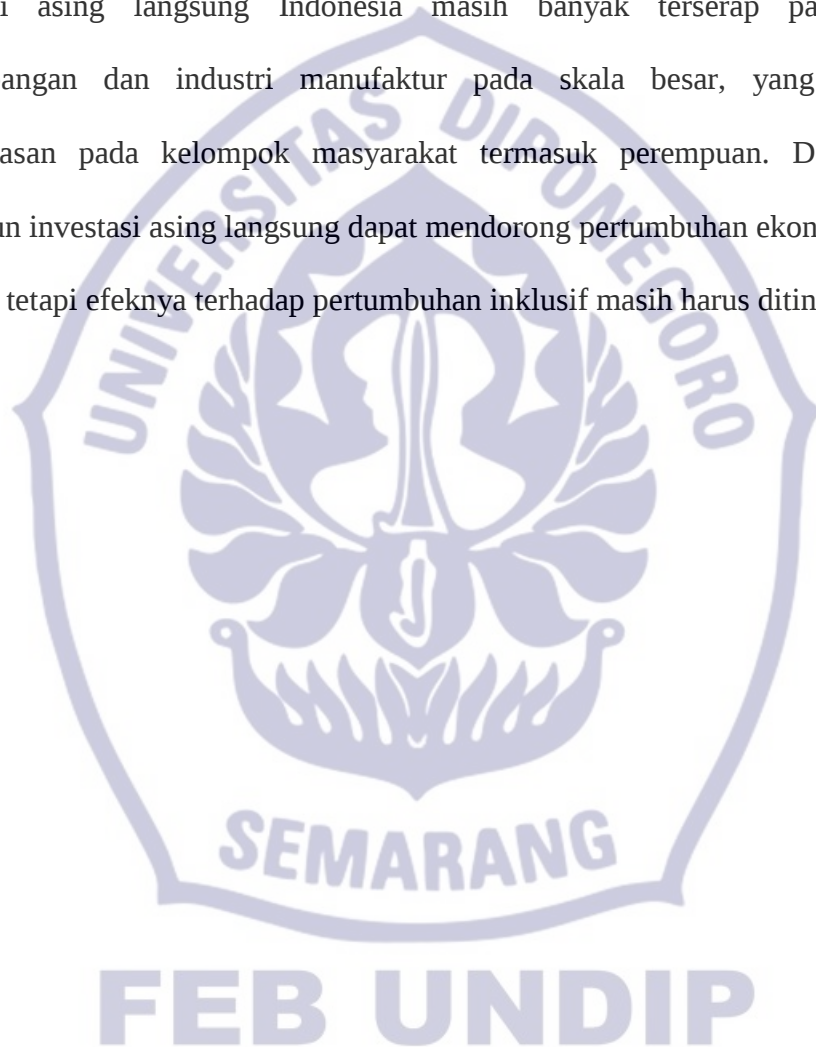
4.3.6 Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Hasil estimasi pada Tabel 4.16 menunjukkan bahwa variabel FDI memiliki koefisien sebesar 0,049, dengan itu setiap peningkatan sebesar 1% pada investasi asing langsung (FDI) maka akan meningkatkan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif sebesar 0,049, *ceteris paribus*. Oleh karena itu, variabel FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Hasil tersebut sesuai dengan teori pertumbuhan endogen menurut Paul Romer (1986) menyatakan bahwa investasi asing langsung berperan sebagai salah satu bentuk transfer teknologi eksternal yang dapat mendorong peningkatan output ekonomi, penciptaan lapangan kerja di sektor manufaktur maupun jasa yang sering kali menyerap tenaga kerja perempuan dan masyarakat pedesaan.

Hasil tersebut sejalan dengan temuan dari Ashraf et al. (2024) dan Lawanson & Umar (2019) menyatakan bahwa investasi asing langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana investasi asing

langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan transfer teknologi.

Pada konteks Indonesia, investasi asing langsung berperan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, meskipun belum optimal yang ditunjukkan dengan investasi asing langsung Indonesia masih banyak terserap pada sektor pertambangan dan industri manufaktur pada skala besar, yang memiliki keterbatasan pada kelompok masyarakat termasuk perempuan. Dengan itu, meskipun investasi asing langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi efeknya terhadap pertumbuhan inklusif masih harus ditingkatkan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh keterlibatan perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan kepemimpinan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada 34 provinsi di Indonesia dengan periode 2015-2021. Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan data panel model *Random Effect Model* (REM) diperoleh beberapa temuan yaitu sebagai berikut :

1. Hasil estimasi pada penelitian ini menghasilkan hubungan korelasi dan bukan sebagai sebab akibat. Hal ini dikarenakan model estimasi yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM) yang memiliki asumsi eksogenitas yang cukup ketat.
2. Angka harapan hidup perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, mengindikasikan bahwa dengan peningkatan kualitas hidup perempuan pada aspek kesehatan meliputi harapan hidup, maka dapat berkontribusi bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi inklusif. Semakin tinggi harapan hidup perempuan, maka semakin besar peluang perempuan dalam menjalani kehidupan yang produktif dan lebih lama. Sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar guna mengembangkan keterampilan, membangun karir, dan berkontribusi pada berbagai sektor ekonomi.

3. Rata-rata lama sekolah perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, mencerminkan bahwa pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan yang adil dan merata. Adapun semakin lama dan tinggi pendidikan perempuan, maka semakin besar peluang bagi perempuan untuk terlibat pada pekerjaan yang layak, formal, dan berpenghasilan tinggi. Sehingga kontribusi perempuan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga inklusif.
4. Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan peluang ekonomi yang kurang mampu menyerap angkatan kerja termasuk perempuan dapat menyebabkan angkatan kerja perempuan tidak produktif. Oleh karena itu, kondisi tersebut menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.
5. Keterwakilan perempuan di parlemen tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, karena adanya hambatan struktural maupun institusional yang membatasi efektivitas peran perempuan pada proses legislasi. Meskipun secara kuantitatif jumlah perempuan di parlemen mengalami peningkatan, adapun pencapaian tersebut seringkali hanya sebatas pemenuhan kuota yang bersifat administratif, sehingga peningkatan tersebut tidak disertai dengan peran nyata perempuan dalam perumusan kebijakan dan keputusan yang berhubungan dalam menciptakan pembangunan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Oleh karena

itu, representasi perempuan lebih bersifat simbolis dibandingkan substantif, karena belum disertai dengan kewenangan politik yang cukup untuk menentukan prioritas dan mengarahkan hasil kebijakan.

6. Proporsi perempuan pada posisi manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Adapun perempuan yang menduduki posisi manajerial hanya berada pada level menengah maupun sektor administratif, sehingga pengaruhnya terhadap kebijakan perusahaan dan arah pembangunan ekonomi masih sangat terbatas. Di sisi lain, budaya kerja yang masih didominasi oleh laki-laki pada berbagai sektor usaha di Indonesia menjadi penghalang bagi perempuan untuk sepenuhnya berkontribusi pada pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kontribusi perempuan di manajerial dalam penciptaan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi kurang signifikan.
7. Investasi asing langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan masuknya modal asing dapat mendorong aktivitas ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, dapat meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis ekonomi daerah. Dengan itu menyebabkan investasi asing langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

5.2 Keterbatasan

1. Meskipun *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model terbaik berdasarkan hasil uji hausman, pendekatan ini memiliki keterbatasan utama

yaitu asumsi bahwa efek individu bersifat acak tidak dapat berkorelasi dengan variabel independen. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka estimasi parameter model yang dihasilkan dapat menjadi bias dan tidak konsisten. Pada konteks analisis pertumbuhan ekonomi inklusif, karakteristik spesifik provinsi, seperti struktur ekonomi, kualitas institusi, dan kebijakan lokal mungkin berkorelasi dengan variabel independen pada model. Dengan demikian, pendekatan REM tidak sepenuhnya dapat menangkap heterogenitas antar provinsi.

2. Hanya berfokus pada pemberdayaan perempuan, sehingga tidak menunjukkan perbedaan spesifik dengan laki-laki.

5.3 Saran

a. Implikasi Kebijakan

1. Dalam upaya mencapai kesetaraan gender pada bidang pendidikan, maka pemerintah dapat mengambil langkah strategis dengan mempercepat dan memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender pada semua bidang pendidikan meliputi optimalisasi pengurangan angka putus sekolah utamanya bagi perempuan yang menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam mengakses pendidikan serta pemerataan fasilitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal, sehingga pendidikan di Indonesia dapat merata dan berkembang.
3. Pada bidang ketenagakerjaan, salah satu cara guna memperbaiki kondisi ketimpangan gender yaitu diharapkan pemerintah dan perusahaan dapat memperbaiki akses bagi perempuan ke berbagai jenis pekerjaan serta industri dengan memastikan bahwa tidak terdapat diskriminasi pada proses rekrutmen,

dapat mempromosikan kewirausahaan perempuan, dan menghapus diskriminasi upah.

4. Pada bidang politik penting bagi pemerintah dan partai politik untuk tidak hanya menekankan pada jumlah keterwakilan perempuan, tetapi juga memperkuat kualitas dan kapasitas perempuan di parlemen. Adapun dengan peningkatan kapasitas perempuan di parlemen tidak hanya sebagai pemenuhan kuota, tetapi juga memiliki kompetensi, pengaruh untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan serta dapat memperjuangkan prinsip-prinsip inklusivitas pada pembangunan.

5. Pemerintah dapat mendorong pemerataan distribusi investasi asing langsung ke berbagai sektor dan daerah, utamanya ke sektor-sektor yang padat karya dan daerah tertinggal maupun kawasan di luar Jawa yang masih rendah investasi. Dengan mengarahkan investasi asing langsung ke sektor-sektor strategis, maka dapat tercipta lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perbaikan infrastruktur lokal yang dapat mendukung produktivitas jangka panjang.

b. Saran penelitian yang akan datang

1. Menggunakan metode penelitian lain yang dapat menangkap pengaruh karakteristik spesifik yang tidak teramati tetapi bersifat konstan serta mengatasi kemungkinan bias akibat pelanggaran asumsi pada REM. Sehingga hasil estimasi menjadi lebih efektif dan tidak bias.

2. Jika penelitian berfokus pada isu kesetaraan gender, maka indikator yang digunakan sebaiknya memperhitungkan rasio antara perempuan dengan laki-laki. Hal ini penting karena kesetaraan gender pada dasarnya diukur melalui tingkat perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, maupun posisi strategis. Dengan menggunakan pendekatan komparatif, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana kesenjangan gender masih terjadi serta apakah terdapat ketimpangan yang signifikan antara keduanya. Sebaliknya, jika penelitian berfokus pada isu pemberdayaan perempuan, maka fokus analisis cukup diletakkan pada indikator yang menggambarkan kondisi dan capaian perempuan saja, tanpa harus membandingkannya dengan laki-laki. Pemberdayaan perempuan lebih menekankan pada peningkatan kapasitas, akses, dan peran perempuan dalam pembangunan, sehingga relevan untuk menilai apakah perempuan telah mendapatkan peluang yang lebih luas dan mampu berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan demikian, pemisahan fokus antara kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan memberikan kerangka analisis yang lebih jelas sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L., Sulistiyowati, & Amalia, S. N. (2023). *Gender dan Pembangunan Ekonomi* (1st ed.). Madza Media.
- Ali, A., Asim, H., & Anwar, A. (2021). The Socio-economic and Political Role of Women's Empowerment towards Inclusive Growth: Comparative and Regional Analysis. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. *Www.Ijicc.Net*, 15. www.ijicc.net
- Ali, I., & Son, H. H. (2007). *Defining and Measuring Inclusive Growth: Application to the Philippines* (98). www.adb.org/economics
- Ashraf, M. S., Ahmed, F., Kousar, S., Ferreira, P. J. S., & de Almeida, D. M. F. (2024). People Category of UN SDGs 2030 and Sustainable Economic Growth in Asia and the Pacific Region. *Sustainability (Switzerland)*, 16(18). <https://doi.org/10.3390/su16187950>
- Az-zahro, A. A. (2024). Analisis Pengaruh Peranan Perempuan dalam Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 8(3). <https://doi.org/10.29408/jpek.v8i3.28245>
- Bappenas. (2023). *Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia*. <https://inklusif.bappenas.go.id/data>
- BPS. (n.d.). *Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial menurut provinsi, 2021-2023*. Badan Pusat Statistik. Retrieved March 14, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAwMyMy/proporsi-perempuan-yang-berada-di-posisi-managerial-menurut-provinsi.html>
- BPS. (2023a). *Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTAxIzI=/angka-harapan-hidup-ahh-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>
- BPS. (2023b). *Keterlibatan Perempuan di Parlemen*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>

- BPS. (2023c). *Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin* .
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDU5IzI=/rata-rata-lama-sekolah--rls--menurut-jenis-kelamin--tahun-.html>
- BPS. (2024a). *Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia*. BPS.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYzIzI=/indeks-pembangunan-gender--ipg-.html>
- BPS. (2024b). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2021-2023*.
- Brek Karama, F. (2023). Female Leadership and Social-Economic Development in County Governments in Arid and Semi-Arid Lands of Kenya. In *Management Sciences and Procurement* (Vol. 3, Issue 1).
- Cabeza-García, L., Del Brio, E. B., & Oscanoa-Victorio, M. L. (2018). Gender factors and inclusive economic growth: The silent revolution. *Sustainability (Switzerland)*, 10(1). <https://doi.org/10.3390/su10010121>
- Cerra, V., Eichengreen, B., El-Ganainy, A., & Schindler, M. (2022). *How to Achieve Inclusive Growth* (1st ed.). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780192846938.001.0001>
- Connell, Raewyn. (2009). *Gender : in world perspective*. Polity.
- Dahlum, S., Knutsen, C. H., & Mechkova, V. (2022). Women's political empowerment and economic growth. *World Development*, 156.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105822>
- Dwi Adika, N., & Rahmawati, F. (2021). *Analisis Indikator Ketimpangan Gender dan Relevansinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia*. 4(2), 151–162.
- Georgeson, L., & Maslin, M. (2018). Putting the United Nations Sustainable Development Goals into practice: A review of implementation, monitoring, and finance. In *Geo: Geography and Environment* (Vol. 5, Issue 1). Wiley-Blackwell Publishing Ltd.
<https://doi.org/10.1002/geo2.49>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.).

- Hamid, A. (2023). Impact of Women's Education on Inclusive Growth: Insights from South Asia. *Journal of Development and Social Sciences*, 4(III). [https://doi.org/10.47205/jdss.2023\(4-iii\)57](https://doi.org/10.47205/jdss.2023(4-iii)57)
- Hermanto, A. (2017). INTEGRASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Paradigma Teori Gender Kontemporer). *Studia Quranika*, 1(2). <https://doi.org/10.21111/studiquran.v1i2.844>
- Hong, G., Kim, S., Park, G., & Sim, S.-G. (2019). Female Education Externality and Inclusive Growth. *Sustainability*, 11(12), 3344. <https://doi.org/10.3390/su11123344>
- Ianchovichina, E., & Lundstrom, S. (2009). *Inclusive Growth Analytics Framework and Application* (4851). <http://econ.worldbank.org>.
- Kabeer, N. (2012). *Women's Economic Empowerment and Inclusive Growth : Labour Markets and Enterprise Development*. www.soas.ac.uk/cdpr
- Kemenkeu. (2022). *Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah Jalan Menuju Kesetaraan*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lampung/baca-artikel/14208/Pengarusutamaan-Gender-PUG-adalah-Jalan-Menju-Kesetaraan.html>
- Klasen, S. (2010). Measuring and monitoring inclusive growth: Multiple definitions, open questions, and some constructive proposals. *New Horizons, Journal Article* 14(1). www.adb.org/poverty
- Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). The impact of gender inequality in education and employment on economic growth: New evidence for a panel of countries. *Feminist Economics*, 15(3), 91–132. <https://doi.org/10.1080/13545700902893106>
- Kothari, C. R. . (2004). *Research methodology : methods & techniques*. New Age International (P) Ltd.
- Lawanson, O. I., & Umar, D. I. (2019). Gender inequality and its implication for inclusive growth in Nigeria from 1980 to 2018. *Asian Economic and Financial Review*, 9(7), 789–806. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2019.97.789.806>
- Mankiw, N. G. (2003a). *MACROECONOMICS* (5th ed.).

- Mankiw, N. G. (2003b). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage.
- McKinley, T. (2010). *Inclusive Growth Criteria and Indicators: An Inclusive Growth Index for Diagnosis of Country Progress*. www.adb.org/poverty
- Nursyifa, A., Tamala, O. T., Zakiah, R., Rachamani, S. A., & Mutmainah, S. M. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(1). <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.4120>
- Rini, D. L., & Tahi, T. (2021). Inclusive Economic Growth of Indonesia and Its Determinants-Recent Evidence with Provincial Data. *Asian Journal of Interdisciplinary Research*, 85–100. <https://doi.org/10.34256/ajir2118>
- Schultz, T. W. (1961). *Investment in Human Capital* (Vol. 51, Issue 1).
- Sekaran, U. (2014). *Research methods for business: A skill building approach*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. . (2020). *Economic development*. Pearson.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2010). *Economic Development* (11th ed.).
- UNDP. (2023). *Gender Inequality Index (GII)*.
- Vera, A., & Sitorus, Y. (2016). *THE IMPACT OF GENDER INEQUALITY ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA*. 2.
- Wisnujati, N. S. (2020). *Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Kabupaten Bojonegoro*. 20.
- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory Econometrics* (5th ed.). Cengage. www.cengage.com/highered
- Yuslin, H. (2021). Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PuG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(3), 162–170. <https://doi.org/10.11594/jesi.01.03.04>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian

Provinsi	Tahun	IPEI	AHHP	RLSP	TPAKP	KPP	PPM	FDI
Aceh	2015	4,87	71,49	8,40	46,19	14,81	15,47	391945749,2
Aceh	2016	5,38	71,52	8,54	47,27	16,00	18,18	385367350,5
Aceh	2017	5,56	71,55	8,62	47,92	14,81	20,80	431336284,2
Aceh	2018	5,53	71,67	8,71	48,24	14,81	20,56	416054948,4
Aceh	2019	5,74	71,85	8,85	45,68	11,11	26,13	398787805,6
Aceh	2020	5,46	71,91	9,13	48,94	11,11	32,61	417352661,7
Aceh	2021	5,73	71,94	9,22	48,36	11,11	30,60	444880074,8
Sumatera Utara	2015	5,82	70,26	8,66	52,58	14,00	20,82	20263953,59
Sumatera Utara	2016	5,99	70,29	8,78	52,88	15,00	29,23	16500949,93
Sumatera Utara	2017	6,12	70,29	8,96	52,58	15,00	34,04	24635152,31
Sumatera Utara	2018	6,07	70,52	9,08	59,97	17,17	29,76	19963108,44
Sumatera Utara	2019	6,34	70,92	9,17	56,80	13,00	28,96	6171391,05
Sumatera Utara	2020	5,95	71,08	9,28	56,15	13,00	26,92	15852100,12
Sumatera Utara	2021	6,34	71,21	9,33	56,50	13,13	27,29	9438406,76
Sumatera Barat	2015	5,72	70,65	8,32	49,97	9,23	31,74	928554,49
Sumatera Barat	2016	6,00	70,65	8,49	53,48	10,77	31,62	1289568,67
Sumatera Barat	2017	5,98	70,70	8,60	52,93	10,77	31,29	3161313,36
Sumatera Barat	2018	5,93	70,93	8,66	54,81	10,77	32,30	2940151,52
Sumatera Barat	2019	6,15	71,29	8,77	54,26	4,62	33,67	2554744,49
Sumatera Barat	2020	5,67	71,45	8,89	56,24	4,62	38,48	2042494,64
Sumatera Barat	2021	6,17	71,57	8,96	55,04	10,77	33,22	1089547,3
Riau	2015	5,21	72,90	8,17	42,08	27,69	18,19	10625525,46
Riau	2016	5,40	72,90	8,36	46,80	27,69	23,59	14133217,29
Riau	2017	5,51	72,92	8,49	43,43	28,13	24,87	17255502,09
Riau	2018	5,64	73,12	8,71	45,68	28,13	26,68	16796916,51
Riau	2019	5,76	73,43	8,75	45,26	18,46	26,67	16814804,6
Riau	2020	5,43	73,55	8,87	46,40	18,46	32,46	17530328,2
Riau	2021	5,87	73,62	9,01	47,14	21,54	31,06	31245614,66
Jambi	2015	5,21	72,54	7,44	46,77	12,73	24,80	1751406,63
Jambi	2016	5,40	72,62	7,63	48,60	12,73	19,16	991975,9
Jambi	2017	5,51	72,67	7,70	50,28	14,55	18,50	1248913,92
Jambi	2018	5,64	72,8	7,77	51,69	16,98	24,68	1657087,61

Jambi	2019	5,76	72,97	8,01	46,74	14,55	28,72	887899,74
Jambi	2020	5,43	73,07	8,17	50,04	14,55	35,29	439071,3
Jambi	2021	5,87	73,19	8,23	49,89	14,55	29,66	827730,71
Sumatera Selatan	2015	5,38	71,13	7,37	52,76	17,33	21,40	10501935,02
Sumatera Selatan	2016	5,67	71,16	7,48	57,67	17,33	27,03	45427617,65
Sumatera Selatan	2017	5,83	71,17	7,67	53,63	20,27	23,04	19236201,51
Sumatera Selatan	2018	5,70	71,40	7,68	53,23	21,33	27,76	17540085,34
Sumatera Selatan	2019	5,87	71,63	7,82	51,68	21,33	28,49	11976889,35
Sumatera Selatan	2020	5,55	71,86	7,90	54,25	21,26	30,50	25106747,41
Sumatera Selatan	2021	5,97	71,95	8,01	54,54	21,33	31,15	20485115,43
Bengkulu	2015	5,30	70,48	7,89	55,78	15,56	25,94	334995,14
Bengkulu	2016	5,51	70,49	8,01	59,91	17,78	22,33	905787,83
Bengkulu	2017	5,54	70,51	8,16	53,91	17,78	19,98	2255525,53
Bengkulu	2018	5,51	70,76	8,28	56,26	15,56	22,87	2221375,54
Bengkulu	2019	5,75	71,13	8,34	55,20	15,56	28,14	2354723,12
Bengkulu	2020	5,52	71,27	8,50	57,71	16,28	24,67	3127163,37
Bengkulu	2021	5,95	71,40	8,59	55,45	15,91	25,66	385407,03
Lampung	2015	5,26	71,88	7,19	44,57	13,10	22,31	4190691,63
Lampung	2016	5,44	71,90	7,33	52,17	13,10	25,81	1393644,83
Lampung	2017	5,64	71,91	7,49	48,43	14,12	33,98	1961185,14
Lampung	2018	5,58	72,14	7,50	51,22	14,12	26,31	2151449,37
Lampung	2019	5,84	72,48	7,52	50,95	20,00	30,55	2523846,88
Lampung	2020	5,48	72,61	7,73	54,13	20,00	26,64	8104930,96
Lampung	2021	5,95	72,69	7,76	52,36	18,82	25,17	2826318,22
Kepulauan Bangka Belitung	2015	5,96	71,85	7,14	47,10	8,89	21,25	1344859,13
Kepulauan Bangka Belitung	2016	6,24	71,88	7,31	52,98	4,44	16,65	857002,13
Kepulauan Bangka Belitung	2017	6,20	71,89	7,48	47,93	6,67	24,48	2489696,89
Kepulauan Bangka Belitung	2018	6,18	72,11	7,51	50,03	4,44	22,80	752925,97
Kepulauan Bangka Belitung	2019	6,23	72,46	7,54	48,03	4,44	23,61	1442430,53
Kepulauan Bangka Belitung	2020	5,83	72,59	7,67	48,47	4,44	23,19	787075,96
Kepulauan Bangka Belitung	2021	6,49	72,50	7,82	46,86	8,89	29,39	726906,93
Kepulauan Riau	2015	6,35	71,38	9,36	42,58	13,33	31,70	10414120,76
Kepulauan Riau	2016	6,36	71,39	9,46	46,45	16,28	11,38	8441552,29

Kepulauan Riau	2017	6,34	71,40	9,57	49,96	17,78	24,40	16774149,85
Kepulauan Riau	2018	6,43	71,56	9,60	46,62	17,78	39,38	13518517,47
Kepulauan Riau	2019	6,58	71,73	9,77	45,35	11,11	33,75	22171474,46
Kepulauan Riau	2020	6,18	71,90	9,98	48,93	11,11	23,63	26822377,86
Kepulauan Riau	2021	6,66	72,07	10,06	51,92	8,89	25,66	16972545,03
DKI Jakarta	2015	7,00	74,36	10,20	50,22	17,92	23,51	58858320,86
DKI Jakarta	2016	7,26	74,41	10,42	50,58	18,87	24,24	55261188,58
DKI Jakarta	2017	7,36	74,41	10,61	45,56	18,87	30,31	74723430,5
DKI Jakarta	2018	7,65	74,56	10,63	47,86	19,81	30,16	78995431,63
DKI Jakarta	2019	7,88	74,68	10,65	47,62	21,70	35,96	67047813,7
DKI Jakarta	2020	7,19	74,80	10,76	47,47	21,70	34,19	58759123,27
DKI Jakarta	2021	7,93	74,91	10,83	47,34	21,70	33,15	54161884,14
Jawa Barat	2015	5,69	74,36	7,35	38,74	22,00	20,36	93322165,53
Jawa Barat	2016	5,89	74,39	7,52	40,30	24,00	22,84	88967228,71
Jawa Barat	2017	5,96	74,42	7,69	43,89	22,00	24,10	83633325,51
Jawa Barat	2018	6,02	74,62	7,71	42,25	22,00	27,56	90635699,65
Jawa Barat	2019	6,18	74,81	7,90	46,33	20,00	28,17	95636233,9
Jawa Barat	2020	5,63	75,00	8,11	46,79	20,83	31,44	77954670,03
Jawa Barat	2021	6,02	75,19	8,23	47,88	20,83	33,73	84849715,63
Jawa Tengah	2015	5,95	75,95	6,50	53,89	24,24	25,34	13829119,76
Jawa Tengah	2016	6,14	75,99	6,65	53,94	24,00	23,99	16762766,52
Jawa Tengah	2017	6,34	76,02	6,78	56,26	24,00	25,16	38581357,75
Jawa Tengah	2018	6,25	76,10	6,87	56,43	22,00	31,67	38584610,13
Jawa Tengah	2019	6,51	76,16	7,03	55,35	19,17	33,10	44284406,08
Jawa Tengah	2020	6,01	76,3	7,24	57,54	18,80	33,43	22174726,84
Jawa Tengah	2021	6,43	76,42	7,34	57,58	18,33	30,91	23838319,21
DI Yogyakarta	2015	6,22	76,54	8,40	57,30	12,73	19,02	1448935,29
DI Yogyakarta	2016	6,39	76,54	8,60	62,10	10,91	27,01	318733,24
DI Yogyakarta	2017	6,50	76,57	8,73	62,69	12,73	31,89	593559,35
DI Yogyakarta	2018	6,49	76,65	8,80	64,03	12,73	39,43	1322092,47
DI Yogyakarta	2019	6,69	76,76	8,87	63,95	16,36	33,41	237423,74
DI Yogyakarta	2020	6,13	76,83	9,16	64,33	18,18	40,54	157740,43
DI Yogyakarta	2021	6,63	76,89	9,31	64,59	20,00	25,84	354509,42
Jawa Timur	2015	5,73	72,67	6,57	52,43	15,00	20,77	42173611,46
Jawa Timur	2016	5,99	72,68	6,69	52,06	15,00	26,61	31564347,9
Jawa Timur	2017	6,11	72,70	6,78	54,37	15,00	32,25	25477518,73
Jawa Timur	2018	6,12	72,87	6,85	55,31	15,00	28,13	21683617,46
Jawa Timur	2019	6,37	73,15	7,04	55,07	18,33	35,92	14087683,97
Jawa Timur	2020	5,93	73,27	7,30	56,56	18,33	39,99	25620623,45

Jawa Timur	2021	6,31	73,35	7,45	56,11	17,50	37,86	30071505,48
Banten	2015	5,34	71,41	7,66	41,67	18,82	16,13	41337749,8
Banten	2016	5,57	71,44	7,82	45,29	18,82	25,33	47356278,99
Banten	2017	5,59	71,47	7,98	42,8	20,00	24,76	49558140,25
Banten	2018	5,60	71,62	8,04	44,3	23,53	28,48	45977269,87
Banten	2019	5,95	71,81	8,24	45,21	17,65	26,88	30380481,58
Banten	2020	5,48	71,93	8,45	46,62	17,65	33,89	34859008,84
Banten	2021	6,09	71,99	8,46	46,84	17,65	34,26	35613561
Bali	2015	6,54	73,31	7,33	67,24	9,09	22,17	8062650,02
Bali	2016	6,75	73,32	7,53	70,56	9,09	33,02	7327612,14
Bali	2017	6,54	73,35	7,75	67,70	9,09	25,49	14422679,11
Bali	2018	6,64	73,57	7,82	70,14	9,09	21,08	16302554,75
Bali	2019	6,82	73,89	8,03	65,67	16,36	23,58	6927569,4
Bali	2020	5,60	74,03	8,21	67,86	16,36	36,38	4769615,27
Bali	2021	6,23	74,17	8,36	67,61	16,36	32,96	7350378,8
Nusa Tenggara Barat	2015	5,73	67,33	6,02	52,98	9,23	19,53	11373572,86
Nusa Tenggara Barat	2016	5,57	67,39	6,13	61,99	9,38	21,68	7138974,1
Nusa Tenggara Barat	2017	5,32	67,42	6,27	56,18	9,23	18,04	2148196,99
Nusa Tenggara Barat	2018	5,04	67,75	6,36	54,27	9,23	26,23	4091494,04
Nusa Tenggara Barat	2019	6,00	68,16	6,58	56,36	1,54	23,31	4402096,33
Nusa Tenggara Barat	2020	5,71	68,39	6,64	58,66	1,56	32,45	4912719,99
Nusa Tenggara Barat	2021	6,06	68,66	6,66	59,18	1,59	29,99	3971155,98
Nusa Tenggara Timur	2015	4,26	67,91	6,61	58,43	10,77	21,14	1136706,81
Nusa Tenggara Timur	2016	4,57	67,92	6,75	59,15	10,77	19,13	946442,58
Nusa Tenggara Timur	2017	4,80	67,96	6,87	58,65	9,23	26,56	2260404,1
Nusa Tenggara Timur	2018	4,82	68,28	7,00	60,90	10,77	26,22	1632694,76
Nusa Tenggara Timur	2019	4,97	68,81	7,23	59,74	18,46	31,24	2062008,92
Nusa Tenggara Timur	2020	4,65	68,96	7,28	63,91	20,00	23,31	1322092,47

Nusa Tenggara Timur	2021	5,24	69,11	7,29	65,34	20,00	31,30	1284690,1
Kalimantan Barat	2015	4,96	71,87	6,43	54,93	10,77	22,38	21721019,83
Kalimantan Barat	2016	5,22	71,89	6,44	53,93	10,77	25,66	10256380,33
Kalimantan Barat	2017	5,18	71,90	6,49	53,38	10,77	18,65	9243263,96
Kalimantan Barat	2018	5,31	72,16	6,62	53,07	10,77	27,20	7999228,61
Kalimantan Barat	2019	5,55	72,55	6,79	52,92	13,85	23,25	8656209,37
Kalimantan Barat	2020	5,27	72,67	6,84	53,86	13,85	24,37	12347660,67
Kalimantan Barat	2021	5,79	72,74	6,93	53,43	16,92	23,68	7535764,46
Kalimantan Tengah	2015	5,51	71,49	7,59	53,55	26,67	18,26	15182109,84
Kalimantan Tengah	2016	5,63	71,49	7,73	53,61	26,67	10,25	6638107,58
Kalimantan Tengah	2017	5,82	71,50	7,91	49,19	28,89	16,53	10423877,9
Kalimantan Tengah	2018	5,74	71,55	8,00	51,82	24,44	22,08	11033699,15
Kalimantan Tengah	2019	5,97	71,60	8,16	51,53	35,56	29,03	4610248,65
Kalimantan Tengah	2020	5,59	71,66	8,25	50,57	33,33	29,69	2888113,44
Kalimantan Tengah	2021	6,12	71,72	8,29	51,12	33,33	26,78	2642558,75
Kalimantan Selatan	2015	5,67	69,78	7,23	53,87	16,36	22,49	15630938,28
Kalimantan Selatan	2016	5,97	69,84	7,40	57,54	12,70	20,69	4055717,86
Kalimantan Selatan	2017	6,01	69,95	7,52	54,99	12,73	24,73	3964651,22
Kalimantan Selatan	2018	5,92	70,19	7,53	54,98	16,36	20,07	2101037,48
Kalimantan Selatan	2019	6,14	70,45	7,70	54,05	20,00	26,58	6064062,51
Kalimantan Selatan	2020	5,75	70,62	7,88	55,5	20,00	29,27	3915865,52
Kalimantan Selatan	2021	6,24	70,79	7,91	54,72	20,00	28,48	1905894,68
Kalimantan Timur	2015	5,72	75,59	8,68	38,58	10,91	16,68	18532061,24
Kalimantan Timur	2016	5,85	75,59	8,82	47,69	10,91	23,39	20899793,88

Kalimantan Timur	2017	6,04	75,61	8,93	42,33	10,91	23,35	20899793,88
Kalimantan Timur	2018	5,95	75,87	9,06	45,18	10,91	24,6	9553866,25
Kalimantan Timur	2019	6,22	76,13	9,25	47,17	18,18	21,94	14001495,9
Kalimantan Timur	2020	5,77	76,21	9,27	47,96	18,18	30,52	6146998,2
Kalimantan Timur	2021	6,24	76,51	9,42	48,2	20,37	30,38	12118367,88
Kalimantan Utara	2015	5,45	74,28	8,25	40,75	20,00	13,51	3754872,71
Kalimantan Utara	2016	5,67	74,30	8,43	38,57	14,29	18,41	2614913,52
Kalimantan Utara	2017	5,88	74,34	8,44	49,02	11,43	13,45	2423023,1
Kalimantan Utara	2018	6,04	74,37	8,69	49,44	20,00	19,16	1094425,87
Kalimantan Utara	2019	6,17	74,40	8,76	45,16	11,43	21,08	1328597,23
Kalimantan Utara	2020	5,55	74,44	8,82	47,62	14,29	26,27	1112313,96
Kalimantan Utara	2021	6,22	74,48	8,93	48,44	11,43	29,31	2170963,65
Sulawesi Utara	2015	5,58	72,98	8,86	40,26	36,36	27,09	1431047,2
Sulawesi Utara	2016	5,74	72,99	9,00	47,87	37,78	36,76	6225055,32
Sulawesi Utara	2017	5,83	73,01	9,19	41,70	38,64	43,35	7852871,51
Sulawesi Utara	2018	5,78	73,23	9,24	45,16	33,33	41,22	4811896,21
Sulawesi Utara	2019	6,16	73,55	9,39	45,14	28,89	36,62	3585748,95
Sulawesi Utara	2020	5,65	73,67	9,47	45,68	29,27	47,93	2531977,83
Sulawesi Utara	2021	6,15	73,72	9,64	44,72	29,55	42,14	2749887,29
Sulawesi Tengah	2015	5,36	69,26	7,66	48,89	15,56	27,20	17647413,88
Sulawesi Tengah	2016	5,41	69,28	7,84	57,16	20,00	18,54	26023918,57
Sulawesi Tengah	2017	5,44	69,29	8,00	49,49	20,00	27,28	25134392,64
Sulawesi Tengah	2018	5,38	69,75	8,27	53,91	24,44	34,02	10934501,56
Sulawesi Tengah	2019	5,72	70,26	8,50	50,33	24,44	32,49	29352729,5
Sulawesi Tengah	2020	5,86	70,72	8,58	52,5	26,67	37,01	28929920,1
Sulawesi Tengah	2021	6,41	70,85	8,62	52,17	27,27	39,30	44201470,39
Sulawesi Selatan	2015	5,42	71,80	7,34	44,31	18,82	26,98	3793901,27
Sulawesi Selatan	2016	5,57	72,47	7,46	47,47	21,18	10,86	6057557,75
Sulawesi Selatan	2017	5,73	71,86	7,63	43,76	21,18	27,44	11591482,32
Sulawesi Selatan	2018	5,76	72,10	7,76	47,65	19,05	28,60	10036844,68
Sulawesi Selatan	2019	6,04	72,42	7,95	47,01	27,71	27,36	4920850,94
Sulawesi Selatan	2020	5,56	72,56	8,15	48,16	28,40	26,42	3839434,59
Sulawesi Selatan	2021	6,11	72,65	8,20	49,42	25,88	32,14	5041189
Sulawesi Tenggara	2015	5,23	72,46	7,70	53,93	20,00	37,60	2357975,5

Sulawesi Tenggara	2016	5,55	72,47	7,86	61,42	17,78	17,68	6116100,59
Sulawesi Tenggara	2017	5,64	72,47	7,95	54,93	17,78	18,04	11269496,7
Sulawesi Tenggara	2018	5,53	72,71	8,26	55,65	18,18	32,21	10942632,51
Sulawesi Tenggara	2019	5,81	73,12	8,47	54,98	17,78	30,76	16061878,63
Sulawesi Tenggara	2020	5,50	73,37	8,64	56,02	19,05	21,54	20629846,34
Sulawesi Tenggara	2021	6,02	73,37	8,72	56,27	20,00	27,18	26287361,35
Gorontalo	2015	4,80	69,14	7,34	45,8	28,89	43,28	112207,11
Gorontalo	2016	5,19	69,16	7,41	53,12	28,89	36,52	206526,13
Gorontalo	2017	5,15	69,20	7,56	46,71	29,55	37,29	671616,47
Gorontalo	2018	5,25	69,53	7,76	51,66	28,89	39,47	663485,52
Gorontalo	2019	5,57	69,94	8,00	50,03	26,67	45,82	2785663,47
Gorontalo	2020	5,25	70,09	8,09	49,95	26,67	50,43	1099304,44
Gorontalo	2021	5,61	70,21	8,22	50,41	26,67	39,80	1268428,2
Sulawesi Barat	2015	4,82	66,18	6,71	54,8	15,56	21,35	32523,8
Sulawesi Barat	2016	5,14	66,20	6,91	55,34	17,78	32,32	334995,14
Sulawesi Barat	2017	5,17	66,23	7,08	49,86	20,00	34,63	185385,66
Sulawesi Barat	2018	5,12	66,47	7,28	53,96	17,78	32,07	401668,93
Sulawesi Barat	2019	5,43	66,78	7,50	52,86	11,11	29,95	164245,19
Sulawesi Barat	2020	4,99	67,02	7,60	55,02	11,11	31,49	105702,35
Sulawesi Barat	2021	5,67	67,19	7,66	54,38	11,11	30,01	95945,21
Maluku	2015	4,76	67,28	8,91	50,77	26,67	28,03	1339980,56
Maluku	2016	5,02	67,34	9,08	51,97	26,67	30,24	1668470,94
Maluku	2017	5,13	67,39	9,17	45,16	28,89	31,54	3447522,8
Maluku	2018	5,12	67,58	9,41	50,05	26,67	35,67	130095,2
Maluku	2019	5,44	67,79	9,66	50,50	23,26	35,80	536642,7
Maluku	2020	5,09	67,93	9,80	53,52	23,26	26,47	2873477,73
Maluku	2021	5,63	68,05	9,95	53,71	23,26	37,72	216283,27
Maluku Utara	2015	4,93	69,48	7,80	48,56	13,89	25,41	3314175,22
Maluku Utara	2016	5,25	69,50	8,06	48,88	16,28	28,10	7137347,91
Maluku Utara	2017	5,28	69,53	8,17	46,36	17,78	28,46	3709339,39
Maluku Utara	2018	5,29	69,79	8,28	49,92	20,45	29,77	5899817,32
Maluku Utara	2019	5,42	70,17	8,55	47,79	26,67	20,62	16400126,15
Maluku Utara	2020	5,42	70,32	8,61	46,57	26,67	29,75	39174917,1
Maluku Utara	2021	6,30	70,44	8,67	47,57	28,89	32,45	45856931,81

Papua Barat	2015	4,52	67,15	6,71	54,31	4,44	22,28	4205327,34
Papua Barat	2016	4,84	67,16	6,80	52,4	4,44	13,52	8366747,55
Papua Barat	2017	4,91	67,19	6,90	54,66	3,57	21,05	1377382,93
Papua Barat	2018	5,18	67,43	7,01	52,15	5,36	25,43	4665539,11
Papua Barat	2019	5,32	67,78	7,19	53,03	14,29	27,02	751299,78
Papua Barat	2020	5,01	67,90	7,37	57,27	14,29	33,40	172376,14
Papua Barat	2021	5,19	68,05	7,53	58,78	14,29	33,42	528511,75
Papua	2015	3,03	66,97	5,05	70,33	12,73	23,71	14586924,3
Papua	2016	3,33	66,99	5,32	66,25	12,73	10,25	19000403,96
Papua	2017	3,44	67,00	5,44	67,45	10,61	19,11	31289521,79
Papua	2018	3,66	67,22	5,70	70,53	16,36	27,52	18413349,37
Papua	2019	3,22	67,51	5,79	66,72	12,73	23,70	15302447,9
Papua	2020	3,58	67,65	5,88	63,47	14,55	22,38	9231880,63
Papua	2021	4,14	67,79	6,00	69,10	14,55	28,23	24215595,29



Lampiran 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
IPEI	238	5.703739	.6729987	3.03	7.93
RLSP	238	8.024496	1.038454	5.05	10.83
AHHP	238	71.63878	2.576684	66.18	76.89
TPAKP	238	52.32307	6.493057	38.57	70.56
KPP	238	17.40546	6.982941	1.54	38.64
PPM	238	27.51664	6.816157	10.25	50.43
log_fdi	238	15.46205	1.630366	10.38973	18.37606

SEMARANG
FEB UNDIP

Lampiran 3. Hasil Regresi Model REM

Random-effects GLS regression		Number of obs	=	238		
Group variable: prov		Number of groups	=	34		
R-squared:		Obs per group:				
Within = 0.3361		min =		7		
Between = 0.6167		avg =		7.0		
Overall = 0.5772		max =		7		
corr(u_i, X) = 0 (assumed)		Wald chi2(6)	=	151.58		
		Prob > chi2	=	0.0000		
IPEI	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
RLSP	.3241786	.0567839	5.71	0.000	.2128841	.435473
AHHP	.1182895	.0279079	4.24	0.000	.0635909	.1729881
TPAKP	.0055487	.0057605	0.96	0.335	-.0057416	.016839
KPP	-.0018383	.0045124	-0.41	0.684	-.0106825	.0070059
PPM	.0024334	.0032627	0.75	0.456	-.0039614	.0088283
log_fdi	.0490705	.0215762	2.27	0.023	.0067819	.0913591
_cons	-6.455765	1.807782	-3.57	0.000	-9.998954	-2.912577
sigma_u	.38766967					
sigma_e	.22315407					
rho	.75111771	(fraction of variance due to u_i)				

Lampiran 4. Hasil Regresi Model CEM

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	238
				F(6, 231)	=	59.31
Model	65.0900424	6	10.8483404	Prob > F	=	0.0000
Residual	42.2537294	231	.182916578	R-squared	=	0.6064
				Adj R-squared	=	0.5961
Total	107.343772	237	.452927307	Root MSE	=	.42769

IPEI	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
RLSP	.2937098	.0331719	8.85	0.000	.2283516	.359068
AHHP	.1200151	.0124272	9.66	0.000	.09553	.1445002
TPAKP	.0036538	.0049316	0.74	0.460	-.006063	.0133705
KPP	-.0192213	.0045564	-4.22	0.000	-.0281988	-.0102438
PPM	.0118418	.0045893	2.58	0.010	.0027996	.0208841
log_fdi	.0502183	.0185089	2.71	0.007	.0137504	.0866861
_cons	-6.209812	.8807765	-7.05	0.000	-7.945194	-4.47443

SEMARANG

FEB UNDIP

Lampiran 5. Hasil Regresi Model FEM

Fixed-effects (within) regression
 Group variable: prov

Number of obs = 238
 Number of groups = 34

R-squared:
 Within = 0.3398
 Between = 0.5935
 Overall = 0.5569

Obs per group:
 min = 7
 avg = 7.0
 max = 7

corr(u_i, Xb) = -0.2328

F(6,198) = 16.99
 Prob > F = 0.0000

IPEI	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
RLSP	.3781072	.1249655	3.03	0.003	.131673	.6245414
AHHP	.1142487	.0930287	1.23	0.221	-.0692055	.2977029
TPAKP	.0018967	.0070144	0.27	0.787	-.0119358	.0157293
KPP	.0015462	.0048993	0.32	0.753	-.0081153	.0112077
PPM	.0007108	.0035796	0.20	0.843	-.0063482	.0077699
log_fdi	.0522059	.0241823	2.16	0.032	.004518	.0998938
_cons	-6.467945	5.879346	-1.10	0.273	-18.06212	5.126227
sigma_u	.41542001					
sigma_e	.22315407					
rho	.77606063	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(33, 198) = 19.71 Prob > F = 0.0000

SEMARANG
 FEB UNDIP

Lampiran 6. Hasil Hausman

. hausman fixed random

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) Std. err.
	(b) fixed	(B) random		
RLSP	.3781072	.3241786	.0539287	.1113192
AHHP	.1142487	.1182895	-.0040408	.0887439
TPAKP	.0018967	.0055487	-.003652	.0040024
KPP	.0015462	-.0018383	.0033845	.0019082
PPM	.0007108	.0024334	-.0017226	.0014725
log_fdi	.0522059	.0490705	.0031354	.0109201

b = Consistent under H0 and Ha; obtained from xtreg.

B = Inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from xtreg.

Test of H0: Difference in coefficients not systematic

$$\begin{aligned}\chi^2(6) &= (b-B)'[(V_b-V_B)^{-1}](b-B) \\ &= 7.13\end{aligned}$$

$$\text{Prob} > \chi^2 = 0.3087$$

F test that all $u_i=0$: $F(33, 198) = 19.71$

Lampiran 7. Hasil Uji LM

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

$$\text{IPEI}[\text{prov},t] = Xb + u[\text{prov}] + e[\text{prov},t]$$

Estimated results:

	Var	SD = sqrt(Var)
IPEI	.4529273	.6729987
e	.0497977	.2231541
u	.1502878	.3876697

Test: $\text{Var}(u) = 0$

$\text{chibar2}(01) = 340.08$

Prob > $\text{chibar2} = 0.0000$

FEB UNDIP

Lampiran 8. Hasil Uji Normalitas

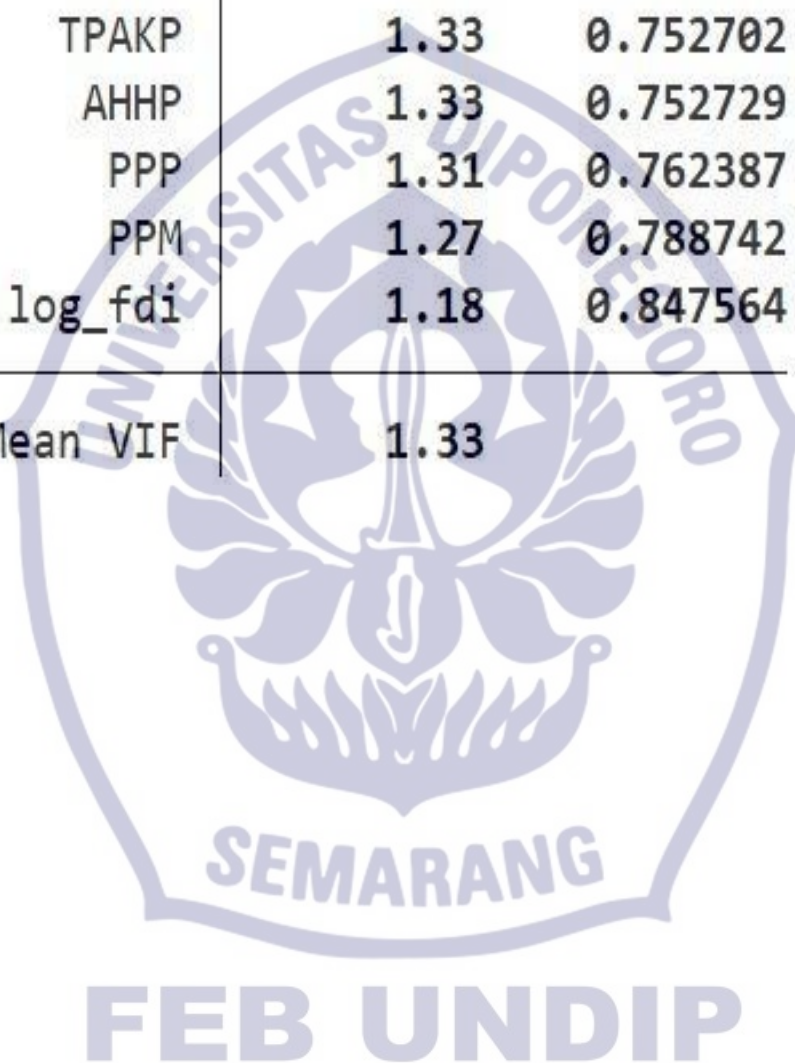
.
. di "Jarque-Bera Test Statistic: " jb
Jarque-Bera Test Statistic: 7.1122973

.
. di "P-value: " pval_jb
P-value: .02854856



Lampiran 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
RLSP	1.54	0.650413
TPAKP	1.33	0.752702
AHHP	1.33	0.752729
PPP	1.31	0.762387
PPM	1.27	0.788742
log_fdi	1.18	0.847564
Mean VIF	1.33	



Lampiran 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas

.
di "Breusch-Pagan Test Statistic: " bp
Breusch-Pagan Test Statistic: 144.31606

.
di "P-value: " pval
P-value: 1.230e-28

FEB UNDIP

Lampiran 11. Hasil Uji Autokorelasi

·
· di "Breusch-Godfrey Test Statistic: " bg
Breusch-Godfrey Test Statistic: 98.020743

·
· di "P-value: " pval_bg
P-value: 4.140e-23



Lampiran 12. Hasil Regresi Model REM dengan Robust Standard Error

Random-effects GLS regression		Number of obs	=	238		
Group variable: prov		Number of groups	=	34		
R-squared:		Obs per group:				
Within = 0.3361		min = 7				
Between = 0.6167		avg = 7.0				
Overall = 0.5772		max = 7				
corr(u_i, X) = 0 (assumed)		Wald chi2(6)	=	184.88		
		Prob > chi2	=	0.0000		
(Std. err. adjusted for 34 clusters in prov)						
IPEI	Coefficient	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
RLSP	.3241786	.0593699	5.46	0.000	.2078156	.4405415
AHHP	.1182895	.0260037	4.55	0.000	.0673231	.1692559
TPAKP	.0055487	.0056742	0.98	0.328	-.0055725	.0166699
KPP	-.0018383	.0043863	-0.42	0.675	-.0104352	.0067586
PPM	.0024334	.0026497	0.92	0.358	-.0027598	.0076267
log_fdi	.0490705	.0209645	2.34	0.019	.0079808	.0901602
_cons	-6.455765	1.703098	-3.79	0.000	-9.793776	-3.117754
sigma_u	.38766967					
sigma_e	.22315407					
rho	.75111771	(fraction of variance due to u_i)				